

BAB - II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Grafik 2. 1. Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, adalah sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah:

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2009, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 421 Kecamatan dan 5828 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 (9,24%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km² (0,02%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel. 2.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ¹⁾

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	9	119	0	980,32
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	381	27	6 620,70
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	212	36	4 352,86
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	147	30	2 158,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3 764,65
06. Toba Samosir	Balige	16	231	13	2 352,35
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2 561,38
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3 675,79
09. Simalungun	Pematang Raya	31	345	22	4 368,60
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	1 927,80
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2 127,25
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	385	9	2 486,14
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6 263,29
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	18	354	2	1 625,91
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2 297,20
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1 218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2 433,50
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1 913,33
19. Batu Bara	Limapuluh	7	141	10	904,96
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	386	2	3 918,05

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3 892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3 116,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3 545,80
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1 501,63
25. Nias Barat	Lahomi	8	110	0	544,09
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	10,77
27. Tanjungbalai	Tanjung Balai	6	0	31	61,52
28. Pematangsiantar	Pematang Siantar	8	0	53	79,97
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	0	35	38,44
30. Medan	Medan	21	0	151	265,10
31. Binjai	Binjai	5	0	37	90,24
32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	42	37	114,65
33. Gunungsitoli	Gunung Sitoli	6	98	3	469,36
SUMATERA UTARA	Medan	422	5 223	656	71 680,68

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Keadaan Juni 2012

b. Letak dan kondisi geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

c. Topografi

1) Kemiringan lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0% - 2% seluas 17,8% dari luas wilayah, 2%-15 % seluas 49,2% dari luas wilayah, 15% - 25% seluas 8,8%, 25% - 40% seluas 10,8% dan diatas 40% seluas 11,3% dari luas wilayah, sedangkan luas wilayah perairan Danau Toba sekitar 112.986 Ha atau 1,6% dari luas wilayah.

2) Ketinggian lahan

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 - 2200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

d. Geologi

1) Struktur dan karakteristik

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (subduction) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

2) Potensi

- Sumber energi

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan Gunungsitoli, Kabupaten Nias serta beberapa wilayah lain.

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan) dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum.

Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

- Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Bahan tambang mineral di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis berupa Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismut, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal dan Wolfram. Selain itu terdapat juga bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Bentonit, Zeolit, Dolomit, Travertin, Diatomea, Trass, Andesit, Granit, Feldspar, Marmer, Kaolin, Batumulia, Batu Gamping, Batu Apung, Perlit, Kalsit, Kukarsit, Fosfat, Lempung, Pasir Kuarsa, Mika, Grafit, Oker, Talk, Sirtu, dan Serpentin.

e. Hidrologi

1) Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 72 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

2) Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang, WS Toba – Asahan dan WS Batang Angkola – Batang Gadis. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan SWS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Wampu – Besitang Lintas Kab/Kota, WS Bah Bolon Lintas Kab/Kota, WS Barumun – Kualuh adalah lintas Kab/Kota, WS Pulau Nias Lintas Kab/Kota, WS Sibundong – Batang Toru Lintas Kab/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3) Debit Air

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Balimbing di Tapanuli Selatan, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar besar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 110.260 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Tonang.

Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi

f. *Klimatologi*

1) Tipe

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3) Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

4) Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

g. **Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:**

1) Kawasan lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 ha atau 52,21 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.774.400,00 ha)

a.	Cagar Alam (CA)	:	12.287,46	Ha
b.	Suaka Margasatwa (SM)	:	85.552,00	Ha
c.	Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	:	187.985,00	Ha
d.	Taman Nasional Batang Gadis (TNBG)	:	108.000,00	Ha
e.	Taman Hutan Raya (Tahura)	:	51.600,00	Ha
f.	Taman Wisata Alam (TWA)	:	3.448,90	Ha
g.	Taman Buru (TB)	:	8.350,00	Ha
h.	Hutan Lindung (HL)	:	1.297.330,00	Ha

- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.967.720,00 ha)

a.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	879.270,00	Ha
b.	Hutan Produksi Tetap (HP)	:	1.035.690,00	Ha
c.	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	:	52.760,00	Ha

Di Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

2) Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas ± 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi

Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan saat ini adalah sekitar 1,1 juta Ha, dengan total produksi sebesar ± 4.411.536,55 ton diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya. Dan untuk perencanaan hingga 20 tahun kedepan seluas sekitar 1,7 Ha.

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 239.000,2 ton pertahun sementara pemanfaatannya sudah sekitar 257.364,8 ton atau 107,7%, atau telah terjadi overfishing (padat tangkap), sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 917.000,5 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 100.707.59 atau 10,9%. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), dengan jumlah pulau sebanyak 214 buah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

2.1.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2
Penetapan Kawasan Andalan Nasional

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (I/D/1) (II/B/2) (I/E/1) (I/A/1) (II/F/2)	industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
2.	Kawasan Pematang Siantar dan Sekitarnya (II/B/2) (I/A/1) (III/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
3.	Kawasan Rantau Prapat - Kisaran (I/B/2) (I/H/1) (II/A/2) (II/F/2) (II/D/2)	Perkebunan, kehutanan Pertanian, perikanan industri
4.	Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya (II/B/2) (II/C/2) (III/G/2) (II/A/2) (II/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertambangan perikanan laut, pertanian industri, pariwisata
5.	Kawasan Nias dan Sekitarnya (I/E/2) (IV/B/2) (II/F/2)	pariwisata perkebunan perikanan
6.	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe - Medan dsk (I/F/2) (I/C/2)	perikanan pertambangan
7.	Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya (I/F/2) (I/C/2)	perikanan pertambangan

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
8.	Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya -(III/F/2) -(III/C/2)	perikanan dan pertambangan

Sumber: PP NO. 26 Tahun 2008

Keterangan:

I - IV: Tahapan Pengembangan

- A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian
 - A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi
 - A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
 - B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan
 - B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan
 - C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan
 - C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan
 - D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
 - D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata
 - E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata
 - E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata
- F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan
 - F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan
 - F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
- G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan
 - G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan
 - G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan
- H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan
 - H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan
 - H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

Di samping kawasan andalan ada juga kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 1. Merek, Kabupaten Karo;
 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara - Asahan meliputi:
 1. Kawasan Tanjungbalai - Asahan;
 2. Kawasan Simalungun - Batubara;
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :
 1. Kawasan Labuan Angin - Sibolga;

2. Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 3. Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya.
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi:
 1. Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
- c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
- d. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu:

- a. Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut RI dengan Malaysia;
- b. Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- c. Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

2.1.1.3. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor
Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara antara lain longsor dan banjir bandang Sibolangit (Deli Serdang, 22 November 1994), Dolok - Saipar Dolok Hole di DAS Bilah (Tapanuli Selatan - Labuhan Batu, Mei 1995), Perbaungan - Lubuk Pakam (Deli Serdang, Januari 2002), Nias (31 Juli 2001 dan 2 Januari 2003), Bahorok (Langkat, 2 Nopember 2003). Berbagai longsor dan banjir bandang dalam ukuran kecil juga telah sering terjadi di berbagai lokasi di Sumatera Utara sebagai contoh Berastagi yang berada di pegunungan di Karo beberapa waktu yang lalu dilanda banjir bandang.

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsoran, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapian Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGS, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salapian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

2. Kawasan rawan zona patahan aktif;
Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.
3. Kawasan rawan gelombang pasang air laut, abrasi dan tsunami; gelombang pasang; rawan abrasi
Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsoran di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami yang menerjang pantai barat Aceh dan Sumatera Utara terjadi 20 menit sampai 5 jam setelah gempa tektonik. Kecepatan gelombang tsunaminya rata-rata 50-100 kilometer per jam. Di pusat gempa, kecepatan tsunami Aceh secara teoretis dapat dihitung, yaitu antara 400 - 800 kilometer per jam. Daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 meter, meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias
4. Kawasan rawan banjir/ banjir bandang
Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Beberapa peristiwa banjir yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
 - Peristiwa banjir (dan juga tanah longsor) yang terbesar selama 3 tahun terakhir di Indonesia terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
 - Di daerah Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada November 2003 terjadi banjir bandang yang berasal dari bagian hulu DAS Bohorok yang menyebabkan 92 orang tewas dan 154 orang hilang.
 - Bencana banjir di beberapa wilayah pada Bulan Desember 2012, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Kepulauan Nias.Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok,

Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapan Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggih, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bampan dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota GunungSitoli pada Kecamatan Gunungsitol.

5. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.
6. Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.
7. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :
 - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600 yaitu pada Tahun 2010.
 - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keenam berpenduduk terbanyak di Indonesia dan provinsi berpenduduk terbesar di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil proyeksi terhadap hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dengan pertumbuhan rata-rata 2000-2010 sebesar 1,22% jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 diperkirakan mencapai 13,215,401 orang, yang terdiri atas 6,591,686 laki-laki dan 6,623,715 perempuan.

Tabel. 2.3
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2012 (dalam ribuan)

KABUPATEN/KOTA	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	64,685	68,175	132,860	94.88
02. Mandailing Natal	201,686	209,245	410,931	96.39
03. Tapanuli Selatan	133,140	134,955	268,095	98.66
04. Tapanuli Tengah	160,012	158,896	318,908	100.70
05. Tapanuli Utara	140,238	143,633	283,871	97.64

KABUPATEN/KOTA	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06. Toba Samosir	86,932	87,933	174,865	98.86
07. Labuhanbatu	214,452	210,192	424,644	102.03
08. A s a h a n	340,302	337,574	677,876	100.81
09. Simalungun	413,871	417,115	830,986	99.22
10. D a i r i	136,483	136,911	273,394	99.69
11. K a r o	178,073	180,750	358,823	98.52
12. Deli Serdang	928,434	917,181	1,845,615	101.23
13. L a n g k a t	492,424	484,461	976,885	101.64
14. Nias Selatan	145,948	148,121	294,069	98.53
15. Humbang Hasundutan	86,769	87,996	174,765	98.61
16. Pakpak Bharat	20,938	20,554	41,492	101.87
17. Samosir	60,384	61,210	121,594	98.65
18. Serdang Bedagai	303,039	300,987	604,026	100.68
19. Batu Bara	191,652	189,371	381,023	101.20
20. Padang Lawas Utara	114,979	114,085	229,064	100.78
21. Padang Lawas	116,289	115,877	232,166	100.36
22. Labuhanbatu Selatan	145,214	139,595	284,809	104.03
23. Labuhanbatu Utara	169,327	166,132	335,459	101.92
24. Nias Utara	63,678	64,855	128,533	98.19
25. Nias Barat	39,597	43,104	82,701	91.86
71. S i b o l g a	43,036	42,816	85,852	100.51
72. Tanjungbalai	79,202	77,973	157,175	101.58
73. Pematangsiantar	115,488	121,459	236,947	95.08
74. Tebing Tinggi	73,036	74,735	147,771	97.73
75. M e d a n	1,047,875	1,074,929	2,122,804	97.48
76. B i n j a i	124,869	125,383	250,252	99.59
77. Padangsidimpuan	96,841	101,968	198,809	94.97
78. Gunungsitoli	62,793	65,544	128,337	95.80
SUMATERA UTARA	6,591,686	6,623,715	13,215,401	99.52

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,52, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni sebesar 104,03 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,86.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data hasil Sensus Penduduk, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 1990-2000 sebesar 1,20 persen dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Jogjakarta (1,02%)

Tabel 2.4.
Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota,
1980, 1990, 2000, dan 2010(%)

KABUPATEN/KOTA	1980 - 1990	1990 - 2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Nias	2,32	1,55	1,03
02. Mandailing Natal	1,94	1,60	1,20

KABUPATEN/KOTA	1980 - 1990	1990 - 2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)
03. Tapanuli Selatan	2,54	1,34	2,12
04. Tapanuli Tengah	2,52	1,37	2,46
05. Tapanuli Utara	0,12	0,04	1,02
06. Toba Samosir	0,29	0,51	-0,38
07. Labuhanbatu	2,97	1,47	1,95
08. Asahan	1,32	0,58	1,11
09. Simalungun	0,59	0,63	-0,46
10. D a i r i	1,37	0,58	0,59
11. K a r o	1,64	0,99	2,17
12. Deli Serdang	2,59	2,10	2,00
13. Langkat	1,47	1,14	0,66
14. Nias Selatan	x	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x	x
16. Pakpak Bharat	x	x	x
17. Samosir	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x
19. Batu Bara	x	x	x
20. Padang Lawas Utara	x	x	x
21. Padang Lawas	x	x	x
22. Labuhanbatu Selatan	x	x	x
23. Labuhanbatu Utara	x	x	x
24. Nias Utara	x	x	x
25. Nias Barat	x	x	x
26. Sibolga	1,84	1,41	0,26
27. Tanjungbalai	9,95	2,11	1,56
28. Pematangsiantar	3,85	1,00	-0,29
29. Tebing Tinggi	2,40	0,71	1,52
30. Medan	2,30	1,00	0,97
31. Binjai	9,05	1,68	1,43
32. Padangsidempuan	x	x	0,26
33. Gunungsitoli	x	x	1,56
SUMATERA UTARA	2,06	1,20	1,22

Sumber : Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010 BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan: x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

c. Sebaran Penduduk

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km²), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2,122,804 orang (16,06%), 1,845,615 orang

(13,97%), dan 976,885 orang (7,39%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 41,492 orang (0,31 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68 kilometer persegi yang didiami oleh 13,215,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi.

Menurut sensus penduduk terakhir tahun 2012, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.008 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 34 orang per kilo meter persegi. Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Sibolga sebesar 7971 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung lahan Kota Sibolga yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Sibolga perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel. 2.5
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	Jumlah	Kepadatan Jiwa per km2	Distribusi Penduduk (%)
1	Nias	132,860	136	1,01
2	Mandailing Natal	410,931	62	3,11
3	Tapanuli Selatan	268,095	62	2,03
4	Tapanuli Tengah	318,908	148	2,41
5	Tapanuli Utara	283,871	75	2,15
6	Toba Samosir	174,865	74	1,32
7	Labuhanbatu	424,644	166	3,21
8	Asahan	677,876	184	5,13
9	Simalungun	830,986	190	6,29
10	D a i r i	273,394	142	2,07
11	K a r o	358,823	169	2,72
12	Deli Serdang	1,845,615	742	13,97
13	Langkat	976,885	156	7,39
14	Nias Selatan	294,069	181	2,23
15	Humbang Hasundutan	174,765	76	1,32
16	Pakpak Bharat	41,492	34	0,31
17	Samosir	121,594	50	0,92
18	Serdang Bedagai	604,026	316	4,57
19	Batu Bara	381,023	421	2,88
20	Padang Lawas Utara	229,064	58	1,73
21	Padang Lawas	232,166	60	1,76
22	Labuhanbatu Selatan	284,809	91	2,16
23	Labuhanbatu Utara	335,459	95	2,54
24	Nias Utara	128,533	86	0,97
25	Nias Barat	82,701	152	0,63
26	Sibolga	85,852	7.971	0,65
27	Tanjungbalai	157,175	2.555	1,19
28	Pematangsiantar	236,947	2.963	1,79
29	Tebing Tinggi	147,771	3.844	1,12
30	Medan	2,122,804	8.008	16,06
31	Binjai	250,252	2.773	1,89
32	Padangsidempuan	198,809	1.734	1,50
33	Gunungsitoli	128,337	273	0,97
SUMATERA UTARA		13,215,401	184	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 Data diolah

Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan PDRB

Tabel. 2.6
*Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000*

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011 *)		2012	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	Pertanian	26.300,637	23.83	26.526,925	23.78	28.040,199	23.60	29.390,578	23.22	30.778,670	22.89
2	Pertambangan dan Penggalian	1.304,347	1.23	1.322,983	1.19	1.400,653	1.18	1.494,851	1.18	1.525,316	1.13
3	Industri Pengolahan	24.305,227	22.89	24.977,109	22.39	26.105,212	21.97	26.548,662	20.97	27.513,096	20.46
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	772,943	0.73	816,005	0.73	872,146	0.73	943,754	0.75	976,090	0.73
5	Konstruksi	7.090,648	6.68	7.554,365	6.77	8.066,154	6.79	8.754,627	6.92	9.348,160	6.95
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	19.515,523	18.38	20.575,432	18.44	21.919,338	18.45	23.693,426	18.72	25.406,772	18.89
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9.883,239	9.31	10.630,443	9.53	11.633,899	9.79	12.799,427	10.11	13.856,597	10.31
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7.479,836	7.04	7.939,209	7.12	8.795,146	7.40	9.992,485	7.89	11.111,510	8.26
9	Jasa-jasa	10.519,969	9.91	11.216,753	10.05	11.976,155	10.08	12.969,811	10.25	13.947,739	10.37
	PDRB	106.172,360	100.00	111.559,225	100.00	118.808,903	100.00	126.587,622	100.00	134.463,949	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012(data diolah)

Dari tabel 2.5. diatas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan didominasi oleh pertanian disusul oleh sektor Industri Pengolahan, dan berturut- turut oleh sektor perdagangan, Hotel dan Restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.

Jika melihat dari struktur perekonomian terakhir tahun 2012sebenarnya telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Sumatera Utara dari provinsi berbasis primer (pertanian) menjadi provinsi berbasis Industri, sebab sumbangan sektor industri mencapai 22.07%, disusul Pertanian sebesar 21.58%

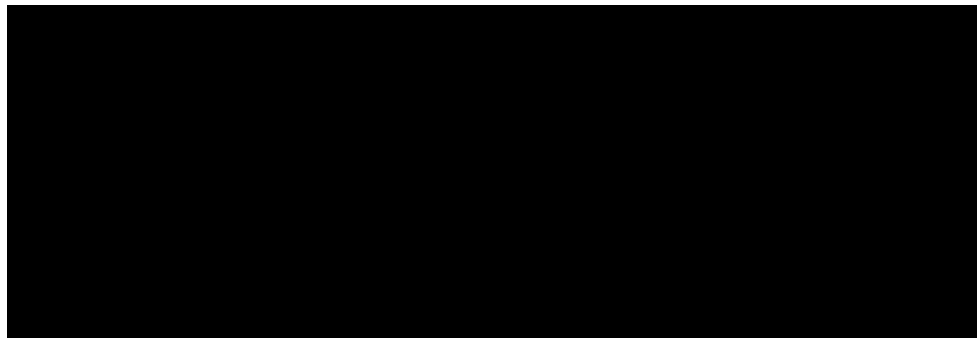
Tabel. 2.7
*Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012
Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Utara*



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)
Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

Sejalan dengan struktur PDRB atas dasar harga konstan, demikian juga hal yang sama tampak dari PDRB atas dasar harga berlaku dimana struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertaniandisusul oleh industri pengolahan dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.

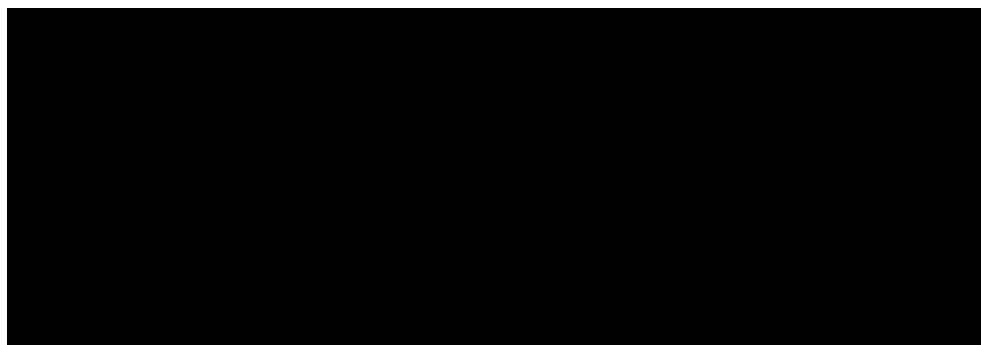
Tabel. 2.8
*Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Provinsi Sumatera Utara*



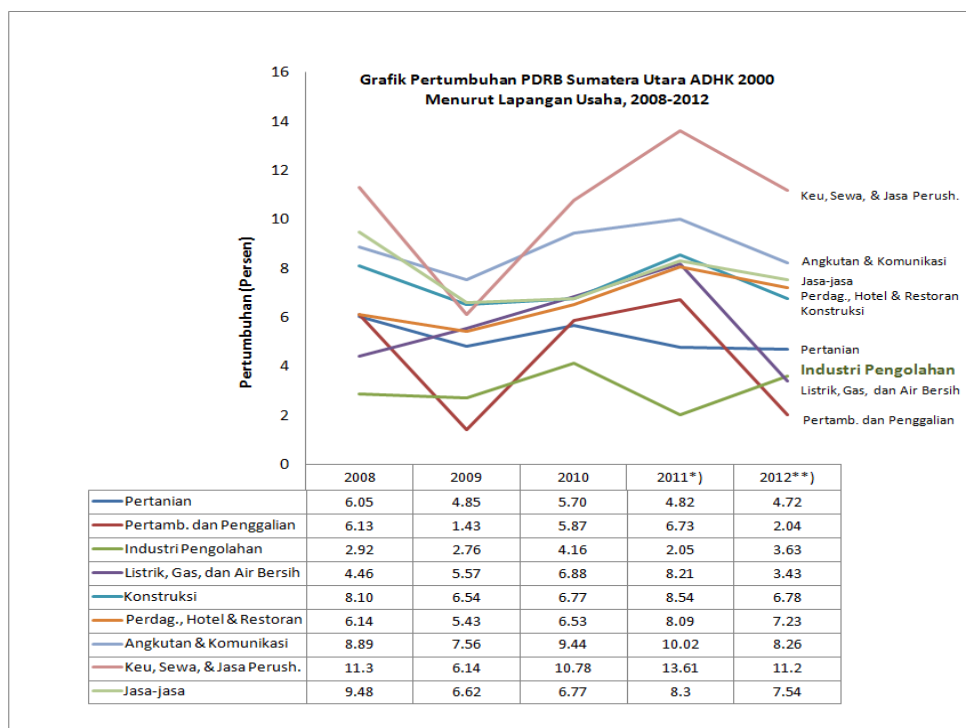
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Dapat digambarkan bahwa perkembangan perhitungan sektoral khususnya dari sumbangan terhadap PDRB terlihat bahwa Sumatera Utara telah mengarah menjadi Provinsi berbasis Industri dan Jasa, karena peran sektor pertanian (primer) semakin kecil dalam memberikan sumbangan bagi PDRB baik dari harga berlaku maupun konstan.

Tabel. 2.9
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
 dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012
 Provinsi Sumatera Utara

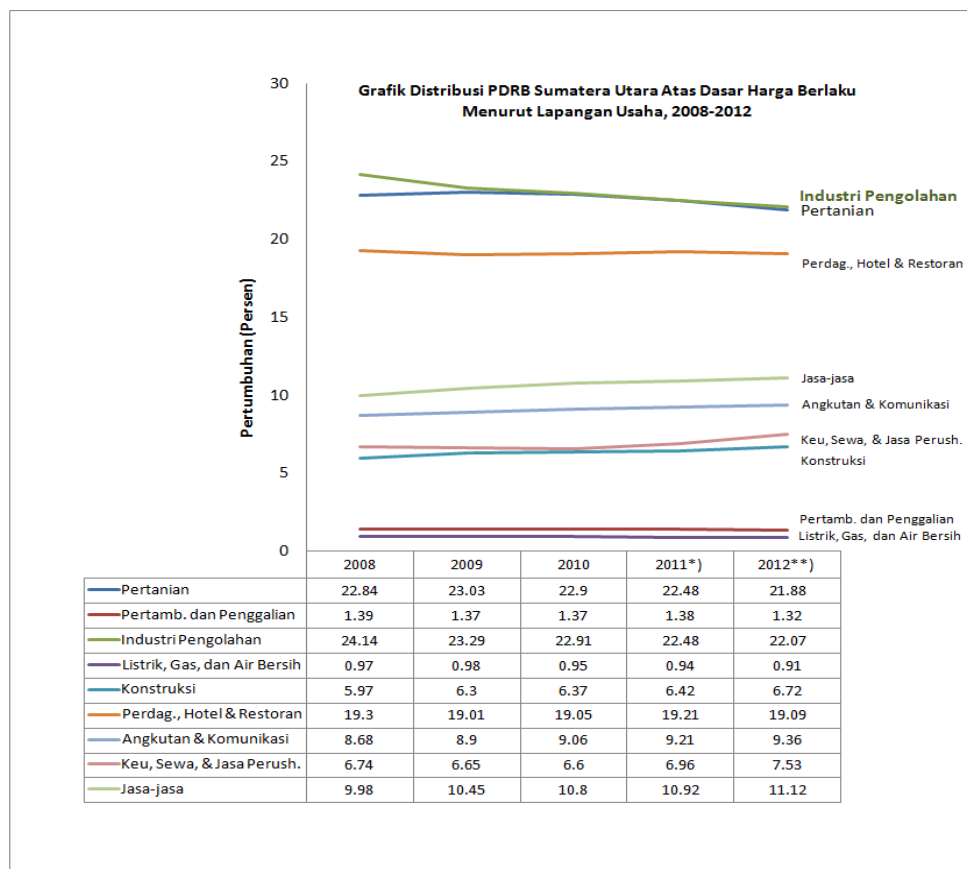


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)



Grafik 2.1. Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012

Dari Grafik 2.1. Pertumbuhan PDRB tahun 2012 terlihat bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan, hanya sektor industri pengolahan yang menunjukkan peningkatan. Sumbangan sektor pertanian telah kalah bersaing dalam menghasilkan nilai tambah ditambah lagi bahwa pada periode tersebut terjadi pelemahan permintaan dunia karena belum berakhirnya krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika yang berdampak pada penurunan ekspor komoditi perkebunan khususnya CPO, ditambah adanya kebijakan bea keluar ekspor mengakibatkan harga CPO dari Indonesia kalah bersaing dengan produk sejenis dari negara penghasil CPO khususnya Malaysia.



Grafik 2.2. Distribusi PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012

Pada Grafik 2.2. Distribusi PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012 terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Namun pada beberapa tahun terakhir trend nya cenderung mengalami penurunan.

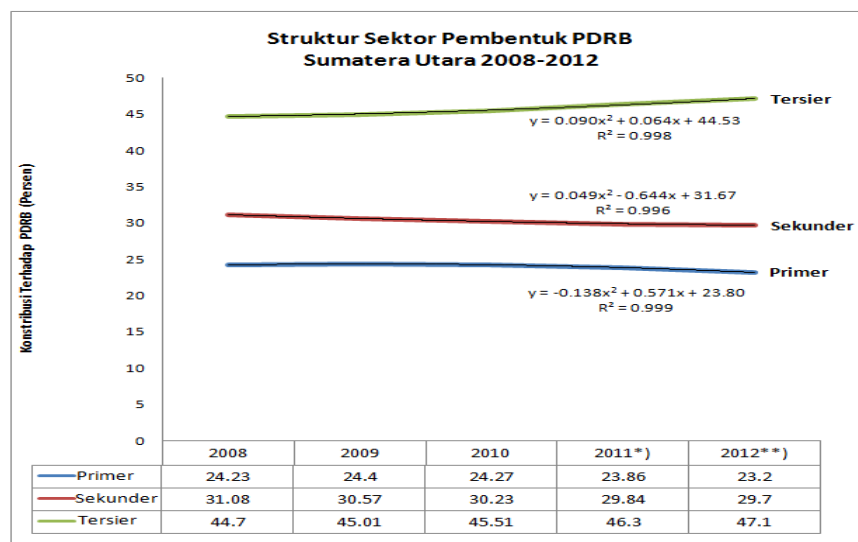
Jika dilihat dari struktur sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2008-2012 terlihat bahwa sektor sekunder telah mulai meninggalkan sektor primer sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB, seperti terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 2.10
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

Sektor	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012*)
Primer	24,23	24,40	24,29	26,70	23,20
Sekunder	31,08	30,57	30,26	35,20	29,70
Tersier	44,69	45,01	45,45	38,10	47,10

Sumber : BPS Tahun 2012 *). Kondisi Triwulan IV 2012

Dari data tabel 2.10 menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Sumatera Utara telah bergerak ke bidang jasa/tersier yang ditunjukkan dari kontribusi dominasi sektor tersier yakni dari tahun 2008 sebesar 44,69% meningkat terus menjadi 47,10% tahun 2012.



Grafik 2.3. Struktur Sektor Pembentuk PDRB Sumatera Utara 2008-2012

Untuk perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan tingkat Kabupaten/Kota dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terlihat bahwa Kota Medan masih merupakan daerah yang memiliki angka PDRB tertinggi di Sumatera Utara dimana tahun 2011 Kota Medan memberikan sumbangan terhadap PDRB Sumatera Utara ADHB sebesar 29,79% dan ADHK sebesar 30,47% %, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang berdasarkan ADHB sebesar 14,35% dan ADHK 12,16. Secara umum memang terlihat sumbangan Pantai Timur Sumatera Utara lebih dari 50% dibandingkan dengan kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Barat, hal ini akibat fasilitas infrastruktur yang memang lebih baik serta sumbangan dari sektor perkebunan dan industri pengolahan yang konsentrasinya masih di kawasan Pantai Timur.

Tabel. 2.11
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun 2008-2011
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2008		2009		2010*		2011**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Kabupaten									
1	Nias	3 666 950,17	1 855 078,73	982 936,29	478 510,07	1 140 430,67	510 793,15	1 299 648,40	545 563,64
2	Mandailing Natal	3 011 620,73	1 794 258,45	3 385 340,64	1 909 486,99	3 717 806,55	2 031 959,60	4 147 418,74	2 162 577,16
3	Taparuli Selatan	2 558 434,15	1 631 791,07	2 761 514,37	1 697 914,58	3 145 180,63	1 783 978,80	3 573 330,15	1 877 662,48
4	Taparuli Tengah	1 805 624,66	1 062 313,66	2 000 273,00	1 128 825,69	2 286 819,87	1 198 513,08	2 550 737,26	1 273 671,43
5	Taparuli Utara	3 126 116,99	1 456 881,25	3 392 626,16	1 529 396,54	3 807 803,55	1 614 372,07	4 157 526,92	1 703 749,59
6	Toba Samosir	2 744 392,07	1 585 967,62	3 056 880,14	1 670 057,01	3 429 765,59	1 761 931,72	3 857 576,34	1 854 522,20
7	Labuhanbatu	16 626 178,12	8 339 473,76	6 658 794,89	3 101 701,08	7 610 690,69	3 261 566,16	8 550 335,46	3 448 176,05
8	Asahan	9 505 603,03	4 905 418,54	10 435 935,63	5 134 419,75	11 931 676,62	5 388 827,77	13 650 238,53	5 679 512,85
9	Simalungun	8 412 298,16	5 049 397,51	9 272 018,38	5 299 691,11	10 360 954,38	5 571 105,01	11 627 583,32	5 894 588,30
10	Dairi	3 116 742,54	1 864 638,17	3 392 997,01	1 962 685,92	3 777 740,16	2 050 671,36	4 226 282,45	2 158 857,52
11	Karo	5 058 679,19	3 019 387,58	5 646 544,39	3 175 599,37	6 676 016,38	3 367 185,28	7 634 993,22	3 589 129,58
12	Delit Serdang	30 116 831,18	12 994 129,55	34 172 480,34	13 698 059,53	39 804 281,26	14 516 728,53	45 125 832,84	15 389 010,15
13	Langkat	13 243 635,27	6 491 754,73	14 789 832,94	6 819 233,67	17 182 292,32	7 210 562,21	19 774 937,48	7 627 545,31
14	Nias Selatan	1 854 542,38	1 136 549,64	2 014 345,67	1 182 897,80	2 248 824,03	1 231 579,09	2 442 561,73	1 286 515,90
15	Humbang Hasundutan	1 983 027,94	906 366,34	2 189 647,13	954 552,73	2 470 988,46	1 006 561,13	2 791 905,61	1 066 358,14
16	Pakpak Bharat	258 923,60	145 915,46	290 299,80	154 420,18	331 841,14	164 878,49	373 192,44	174 743,59
17	Samosir	1 392 382,27	953 951,04	1 519 319,31	1 002 459,21	1 669 603,01	1 058 485,11	1 835 396,67	1 121 617,00
18	Serdang Bedagai	7 472 748,72	4 047 771,19	8 490 357,48	4 287 253,13	9 697 604,00	4 550 679,05	10 905 563,00	4 822 988,27
19	Batu Bara	13 191 957,89	6 774 665,28	14 517 227,58	7 066 220,52	16 590 572,10	7 394 490,94	18 995 088,97	7 772 101,20
20	Padang Lawas Utara	1 271 658,20	675 997,54	1 424 469,11	734 284,74	1 725 247,45	783 781,72	1 957 898,57	837 152,05
21	Padang Lawas	1 214 722,27	692 685,36	1 349 416,26	710 757,21	1 597 823,93	750 290,69	1 850 305,96	798 255,31
22	Labuhanbatu Selatan	x	x	5 472 191,07	2 685 094,52	6 288 954,17	2 835 768,13	7 101 850,26	3 009 512,93
23	Labuhanbatu Utara	x	x	6 284 978,78	2 993 328,33	7 161 088,39	3 163 216,40	8 094 361,06	3 359 752,30
24	Nias Utara	x	x	998 844,03	459 232,61	1 134 251,66	490 124,94	1 293 285,92	523 868,69
25	Nias Barat	x	x	507 060,61	239 040,31	589 400,42	254 099,33	673 152,96	271 274,74
Kota									
26	Sibolga	1 235 092,85	660 274,29	1 361 122,72	697 916,30	1 543 776,70	740 037,16	1 698 286,54	777 479,10
27	Tanjungbalai	2 480 130,42	1 278 149,43	2 765 278,09	1 333 338,36	3 157 493,53	1 396 969,23	3 446 872,54	1 468 327,88
28	Pematangsiantar	3 464 686,68	1 828 230,09	3 746 215,84	1 926 298,65	4 163 437,74	2 038 924,45	4 537 599,60	2 161 591,05
29	Tebing Tinggi	1 823 672,20	1 037 465,11	2 032 995,63	1 099 238,84	2 302 735,71	1 165 579,00	2 608 913,92	1 243 366,55
30	Medan	65 277 871,28	31 373 951,99	72 630 208,14	33 431 051,02	83 315 016,03	35 822 224,73	93 610 757,40	38 576 234,25
31	Binjai	3 819 648,61	1 799 484,85	4 308 943,74	1 905 182,86	4 945 363,42	2 020 896,76	5 701 431,44	2 147 820,19
32	Padangsidempuan	1 744 259,36	835 918,91	1 900 038,86	884 655,59	2 099 893,71	936 051,04	2 304 043,14	992 127,66
33	Gunungsitoli	x	x	1 781 855,41	817 028,52	1 953 919,31	867 225,87	2 351 986,53	924 062,16
Sumatera Utara		213 931 696,78	106 172 360,10	236 353 615,83	111 559 224,81	275 056 507,28	118 718 902,74	314 372 437,46	126 587 621,90

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sementara
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, dimana rata-rata capaian angka inflasi di bawah nilai 2 digit, hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini BI Medan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah telah berjalan dengan baik.

Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.12
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2008-2012
Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
INDONESIA	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30
SUMATERA UTARA	10,72	2,61	8,00	3,67	3,86

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Secara umum laju inflasi Sumatera Utara masih dalam kondisi yang rendah (masih dibawah 2 digit) kecuali pada tahun 2008 yang mencapai 10,72%, hal ini sebagai akibat, kontraksi ekonomi di seluruh dunia, dan bahkan capaiannya selalu dibawah capaian nasional, kecuali tahun 2010 Sumatera Utara capaian tingkat inflasinya diatas nasional, dimana capaian nasional sebesar 6,96%, akan tetapi hal ini akan terus diupayakan untuk menstabilkannya dalam rangka tetap mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.

c. PDRB per Kapita

Tabel. 2.13
PDRB Perkapita Tahun 2008-2012
Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
Nilai PDRB (Rp)	213,931,696. 78	236,353,615. 83	275,700,201	314,372,437	351,118,1 55
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,042,317.0 0	13,248,386.0 0	12,985,075	13.103.596	13,215,40 1
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	16.40	17.84	21.23	23,97	26,56

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sementara
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

Adapun untuk kondisi PDRB/kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, yang merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan global masyarakat Sumatera Utara, pada tahun 2008 PDRB/kapita baru mencapai Rp. 16,40 juta dan pada tahun 2012 telah mencapai Rp. 26,56 juta atau jika dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat dengan kurs Rp. 9.500/dollar, maka PDRB/kapita masyarakat Sumatera Utara telah mencapai angka USD 2.796.

d. Disparitas Pendapatan Masyarakat

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

1) Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen yang mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ke dalam 4 kuadran, diketahui bahwa selama periode tahun 2001-2011 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan adanya perpindahan antar kuadran.

Posisi 33 kabupaten/kota selama periode tahun 2001-2010 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.14
 Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
 Tahun 2001-2010

No	Kabupaten/Kota	Tipologi Klassen									
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sibolga	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
2	Tapanuli Tengah	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Tapanuli Utara	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
4	Toba Samosir	4	3	1	2	1	1	4	1	1	2
5	Samosir	3	3	3	1	2	2	4	4	4	4
6	Humbang Hasundutan	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4
7	Nias	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3
8	Nias Selatan	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
9	Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
10	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
11	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
12	Padangsidempuan	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
13	Mandailing Natal	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
14	Tapanuli Selatan	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4
15	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
16	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3
17	Labuhan Batu	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2
18	Asahan	4	4	3	3	4	4	2	2	2	2
19	Simalungun	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Dairi	3	4	2	1	3	4	4	4	4	4
21	Karo	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
22	Deli Serdang	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1
23	Langkat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Pakpak Barat	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
25	Serdang Bedagai	3	4	4	1	3	3	3	3	1	1
26	Batubara	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
27	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
28	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
29	Tanjung Balai	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
30	Pematangsiantar	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1
31	Tebing Tinggi	2	1	2	1	1	1	3	1	1	3
32	Medan	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Binjai	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara Triwulan-IV 2012, Bank Indonesia, 2012

Posisi suatu kabupaten/kota dalam Tipologi Klassen ini, selain bergantung dari kinerja pembangunan kabupaten/kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan kabupaten/kota lainnya. Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keseluruhan kabupaten/kota di wilayah yang menjadi acuan.

2) Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini/Lorenz Curve, rasionya Moderat yakni sebesar 0,362, yang mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan di Sumatera Utara masih lebih besar bila dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional yang berada diangka 0,33.

3) Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi mengenai daerah-

daerah dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak miskin.

Pembangunan yang telah berjalan di Sumatera Utara berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 1,97 juta atau 15,66 persen pada tahun 2006 turun menjadi 1.42 juta atau 10,83 persen pada tahun 2011.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang ideal sekitar 2 US\$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar tersebut dengan kurs rupiah Rp. 9.500/ 1 US\$ pada tahun 2010 adalah 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah, yaitu berkisar antara 35,29 persen sampai dengan 40,35 persen dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima 24,36%, berartisecara umum ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia adalah rendah.

4) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2000-2010 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2010, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,7148 atau jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sebesar 0,5749. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Tabel 2.15
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2000-2010 menurut Indeks Ketimpangan Williamson

No	Kabupaten/Kota	Williamson Index										rata-rata	
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
1	Sibolga	0.0173	0.0159	0.0152	0.0118	0.0063	0.0106	0.0129	0.0067	0.0113	0.0113	0.0108	0.0118
2	Tapanuli Tengah	0.0564	0.0615	0.0613	0.0651	0.0696	0.0707	0.0719	0.0807	0.0812	0.0815	0.0842	0.0713
3	Tapanuli Utara	0.0880	0.0864	0.0838	0.0132	0.0156	0.0091	0.0092	0.0210	0.0162	0.0189	0.0226	0.0349
4	Tobasa	0.0645	0.0570	0.0567	0.0115	0.0512	0.0333	0.0337	0.0229	0.0282	0.0292	0.0265	0.0377
5	Samosir	-	-	-	-	0.0018	0.0027	0.0011	0.0102	0.0103	0.0101	0.0129	0.0070
6	Humbang Hasundutan	-	-	-	0.0059	0.0050	0.0014	0.0028	0.0129	0.0090	0.0097	0.0123	0.0074
7	Nias	0.1452	0.1460	0.1424	0.0629	0.0691	0.0738	0.0713	0.0785	0.0727	0.1595	0.0464	0.0971
8	Nias Selatan	-	-	-	0.0546	0.0581	0.0590	0.0637	0.0735	0.0738	0.0743	0.0776	0.0668
9	Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0011	0.0039	0.0025
10	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0432	0.0442	0.0437
11	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0440	0.0439	0.0440
12	Padangsidempuan	-	-	-	0.0127	0.0169	0.0198	0.0198	0.0295	0.0282	0.0323	0.0388	0.0248
13	Mandailing Natal	0.0547	0.0536	0.0556	0.0589	0.0678	0.0721	0.0711	0.0780	0.0728	0.0704	0.0730	0.0662
14	Tapanuli Selatan	0.1059	0.0995	0.0975	0.0532	0.0665	0.0847	0.0820	0.1002	0.0363	0.0370	0.0371	0.0727
15	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0721	0.0728	0.0737	0.0729
16	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0696	0.0684	0.0693
17	Labuhan Batu	0.1366	0.1434	0.1373	0.1407	0.1470	0.1406	0.1382	0.1512	0.1461	0.0275	0.0246	0.1212
18	Asahan	0.0583	0.0687	0.0684	0.0727	0.0823	0.0754	0.0731	0.0145	0.0284	0.0258	0.0245	0.0538
19	Simalungun	0.0065	0.0069	0.0008	0.0108	0.0289	0.0326	0.0343	0.0537	0.0513	0.0493	0.0536	0.0299
20	Dairi	0.0079	0.0009	0.0003	0.0130	0.0051	0.0015	0.0021	0.0142	0.0144	0.0155	0.0190	0.0085
21	Karo	0.1005	0.0983	0.0898	0.0779	0.0588	0.0521	0.0426	0.0234	0.0265	0.0258	0.0297	0.0568
22	Deli Serdang	0.0181	0.0016	0.0424	0.0284	0.1246	0.1486	0.1401	0.1240	0.1400	0.1413	0.1410	0.0955
23	Langkat	0.0689	0.0541	0.0350	0.0201	0.0015	0.0073	0.0210	0.0044	0.0201	0.0235	0.0279	0.0258
24	Pakpak Barat	-	-	-	-	0.0188	0.0222	0.0232	0.0267	0.0267	0.0265	0.0275	0.0245
25	Serdang Bedagai	-	-	-	-	0.0053	0.0045	0.0021	0.0179	0.0047	0.0025	0.0027	0.0057
26	Batubara	-	-	-	-	-	-	-	0.2809	0.3024	0.2953	0.2959	0.2936
27	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0915	0.0878	0.0897
28	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0286	0.0288	0.0287
29	Tanjung Balai	0.0511	0.0477	0.0472	0.0460	0.0418	0.0432	0.0424	0.0295	0.0306	0.0305	0.0293	0.0399
30	Pematangsiantar	0.0232	0.0311	0.0320	0.0312	0.0516	0.0382	0.0318	0.0179	0.0214	0.0180	0.0136	0.0282
31	Tebing Tinggi	0.0248	0.0212	0.0194	0.0132	0.0063	0.0059	0.0063	0.0027	0.0000	0.0003	0.0017	0.0093
32	Medan	0.4881	0.5064	0.5078	0.4909	0.4680	0.5800	0.5991	0.5210	0.5867	0.5839	0.5888	0.5383
33	Binjai	0.0206	0.0250	0.0255	0.0276	0.0249	0.0321	0.0373	0.0247	0.0322	0.0344	0.0340	0.0289
SUMUT		0.5749	0.5895	0.5864	0.5439	0.5459	0.6487	0.6627	0.6570	0.7216	0.7254	0.7148	

(-) data masih tergantung dengan daerah induk
Williamson Index Sumatera Utara Bukan merupakan penjumlahan Williamson Index kabupaten/kota

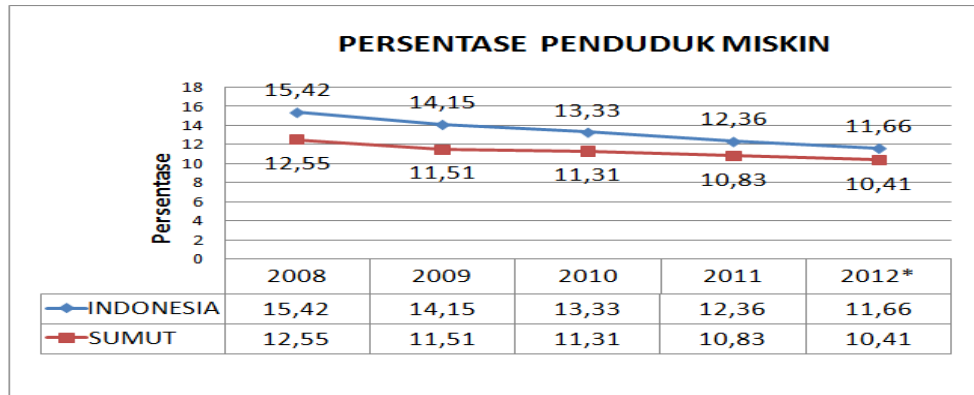
Sumber : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara Triwulan-IV 2012, Bank Indonesia, 2012

Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,5383 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,2936. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kota Gunung Sitoli sebesar 0,0025 dan disusul oleh Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 0,0057

e. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Adapun untuk angka penduduk Sumatera Utara yang berada diatas garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami perbaikan, dimana tahun tahun 2008 sebesar 87,45%, tahun 2009 sebesar 88,47%, tahun 2010 sebesar 86,69%, tahun 2011 sebesar 89,17% dan tahun 2012 menjadi 89,59%.

Secara umum penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.4. Persentase penduduk miskin Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Bidang pendidikan

a. Angka melek huruf

Dari total penduduk Sumatera Utara (diperhitungkan dari Sensus Nasional 2010) dibandingkan jumlah penduduk diperoleh angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2011 sudah mencapai 97,46% dari jumlah penduduk usia tersebut yang berjumlah 7.752.829 jiwa. Hal ini menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak terkait dalam mengurangi angka buta aksara di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia diatas 15 tahun
dari Tahun 2008- 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	8.919.973	9.108.738	9.520.274	7.752.829
2.	Angka melek huruf	97.04%	97.15%	97.32%	97,46%

Sumber : BPS Sumatera Utara, Data Pokok Ekonomi dan Kesra Sumatera Utara 2007-2012
*) Persentase diperkirakan dari jumlah penduduk hasil Sensus Nasional 2010

b. Angka rata-rata lama sekolah

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2008, sebesar 8,60 meningkat menjadi 8,65 tahun pada tahun 2009, dan menjadi 8,85 pada tahun 2010 dan menjadi 8,91 pada tahun 2011.

c. Angka Partisipasi Kasar

Dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 terlihat bahwa APK untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan jumlah penduduk usia 0-6 tahun, di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah (29,58%), dan mengalami peningkatan menjadi 31,27 pada tahun 2011, sehingga masih perlu perhatian yang lebih baik lagi pada tahun mendatang.

Angka Partisipasi Kasar untuk Pendidikan Dasar SD/MI sudah memenuhi target sebesar 110,54, untuk SMP/MTs sebesar 99,25, sedangkan untuk pendidikan menengah (SMA/SMK/MA sebesar 83,76. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

e. Angka Partisipasi Murni

Dari data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara tahun 2011, terlihat bahwa ada kecenderungan terjadinya penurunan jumlah partisipasi siswa dari APM siswa SD (92,43%), SLTP (SMP/MTs) (77,46%) dan SLTA (SMA/MA/MK) 66,04%. Hal ini menunjukkan masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di atasnya (putus sekolah). Hal ini disebabkan masih rendahnya minat dan dorongan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sementara dari data APM siswa SLTA per Kabupaten/Kota terlihat bahwa kabupaten dengan capaian APM tertinggi adalah Karo (95,55%), Pakpak Bharat (95,28%), Tapanuli Utara (94,85%), Nias Selatan (94,02%), Dairi (92,82%) dan Tapanuli Tengah (90,10%). Sedangkan Kabupaten/Kota yang paling rendah capaian APM untuk tingkat SLTA adalah Gunung Sitoli (45,45%), Labuhan Batu Utara (22,34%), Nias Barat (17,62%), Labuhan Batu Selatan (15,08%) dan Nias Utara (13,54%). (Lihat tabel lampiran 6)

Dalam rangka pencapaian sasaran pendidikan di Sumatera Utara yakni Wajib Belajar 12 tahun dan untuk mewujudkan industrialisasi di Provinsi Sumatera Utara diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai atau minimal tamat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

2) Bidang Kesehatan

Capain Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari jumlah kematian/1000 kelahiran hidup menunjukkan masih cukup tingginya rata-rata tingkat kematian bayi yakni sebesar 25,7/1000 kelahiran hidup (SP, 2010). Kabupaten dengan tingkat kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Mandailing Natal (45,7/1000 kelahiran hidup). Kota Medan dengan fasilitas layanan kesehatan yang sudah cukup memadai menunjukkan tingkat kematian bayi paling rendah (14,7/1.000 kelahiran hidup).

b. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 66,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2010. Kabupaten dengan capaian Usia Harapan Hidup tertinggi berada pada Kota Medan (74,4 tahun) diikuti dengan Kota Binjai (73,2 tahun) dan Kabupaten Karo (73,1 tahun). Sementara Kabupaten Mandailing Natal menjadi Kabupaten paling rendah Angka Usia Harapan Hidupnya, yakni hanya sebesar 65,7 tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten setempat dalam meningkatkan derajat layanan kesehatannya.

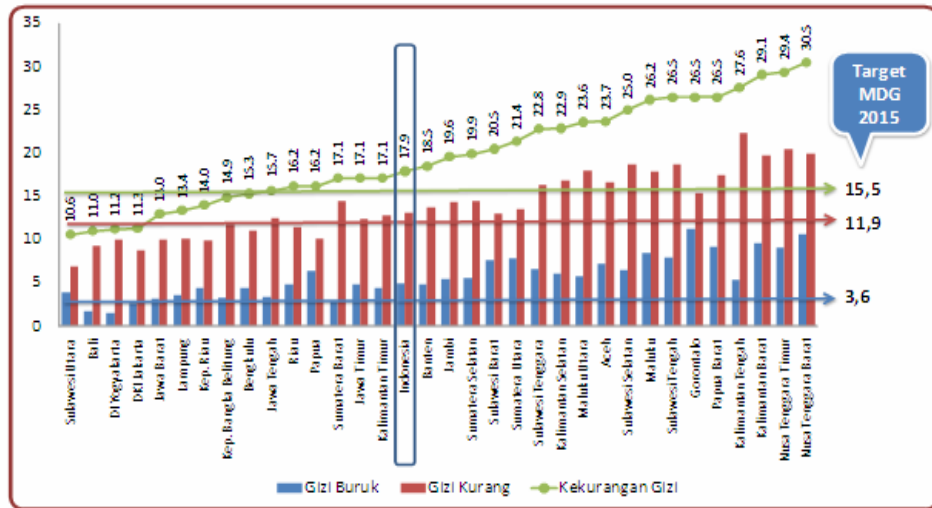
c. Persentase Balita Gizi Buruk

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas, 2009), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong Provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9. Menurut penelitian WHO anak yang memiliki status gizi kurang atau buruk mempunyai resiko kehilangan tingkat kecerdasan atau IQ sebesar 10-15 poin.

Dari data prevalensi rata-rata Balita Gizi Kurang di Sumatera Utara masih termasuk kategori tinggi. Terdapat 2 Kabupaten yang termasuk kepada kriteria Sangat Tinggi (diatas 30%) yakni Nias dan Nias Selatan, 14 termasuk kriteria tinggi (20-29%) dan selebihnya kategori sedang (10-19%). Yang perlu dicermati adalah masih tingginya capaian prevalensi gizi buruk untuk wilayah kota seperti Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi dan Medan.

Grafik dibawah ini memperlihatkan kondisi persentase balita gizi buruk Provinsi Sumatera Utara dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.



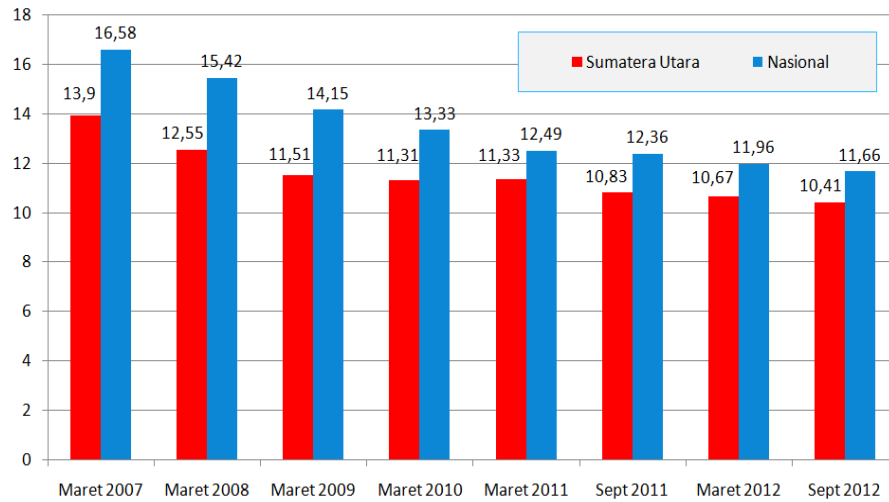
Sumber : Riskesdas, 2010

Gambar 2.5. Grafik Angka Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita per Provinsi di Indonesia

3) Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

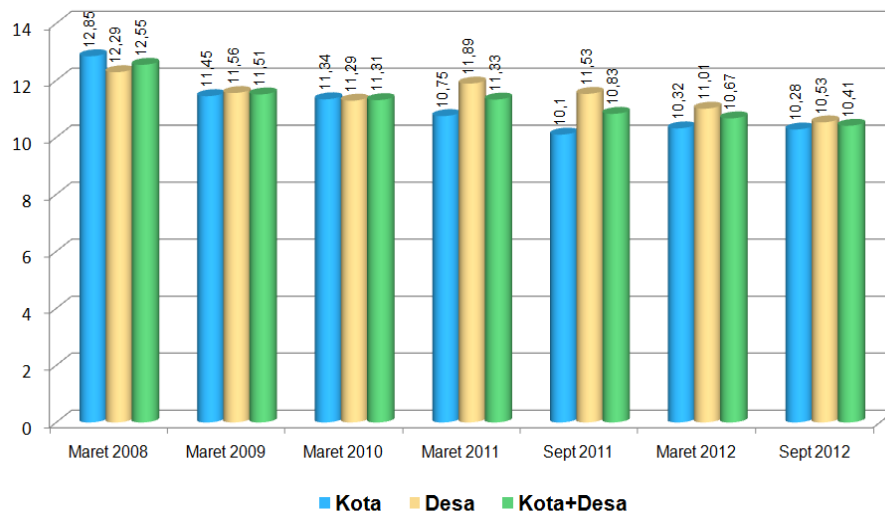
a. Persentase penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2007-2012 terus mengalami penurunan dengan tingkat kinerja lebih baik dibandingkan pencapaian kinerja nasional selama periode yang sama. Sampai dengan tahun 2012 persentase penduduk miskin telah menjadi 10,41%, sementara capaian nasional menunjukkan 11,66%. Grafik 2.6. menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin Sumatera Utara dan Nasiona selama periode 2007-2012.



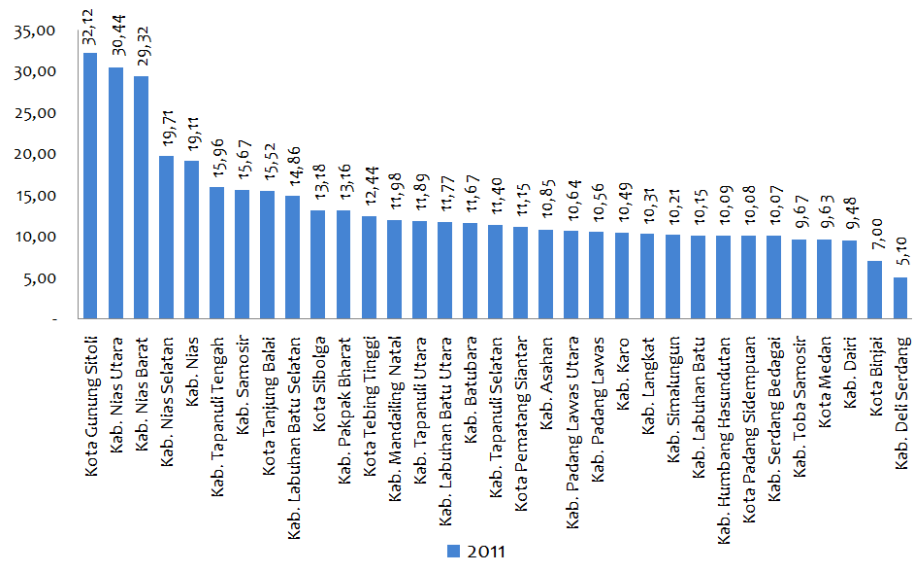
Grafik 2.6. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara dan Nasional
Maret 2007 - September 2012

Sementara itu jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin di perkotaan dibandingkan pedesaan terjadi perubahan dimana persentase penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan.



Grafik 2.7. Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan
Sumatera Utara Maret 2008 - September 2012

Persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar terdapat di wilayah Kepulauan Nias, yakni Kota Gunung Sitoli (32,12%), Nias Utara (30,44%), Nias Barat (29,32%), Nias Selatan (19,71%) dan Kabupaten Nias (19,11) Kabupaten dengan kemiskinan terendah berada pada Kabupaten Deli Serdang (5,10%). Hal ini menunjukkan disparitas yang masih sangat besar antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.



Grafik 2.8. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2012

b. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja dilihat berdasarkan rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2012

Golongan umur	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
	Bekerja	Mencari Pekerjaan		
15-19	461.310	128.173	589.483	0,78
20-24	641.679	111.668	753.347	0,85
25-29	734.162	59.531	793.693	0,92
30-34	817.678	32.888	850.566	0,96
35-39	680.169	10.742	690.911	0,98
40-44	686.261	13.239	699.500	0,98
45-49	551.993	8.374	560.367	0,98
50-54	518.807	11.193	530.000	0,97
55-59	302.495	3533	306.028	0,98
60-64	176.062	641	176.703	0,99
65+	181.066	0	181.066	0
Jumlah	5.751.682	379.982	6.131.664.	.0,93

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

c. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18.
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, 2012

Kasus	2010		2012	
	Kejadian	Tertangani	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	127	88	152	160
Penganiayaan Berat	3.970	2.051	3.892	1.834
Penculikan	12	11	18	7
Pencurian dengan Kekerasan	1.003	436	1.145	397
Pencurian dengan Pemberatan	7.154	2.890	7.198	2.922
Pencurian Ranmor	4.917	333	7.232	636
Pencurian Kawat Telepon	-	-	5	5
Pemeriksaan	247	148	217	103
Pembakaran	112	23	142	69
Senpi/Handak	32	17	29	11
Pemerasan	540	280	619	256
Penyelundupan	18	8	15	15
Jumlah	18.132	6.285	20.659	6.410

Sumber : Polda Sumut, 2012

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari :

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari :

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relatif mahal dan dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

Tabel 2.19.
Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008-2011

Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Angka Buta Huruf				
Usia >15 tahun	2,96	2,85	2,68	3,17
Usia 15-44 tahun	0,81	0,61	0,51	1,66
Usia >45 tahun	7,85	7,80	7,65	6,85
Angka Partisipasi Sekolah (APS)				

Usia <1-12 Tahun)	98,66	98,70	98,90	98,33
Usia <13-15 Tahun)	91,10	91,43	92,26	89,10
Usia <16-18 Tahun)	65,87	66,34	66,94	67,54
Usia <19-24 Tahun)	14,60	14,68	15,65	16,42
Angka Partisipasi Kasar (APK)				
SD/MI/Paket A	112,73	112,89	114,20	104,56
SMP/Mts/Paket B	92,48	89,74	89,83	89,02
SM/SMK/MA/Paket C	69,58	73,36	72,69	79,69
Angka Partisipasi Murni (APM)				
SD/MI/Paket A	94,26	94,46	95,33	91,46
SMP/Mts/Paket B	74,17	74,21	74,76	67,96
SM/SMK/MA/Paket C	55,16	55,30	55,72	57,83
Angka Lama Sekolah	8,6	8,65	8,85	8,91

Sumber : BPS Indonesia

a. Angka partisipasi sekolah (APS)

Secara umum dari data Angka Partisipasi Sekolah pada usia 1-12 tahun (SD dan SLTP) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 terungkap bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) siswa SD/MI sebesar 98,33% dan APS usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebesar 89,10%, yang berarti terjadi penurunan APS dari jenjang sekolah dasar ke sekolah lanjutan pertama. Terjadinya penurunan APS ini perlu untuk dicermati dalam rangka mendukung pencapaian misi Wajib Belajar 12 tahun (siswa dapat menamatkan jenjang pendidikan dari mulai SD sampai SLTA)

b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

Tabel 2.20.
Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2008-2012

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
A.	Jumlah Gedung Sekolah					
1	SD	9,136	8,968	8,050	10,292	8,172
2	SMP	1,530	1,627	1,873	2,230	2,040
3	SMA	911	935	861	950	869
4	SMK	619	692	681	834	678
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	65,729	64,233	48.005	68,268	61,255
2	SMP	14,407	14,781	26.997	17,010	17,807
3	SMA	9,045	8,714	7.745	9,445	9,188
4	SMK	5,362	6,067	5.777	6,639	6,467
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	7.19	7.16	5.96	6.63	7.49
2	SMP	9.42	9.08	14.40	7.62	8.72
3	SMA	9.93	9.32	8.99	9.94	10.57
4	SMK	8.66	8.77	8.48	7.96	9.53

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkatkan SMP, SMA dan SMK selama tahun 2008-2012. Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

c. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

Tabel 2.21.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2008-2012 Provinsi Sumatera Utara

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	92.897	95.397	94.441	102.510	99.927
1.2.	Jumlah Murid	1.920.660	1.939.865	1.959.265	1.287.472	1.656.909
1.3.	Rasio	20%	22%	22%	24%	17%
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	54.161	55.966	34.334	59.002	45.951
2.2.	Jumlah Murid	896.593	936.039	962.689	428.575	569.581
2.3.	Rasio	12	12	12	12	12
3	SMA					
3.1.	Jumlah Guru	17.200	18.358	18.335	22.610	22.183
3.2.	Jumlah Murid	334.833	321.066	398.100	222.200	272.042
3.3.	Rasio	13	13	13	12	12
4	SMK					
4.1.	Jumlah Guru	16.066	17.100	11.726	16.019	18.374
4.2.	Jumlah Murid	310.000	300.500	300.092	220.074	234.983
4.3.	Rasio	11	12	20	30	13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

c. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22.
Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan
Tahun 2008-2012

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD					
	Siswa / Sekolah	200	2.06	2.15	1.99	202
	Siswa / Kelas	28	29	30	32	27
	Siswa / Guru	19	20	18	17	17
	Kelas / Sekolah	7.19	7.16	7.15	6.19	7.49
	Kelas / Guru	0.67	0.69	0.61	0.53	0.61
	Guru / Sekolah	11	10	12	12	12
2	SMP					
	Siswa / Sekolah	3.57	3.49	3.09	2.48	279

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Siswa / Kelas	38	38	36	29	32
	Siswa / Guru	12	12	15	13	12
	Kelas / Sekolah	9.42	9.08	8.59	8.66	8.72
	Kelas / Guru	0.32	0.31	0.41	0.44	0.39
	Guru / Sekolah	30	29	21	19	22
3	SMA					
	Siswa / Sekolah	3.63	3.44	0.43	3.08	3.13
	Siswa / Kelas	37	37	35	34	30
	Siswa / Guru	13	12	12	11	12
	Kelas / Sekolah	9.93	9.32	9.69	9.12	10.57
	Kelas / Guru	0.36	0.33	0.34	0.33	0.41
	Guru / Sekolah	28	28	28	27	26
4	SMK					
	Siswa / Sekolah	3.49	3.56	0.57	3.41	3.46
	Siswa / Kelas	40	41	39	35	36
	Siswa / Guru	11	12	12	13	13
	Kelas / Sekolah	8.66	8.77	9.18	9.78	9.53
	Kelas / Guru	0.27	0.29	0.3	0.37	0.35
	Guru / Sekolah	32	30	30	26	27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

d. Fasilitas pendidikan

Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai.

e. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

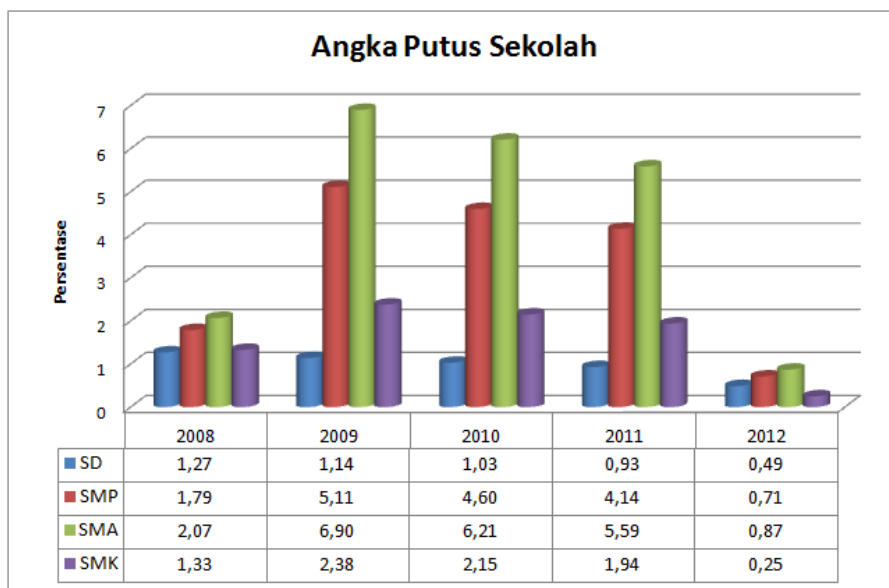
Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2008-2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	4,233	0.25
1	SD	22,801	1.27%	20,868	1.14%	18.782	1.03	16.904	0.93	2,842	0.49
2	SMP	9,190	1.79%	27,962	5.11%	25.166	4.60	22.650	4.14	1,945	0.71
3	SMA	6,547	2.07%	22,812	6.90%	20.531	6.21	1.605	5.59	2,057	0.87
4	SMK	2,562	1.33%	5,150	2.38%	4.635	2.15	725	1.94	4,233	0.25

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan angka persentase anak putus sekolah tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan, tetapi terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2011 persentase anak putus sekolah sudah lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008.

Grafik perkembangan angka putus sekolah tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Gambar. 2.9. Grafik Persentase perkembangan putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2007-2011

f. Angka Kelulusan

Tabel 2.24.
Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2008-2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD	263,040	277,316	205.289	506.881	237.821
2	SMP	149,312	155,731	171.304	172.973	148.873
3	SMA	93,982	96,762	91.717	98.199	75.413
4	SMK	55,330	58,969	60.513	57.987	40.172

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai tingkatan, selama tahun 2008-2012, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

g. Kualifikasi Guru

Tabel 2.25.
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	16,259	22	19,136	24	204.006	65	22.446	71	40.605	192
2	SMP	32,795	248	34,793	580	21.825	148	24.007	162	36.170	358
3	SMA	19,205	188	20,648	517	15.290	364	16.819	400	22.183	736
4	SMK	13,590	60	14,145	63	10.013	90	11.014	99	15.531	739
	Jumlah	81,849	518	88,722	1,184	251.134	667	74.286	732	114.489	2.025

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam lima tahun terakhir (2008-2012) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2.

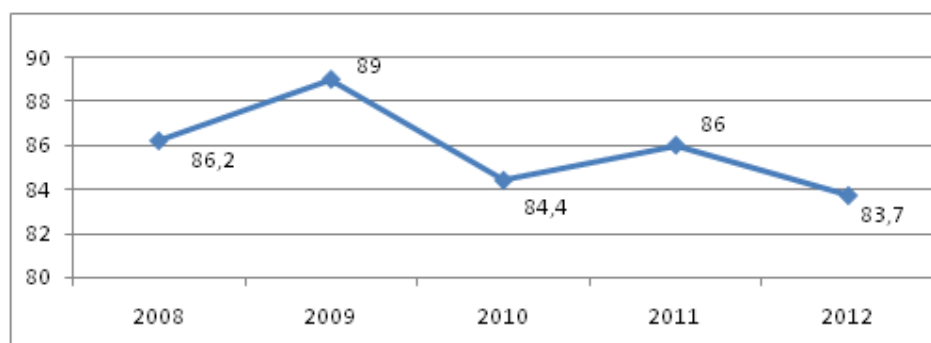
2.1.3.1.2. Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat Provinsi belum ada petunjuk yang menjadi acuan.

Dengan demikian, tidak semua indikator SPM bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjadi indikator dalam Indikator Kinerja bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun indikator SPM yang menjadi indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



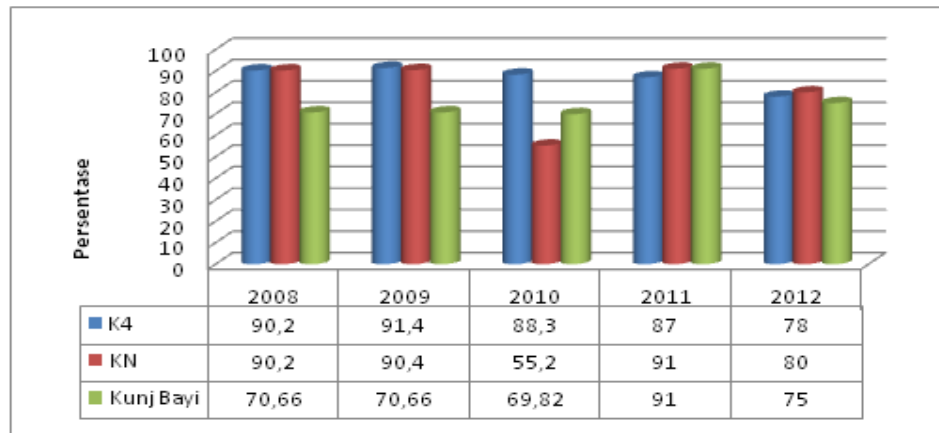
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2008-2012
Grafik 2.10. Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan Tahun 2008-2012

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2008-2012 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2009, cakupan indikator ini mencapai 89% namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 5%. Pada tahun 2011, cakupan persalinan oleh nakes ini mampu ditingkatkan sekitar 1,5%, namun pada tahun 2012 kembali turun menjadi 83,7%, yaitu dari 294.244 sasaran ibu hamil di Sumatera Utara yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 246.393orang atau 83,7%.

Melihat fluktuatifnya pencapaian indikator ini selama kurun waktu 4 tahun terakhir, upaya pemantapan dan penguatan manajemen KIA sangat dibutuhkan ke depan, sehingga target renstra Dinkes Provsu untuk indikator ini yaitu 89% pada tahun 2013 dan target Renstra Kepmenkes yaitu 90% pada tahun 2014 dapat dicapai.

2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Dibandingkan tahun 2011, pencapaian cakupan antenatal care 4 kali ibu (K4), KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami penurunan pada tahun 2012. Penurunan tertinggi terjadi pada indikator kunjungan bayi dimana turun hampir 20%, perkembangan persentase antenatal care (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik 4 berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2008-2012
 Grafik 2.11. Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus(KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2008 - 2012

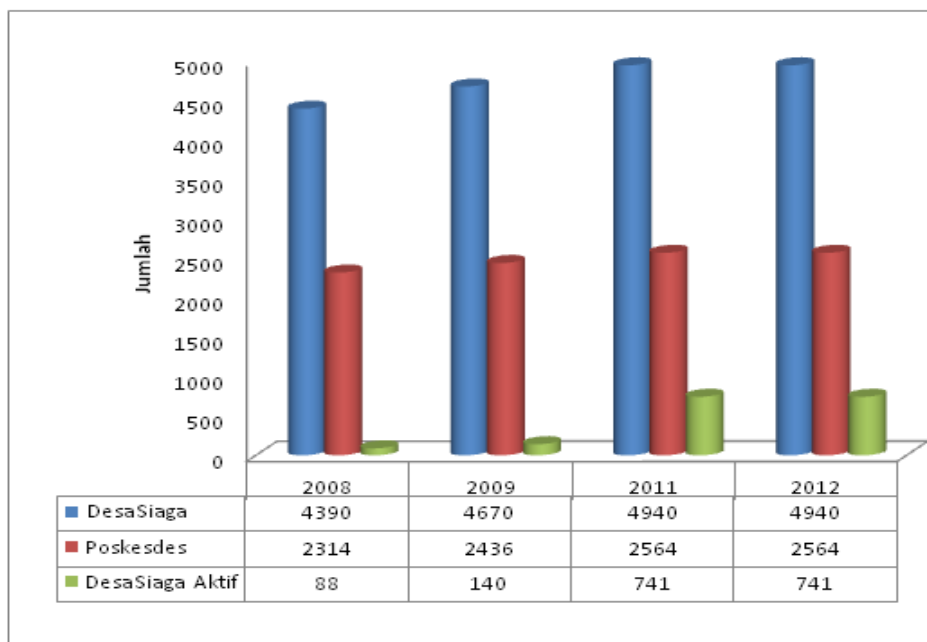
Selama kurun waktu 2008-2012, cakupan K4 ibu hamil menunjukkan trend penurunan yaitu turun sekitar 12% dari 90,2% pada tahun 2008 menjadi 78% pada tahun 2012. Cakupan KN lengkap turun sekitar 10% yaitu dari 90,2% tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2012, dilain pihak kunjungan bayi pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2010, namun kembali turun secara drastis juga sehingga hanya mencapai 75% di tahun 2012.

Pada tahun 2012, dari 308.272 sasaran ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4) adalah sebanyak 243.240 ibu hamil (78%). Untuk pelayanan neonatal, dari 281.973 sasaran bayi sebanyak 225.105 bayi (80%) mendapatkan pelayanan neonatal lengkap (KN3) dan melakukan kunjungan bayi yaitu yang mendapatkan pemeriksaan minimal 4x selama setahun adalah sebanyak 212.441 bayi (75%). Dan dari 281.973 bayi yang lahir hidup terdapat sebanyak 533 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau 0,19%. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus BBLR pada tahun 2011 yaitu 743 bayi dan tahun 2010 yaitu 773 bayi, maka terjadi penurunan di tahun 2012.

3. Cakupan desa siaga aktif

Jumlah Desa Siaga, poskesdes dan Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan kurun waktu 2009-2011. Namun penambahan Desa Siaga tidak diikuti dengan pembangunan poskesdes, sehingga jumlah Desa Siaga yang ada lebih banyak dari jumlah poskesdes, seharusnya setiap Desa Siaga memiliki Poskesdes.

Pada tahun 2009-2010, Desa Siaga bertambah sebanyak 280 unit namun poskesdes hanya bertambah 122 unit. Pada tahun 2011, Desa Siaga bertambah 270 unit namun penambahan poskesdes hanya 128 unit. Kesenjangan dalam pembentukan Desa Siaga dan pembangunan poskesdes menyebabkan persentase Desa Siaga dengan poskesdes menurun dari 55% pada tahun 2010 menjadi 52% pada tahun 2011. Di lain pihak, persentase Desa Siaga aktif meningkat secara tajam, yaitu dari 3% pada tahun 2010 menjadi 15% pada tahun 2011. Untuk tahun 2012, angka pencapaian masih menggunakan angka pada tahun 2011.



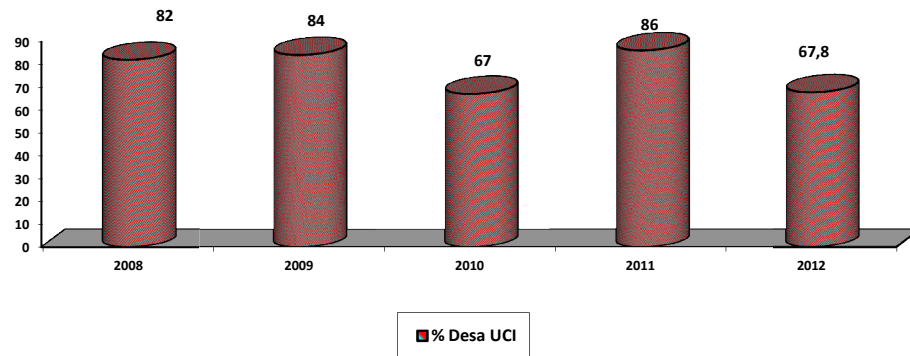
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2.12. Jumlah Desa Siaga, Poskesdes dan Desa Siaga Aktif
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2012, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 746 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 375 kasus.

5. Desa/kelurahan Universal Child Immunization

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005-2007, persentase desa UCI berada dibawah angka 80%.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011
 Grafik 2.13. Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara
 Tahun 2008-2012

Pada tahun 2008-2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%, namun kembali mengalami penurunan hampir 20% sehingga hanya mencapai 67,8% pada tahun 2012. Pencapaian ini tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80% pada tahun 2012. Fluktuatifnya pencapaian desa UCI ini menunjukkan masih belum mantapnya dalam manajemen program imunisasi di kabupaten/kota dan puskesmas, sehingga desa-desa UCI pada tahun sebelumnya tidak mampu dipertahankan untuk tahun depan. Perlu adanya penguatan manajemen program imunisasi sampai ke tempat pelayanan terkecil, sehingga mampu mencegah KLB PD3I di Sumatera Utara.

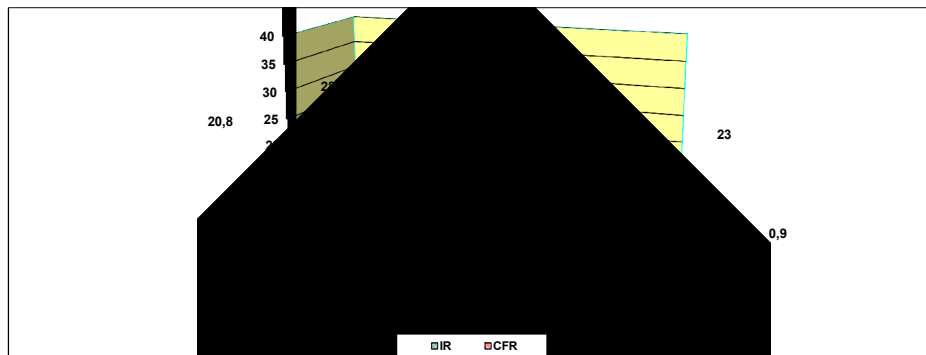
6. Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2011, terjadi 36 kasus KLB dan 31 kasus diantaranya (85%) dilakukan Penyelidikan epidemiologi <24 jam. Pencapaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 85%, namun bila dibandingkan dengan tahun 2010, mengalami penurunan sebesar 5% dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan epidemiologi <24 jam di wilayah KLB umumnya telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kab/kota yang masih terlambat dalam melaporkan kejadian KLB sehingga penyelidikan epidemiologi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah KLB terjadi.

Disamping indikator SPM bidang kesehatan, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kesehatan dalam mencapai indikator kinerja kunci (IKK), selain yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Angka Kesakitan (IR) DBD di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan kurun waktu 2008-2010. Peningkatan IR DBD begitu tajam sekitar 9% setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IR mencapai diatas 35% dengan jumlah penderita yang ditemukan sebanyak 8.889 orang. Pada tahun 2011, IR DBD turun secara drastis menjadi 16,2% dengan jumlah penderita sebanyak 5.545 orang. Namun, bila dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu tahun 2011 yaitu 35/100.000 penduduk, maka hasil capaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan, dan bila dibandingkan dengan target IR DBD Nasional yaitu <5/100.000 penduduk maka angka kesakitan DBD di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi.

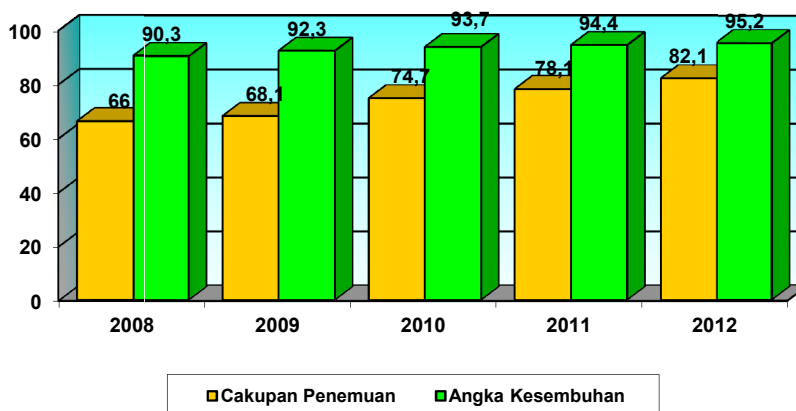


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2012
 Grafik 2.14. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012

Di sisi lain angka CFR (Case Fatality Rate) DBD menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2008, dan pencapaian tertinggi pada tahun 2010 yaitu 1,7%. Pada tahun 2012, pencapaian CFR DBD sudah mampu diturunkan menjadi 0,9% dan mampu mencapai target nasional yaitu <1%. Ini menunjukkan kecepatan dan penanganan kasus penderita DBD sudah mampu ditingkatkan.

2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2012
 Grafik 2.15 Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008–2012

Pada tahun 2012, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 17.776 kasus atau 82,1% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.664 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Pencapaian tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu 78,1% dan tahun 2010 yaitu 74,7%.

Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2012. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2011, adalah sebagai berikut :

- Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap : 66,59 %
- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) : 41,30 %
- Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi layanan optimal : 44.729 Ha atau 50,39 % dari luas total 88,773 Ha
- Rasio Elektrifikasi Desa 83,63%
- Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 86,45 %
- Cakupan pelayanan air minum 80%

2.1.3.1.4. Penataan Ruang

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dimana disebutkan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2012 telah dibuat Sistem Informasi Pusat Data Geospasial.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang dalam tahap revisi mengikuti Undang-Undang Penataan Ruang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menunggu Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan untuk kepentingan peruntukan pola ruang di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara untuk Kabupaten/Kota, saat ini 33 Kabupaten/Kota telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan seluruhnya telah dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Dari 33 Kabupaten/Kota tersebut, 7 (tujuh) Ranperda RTRW dan 1 (satu) Ranperda tentang RDTR telah dievaluasi oleh Gubernur dan 2 (dua) Ranperda RTRW telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Kota Medan (Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011 – 2031) dan Kabupaten Simalungun (Perda Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Simalungun Tahun 2012 – 2032).

2.1.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 - 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) nProvinsi Sumatera Utara Tahun 2011 - 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengendalian Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020.

2.1.3.1.7. Perhubungan

Capaian Indikator bidang perhubungan antara lain adalah :

- Jumlah Pelabuhan Laut : 8 Pelabuhan
- Bandar Udara : 9 Bandara
- Terminal Bis : 40 buah
- Angkutan darat : 2.896.912 unit (tahun 2010)

2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari jumlah rumah tangga menurut lokasi tempat tinggal, akses terhadap sumber air bersih/air minum, serta akses terhadap sanitasi layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Jumlah Rumah Tangga menurut lokasi tempat tinggal

Tabel 2.26.
Jumlah Rumah Tangga menurut Lokasi dan Tipikal Tempat Tinggal
Provinsi : Sumatera Utara, tahun 2010

No.	Lokasi Permukiman	Jumlah Rumah Tangga
		2010
1	Mewah	70,877
2	Menengah	1,994,137
3	Sederhana	1,748,940
4	Kumuh	58,905
5	Bantaran Sungai	243,408
6	Pasang Surut	350,328

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2012

Dari data diatas dapat dilihat kondisi perumahan yang sangat beragam, mulai dari kondisi yang baik berupa perumahan mewah, menengah dan sederhana, hingga

perumahan yang masih dalam kondisi kumuh dan sebagian masih berada di bantaran sungai dan area pasang surut. Kondisi ini menuntut penanganan lingkungan yang lebih baik dimasa depan.

b. Cakupan Terhadap Layanan Air Bersih

Kondisi penyediaan fasilitas air bersih bagi penduduk Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.27.
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

No.	Sumber Air	Jumlah Rumah Tangga
1.	Ledeng	470,674
2.	Sumur	1,725,188
3.	Sungai	95,756
4.	Hujan	74,633
5.	Kemasan	708,441
6.	Lainnya	11,477

Keterangan : BPS Sumatera Utara, 2012

Berdasarkan pengamatan pada beberapa titik lokasi di Kota Medan menunjukkan kualitas air sungai Deli sudah mengalami penurunan (termasuk Kelas Air II), kecuali yang masih berada di daerah hulu (Deli Serdang), sedangkan kualitas air sungai Belawan masih tergolong baik (Kelas air I) terutama yang berada di daerah hulu dan tengah.

c. Cakupan terhadap Layanan Sanitasi Dasar

Tabel 2.28.
Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sanitasi Dasar Sehat
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Tempat buang air besar	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
Total Rumah Tangga	2,314,665	229,267	109,199	430,066

Sumber : Status Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2012, BLH Provinsi Sumatera Utara

d. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 19 dokumen dalam bentuk KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL, UKL-UPL dan DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

e. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 26(dua puluh enam) kasus pengaduan. 7 (tujuh) pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

2.1.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian indikator pemberdayaan perempuan memperlihatkan terjadinya penurunan rasio kasus kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2007 hingga 2011. Sementara persentase partisipasi tenaga kerja perempuan sebesar 57%.

2.1.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 ada tahun 2008,

namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Disamping itu terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I

2.1.3.1.11. Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

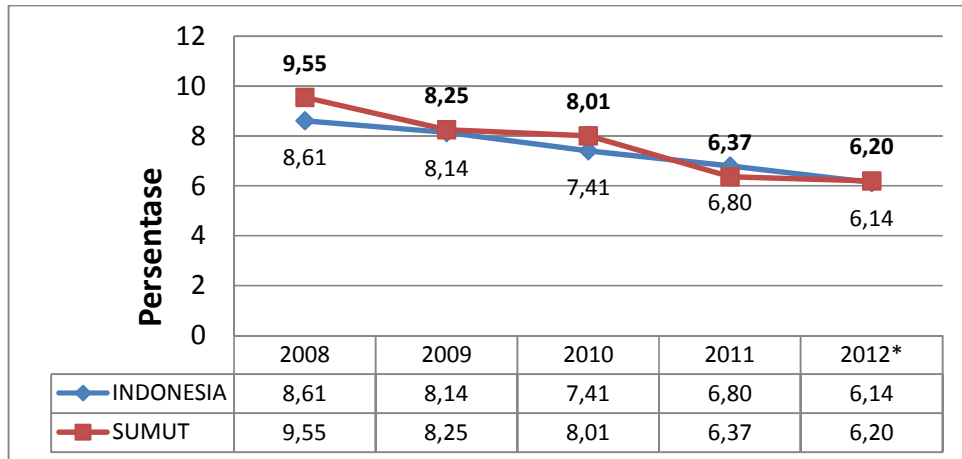
Tabel 2.29.
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

No	Jenis PMKS
1	Balita terlantar
2	Anak terlantar
3	Anak nakal
4	Anak jalanan
5	Anak jermal
6	Wanita rawan sosial ekonomi
7	Korban tindak kekerasan
8	Lanjut usia terlantar
9	Penyandang cacat
10	Tuna susila
11	Pengemis
12	Gelandangan
13	Bekas narapidana
14	Korban penyalahgunaan napza
15	Keluarga fakir miskin
16	Keluarga rumah tidak layak huni
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis
18	Komunitas adat terpencil
19	Korban bencana alam
20	Korban bencana sosial / pengungsi
21	Pekerja migran bermasalah sosial
22	Orang dengan hiv aids (odha)
23	Keluarga rentan

2.1.3.1.12. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, namun jumlah angka pengangguran masih cukup besar. Dari jumlah angkatan kerja Tahun 2012 (periode Agustus) sebesar 6.131.700 jiwa, sebanyak 380,000 orang (6,20%) merupakan Pengangguran Terbuka. Mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang masih sebesar 402,100 orang (6,37%)

Namun demikian jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2012 sebesar 69,41%, mengalami penurunan pada periode yang sama sebesar 72,09%.



Sumber : BPS, data diolah 2012

Grafik 2.16 Tingkat Penangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2008-2012

2.1.3.1.13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara sampai Desember 2012 berjumlah 11.206 dengan 6.706 diantaranya adalah koperasi aktif dan 4.500 buah koperasi yang tidak aktif. Ratio Koperasi aktif sampai dengan tahun 2012 sebesar 59.84%.

Kabupaten yang tertinggi Ratio Koperasi aktif yakni Kabupaten Nias Utara sebesar 100%. Dan yang terendah adalah Kabupaten Toba Samosir sebesar 22.76%. (Lampiran 11 dan Lampiran 12)

Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdapat sejumlah 191 unit KSP dengan jumlah anggota 126.799 orang dan nasabah berjumlah 129.036 nasabah, dengan total asset berjumlah ± Rp. 516 milyar dan jumlah pinjaman sebesar ± Rp.479 milyar (Lampiran 13)

Selain Koperasi Simpan Pinjam, juga terdapat koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdasarkan Kabupaten/Kota sampai bulan Desember 2012 sebanyak 100 unit KJKS dengan jumlah anggota sebanyak 47.927 orang .

Unit Simpan Pinjam (USP) sampai dengan tahun 2012, berjumlah 3.910 unit dengan jumlah anggota 661.758 orang dan nasabah berjumlah 610.499 nasabah. Total asset yang dikelola sejumlah Rp. 1.031 Milyar dengan jumlah pinjaman ± Rp. 973 Milyar. (Lampiran 15).

Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara terdapat Usaha Mikro sebesar 1.453.063 unit dan Usaha Kecil 698.666 unit. Sementara perusahaan menengah berjumlah 136.574 unit dengan jumlah penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 625.954 orang (Lampiran 17).

Selain itu terdapat 95 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota.

2.1.3.1.14. Penanaman Modal Daerah

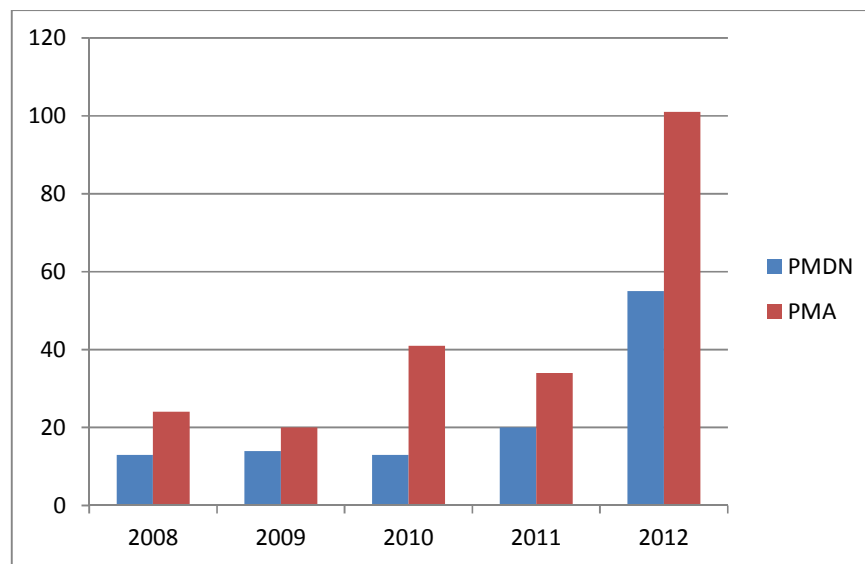
- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	Jumlah Investor	13	24	37
2009	Jumlah Investor	14	20	34
2010	Jumlah Investor	13	9	22
2011	Jumlah Investor	20	34	54
2012	Jumlah Investor	55	101	156
J U M L A H		115	220	335

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provsu



Gambar 2.17. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012
Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN pada tahun 2012 memang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 175 %, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan sebesar 335 %.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

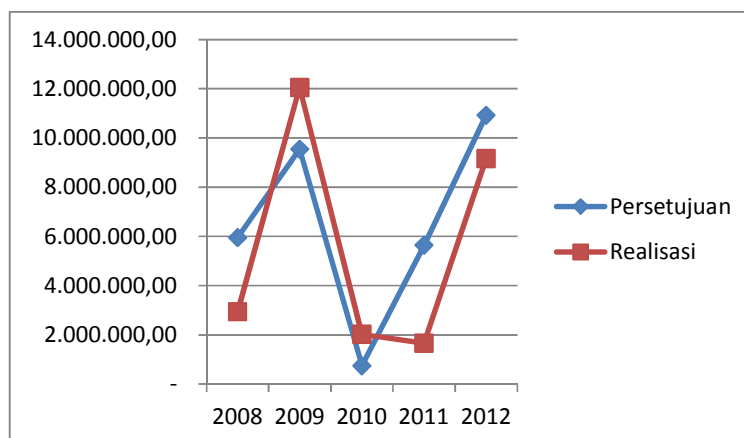
Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.31.
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012

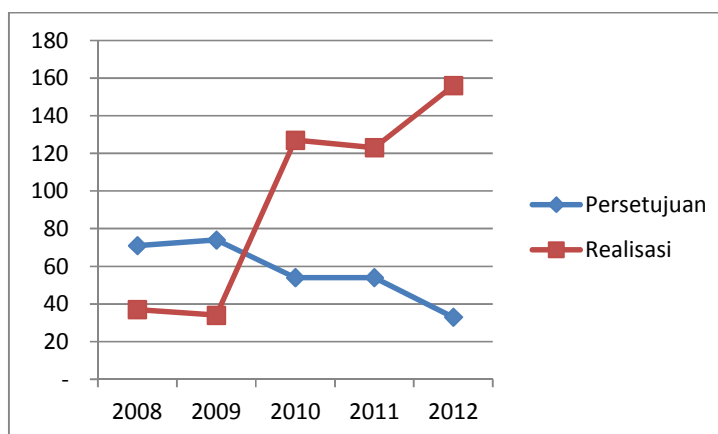
Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2008	71	5.950.695,75	37	2.943.093,92
2009	74	9.546.173,77	34	12.047.929,86
2010	54	747.349,91	127	2.024.885,56
2011	54	5.644.561,01	123	1.662.522,50
2012	33	10.921.354,71	156	9.163.446,19
Total	286	32.810.135,15	477	27.841.878,03

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan nilai investasi yang disetujui dan yang direalisasikan.



Gambar 2.18. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012
Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.19. Grafik Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012
Provinsi Sumatera Utara

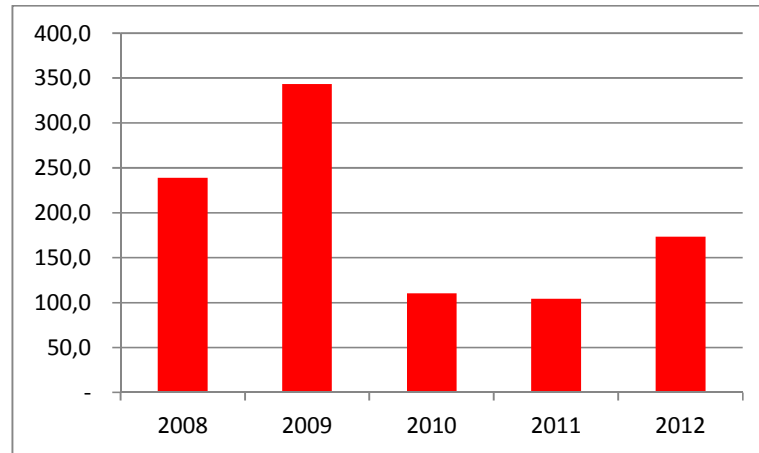
b. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA)
Tahun 2008 - 2012 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	8.839	11.672	13.995	12.826	27.092
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	37	34	127	123	156
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	238,9	343,3	110,2	104,3	173.7

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Gambar 2.20. Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA selama 2008-2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2011 dan 2010, namu bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, rasio daya serap tenaga kerja masih terlihat menurun. Hal ini menggambarkan bahwa investasi pada sektor riil mengalami peningkatan walaupun penggunaan teknologi masih mendominasi investasi hal ini mengakibatkan orientasi penyediaan lapangan kerja adalah padat modal bukan padat karya.

2.1.3.1.15. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik, hal ini dapat dilihat dari suku/ etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku /etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Phakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh. Untuk melestarikan keragaman budaya serta menjaga kerukunan antar suku/etnis, diselenggarakan berbagai macam festival seni budaya, antara lain yaitu :

- Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali.
- Pesta Danau Toba. Diselenggarakan setahun sekali di Kota Parapat.
- Festival Mejuah-juah . Diselenggarakan setahun sekali.
- SUMUT Gempar. Diselenggarakan rutin setahun sekali dan telah memperoleh rekor MURI.
- Pameran Warisan Budaya Islam.
- Festival Budaya Melayu.
- Pawai Budaya Hut RI.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.

Sarana dan Prasarana adalah salah satu hal penting dalam pengembangan maupun pelestarian seni dan budaya. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa gedung (sarana) untuk penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya, yaitu : Tapian Daya PRSU sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera, Museum Taman Budaya dan Museum Negeri.

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Selain memiliki kawasan wisata alam yg memukau, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda, Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :

- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Istana Maimun di Kota medan.
- Masjid Raya Medan.
- Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias.
- Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.3.1.16. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman.

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Menyangkut regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G).
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2.33.
Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, Daging, Susu Dan Telur)

No.	URAIAN	Tahun				
		Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012*	Pencapaian Target (%)
1.	Beras					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	132,79	134,00	132,12	136,60	97,22
	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.782.837	1.755.881,86	1.795.953	1.805.223,76	100,52
	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi* (Ton)	2.111.039	2.043.070,73	2.159.846	2.104.299,93	97,43

2.	Jagung					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,492	1,08	61,615
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	825.609	829.417	837.534	873.503	104,30
	Produksi Jagung (Ton)	1.020.149	1.294.645	1.055.063	1.347.124	127,68
3.	Kedele					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	4,447	3,7	4,452
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.710	59.993	60.512	4.730	7,82
	Produksi Kedele(Ton)	40.337	11.426	17.262	5.413	31,39
4.	Daging Sapi					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	0,99	1,04
	Kebutuhan Konsumsi per-tahun (Ton)	137.262	14.172	13.262
	Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	13.838	131.035,01	15.174	13.838

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2012

3. Kondisi Rawan Pangan

Kondisi sangat rawan pangan diukur dari konsumsi energi <1.400 Kkal/hari. Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih menghadapi kondisi rawan pangan. Dari data Susenas tahun 2009, diketahui bahwa angka proporsi penduduk sangat rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,48% atau masih berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 14,47%.

2.1.3.1.17. Perpustakaan dan Kearsipan

a. Jumlah perpustakaan

Berikut ini adalah Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34.
Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara
Jumlah Perpustakaan yang telah dibina (Mendapat Bantuan)

No	Jenis Perpustakaan	Data BPS 2008-2010	s.d 2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	Kabupaten/Kota	33 Kab/Kota	-	-	-	33	-	33
2	Kecamatan	417 Kecamatan	-	-	10	30	10	50
3	Desa/Kelurahan	5.744 Desa/Kel	378	177	342	192	100	1189
4	PAUD/TK	-	-	-	-	-	10	10
5	SD	7.427 SD	-	-	-	-	20	20
6	SMP	1.888 SMP	-	-	-	20	14	34
7	SMU	912 SMU	-	-	-	20	14	34

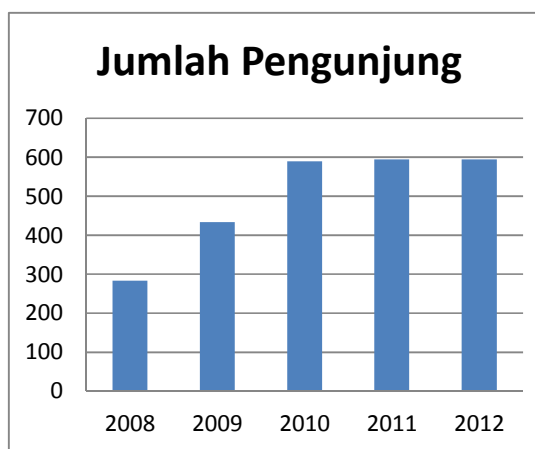
8	SMK	479 SMK	-	-	-	-	20	20
9	Pondok Pesantren	-	-	-	10	10	10	30
10	Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta)	240 PT	8	6	6	6	6	32
11	Masjid	9.011 Masjid	-	-	10	10	10	30
12	Gereja	11.328 Gereja	-	-	10	10	10	30
13	Masyarakat/TBM	-	-	20	29	35	10	94
14	RSUD	44 RSUD	-	-	10	10	-	20
15	Puskesmas	526 Puskesmas	-	-	10	-	10	20
16	Khusus/Instansi	-	-	-	10	30	8	48
17	Lembaga Pemasarakatan	33 Lapas	-	1	1	5	8	15
18	Panti Sosial	-	-	-	-	12	-	12

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2012

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berikut ini adalah grafik tingkat kunjungan Pemustaka tiap tahunnya ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tahun	Jumlah
2008	283.505
2009	433.812
2010	589.553
2011	593.834
2012	594.443



Gambar 2.21. Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun (dalam ribuan)

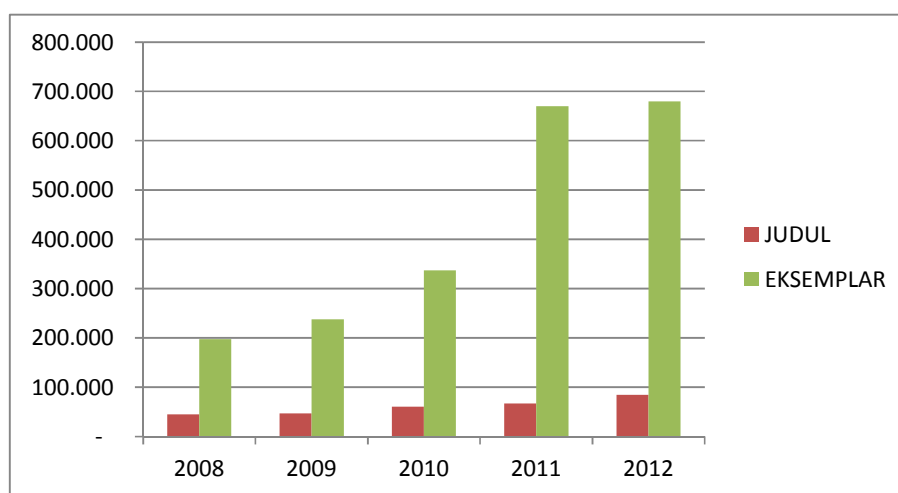
c. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.35.
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR
2008	44.936	193.587
2009	46.433	201.067
2010	59.855	326.170
2011	67.084	652.780
2012	84.419	679.289

Grafik perkembangan jumlah dan Judul Buku dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.22. Grafik perkembangan jumlah dan judul buku

d. Kearsipan

Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan Arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip Daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dan statis.

Proses/ sistem pengelolaan arsip secara baku di Bidang Arsip Daerah :

1. Mengumpulkan/ menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprovsu.
2. Melakukan pemilahan arsip.
3. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
4. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
5. Melakukan penomoran arsip.
6. Membungkus arsip.
7. Membuat DPAS.
8. Menyimpan arsip ke dalam boks.
9. Memberikan nomor boks arsip.
10. Menyimpan boks arsip ke dalam Roll O'Pack.
11. Memasukkan data arsip statis ke dalam jaringan.

Tabel 2.36.
Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Arsip Statis

No.	Masalah	Tahun					
		2010		2011		2012	
		Arsip	Boks	Arsip	Boks	Arsip	Boks
1.	Biro Otonomi Daerah	16	3	-	-	-	-
2.	Biro Organisasi dan Tata Laksana	6	2	-	-	-	-
3.	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	25	2	-	-	-	-
4.	Dinas PU Jalan dan Jembatan	169	15	140	35	19	4
5.	K P U	25	2	50	15	20	5
6.	Biro Umum Sekda Provsu	-	-	7	1	-	-
7.	Kab. Nias Selatan	19	3	-	-	-	-
8.	Kab. Pakpak Bharat	66	4	-	-	-	-
9.	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	1	1	-	-
10.	Kab. Batu Bara	-	-	134	33	-	-
11.	Kab. Serdang Bedagai	-	-	-	-	1	1
12.	Kab. Asahan	-	-	-	-	1	1
13.	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	1	1
14.	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	1	1
15.	Biro Perlengkapan	-	-	-	-	76	3
16.	Dinas Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	4	2
17.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu	-	-	-	-	1	1
Jumlah		326	31	332	85	124	19

Arsip In Aktif

No.	Masalah	Tahun					
		2010		2011		2012	
		Arsip	Boks	Arsip	Boks	Arsip	Boks
1.	Dinas PU Jalan dan Jembatan	1.815	258	2.984	457	295	59
2.	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	1.980	400	450	100
3.	KPU	-	-	-	-	2092	496
Jumlah		1.815	258	4.964	857	2837	655

2.1.3.1.18. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Utara yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah :

- Telah terbangunnya sistem jaringan informasi melalui LAN (Local Area Network), FO (Fiber Optic), RADIO LINK, WIRELESS, VPN-IP (Intranet).
- Terdapat 5 Surat Kabar Harian (SKH) Nasional ada yang tercatat/terpantau, yaitu : 1. Kompas, 2. Tempo, 3. Sindo, 4. Republika dan 5. Koran Jakarta.
- Surat Kabar Harian (SKH) lokal yang tercatat/terpantau ada 34 SKH yaitu : 1. Analisa 2. Andalas 3. Berita Sore 4. Harian Bersama 5. Warta Garuda 6. Harian Global

7. Harian Mandiri 8. Medan Bisnis 9. Medan Pos 10. Mimbar Umum 11. Perjuangan 12. Portibi 13. Posmetro Medan 14. Realitas 15. Sinar Indonesia Baru (SIB) 16. Suara Rakyat Medan 17. Sumatera 18. Sumut Pos 19. Warta Kita 20. Waspada 21. Gebrak 22. Batak Pos 23. Tribun Medan 24. Jurnal Medan 25. Berita Medan 26. Bintang Sumatera 27. Gaya Medan 28. Koran Medan 29. Medan Ekspos 30. Suara Sumut 31. Harian Koreksi 32. Skala Indonesia 33. Pos Kota Sumatera dan 34. Orbit

- Surat Kabar Mingguan yang tercatat/terpantau ada 16 surat kabar yaitu : 1. Aktual 2. Radar 3. Suara Buruh 4. Aplaus 5. Barisan Baru 6. Independen Sangkakala 7. Indonesia Baru 8. Indonesiaku 9. Koran Politik DOR 10. Koran Sepak Bola GOL 11. Media Fakta 12. News Investigasi Indonesia 13. Senior 14. Suara Rakyat 15. Taruna Mandiri dan 16. Suara Masa

- Jumlah Penyiaran Radio di Sumatera Utara :
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Radio terdiri dari :
 - RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli
 - Radio Pemerintah Deli Serdang
 - Radio Pemerintah Serdang Bedagai
 - Radio Pemerintah Kota Siantar
 - Radio Pemerintah Tapanuli Tengah
 - Radio Pemerintah Pakpak Bharat
 - Radio Siaran Publik Daerah Labuhan Batu

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 145 stasiun radio

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 15 stasiun radio

Jumlah Penyiaran Televisi di Sumatera Utara :

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Televisi ada 2 diantaranya :

- TVRI
- TV Karo

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi ada 23 lembaga

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi ada 7 lembaga

- Website milik Pemerintah Daerah :
 - Web Pemprov : 1
 - Web SKPD yang aktif ada 15 web
- Pameran/Expo di Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan secara rutin setiap tahun
- Jumlah Tower (menara telekomunikasi) yang direkomendasi : 1003 unit

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

1) Padi

Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras untuk memantapkan swasembada beras di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.37.
Tabel Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras
Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				
		Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012*	Pencapaian Target (%) Tahun 2012
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.426.178	13.103.596	13.592.923	13.215.401	97,22
2	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	132.79	134,00	132.12	136.60	103,39
3	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.782.837	1.755.881,86	1.795.953	1.805.223,76	100,52
4	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi***)	2.111.039	2.043.070,73	2.159.846	2.104.299,93	97,43
5	Surplus/Penyangga per Tahun (Ton) (4-3)	328.202	287.188,87	363.893	299.076,17	82,19
6	Produksi GKG (Ton)	3.727.413	3.607.403	3.813.591	3.715.514	97,43
7	Luas Panen (Ha)	841.980	757.547	854.609	765.099.	89,53
8	Produktivitas (Kw/Ha)	44,27	47,62	44,62	48,56	108,83
9	Luas Tanam (Ha)	859.163	720.097	872.050	769.174	88,20

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan konsumsi beras/kapita sebesar 3,39% dari target yang telah ditetapkan, sehingga tujuan untuk pengurangan konsumsi perkapita belum tercapai. Terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara belum berhasil menerapkan diversifikasi pangan. Sementara target ketersediaan beras untuk dikonsumsi, surplus/penyangga per-tahun, produksi GKG, luas panen dan luas tanam terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan target di RPJMD belum mencapai seperti yang diharapkan.

Dari data penanaman padi nasional tahun 2009 diperoleh data dari Luas Panen Nasional mencapai 12.668.989 Ha maka rata-rata kontribusi luas panen padi Sumatera Utara terhadap Nasional adalah 6.25 %, sedangkan Produksi Nasional sampai tahun 2009 mencapai 62.561.146 ton, sehingga rata-rata kontribusi produksi padi Sumatera Utara terhadap Nasional sebesar : 5.74 %.

Namun data rata-rata produktivitas padi di Sumatera Utara selama lima tahun : 4.35 ton/ha, masih dibawah produktivitas nasional apalagi dibandingkan dengan Jawa. Kemudian Dilihat dari Perbandingan antara Luas Panen dan Luas Sawah, Indeks Penanaman (IP) masih di bawah 2 artinya masih ada lahan sawah yang hanya ditanami 1 kali setahun. Hal ini diakibatkan irigasi yang belum berfungsi secara maksimal.

2) Jagung

Tabel 2.38.
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Jagung
Untuk Memantapkan Swasembada Jagung Di Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				
		Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Pencapaian Target (%) Tahun 2012
1.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,492	61,615		
2.	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	825.609	837.534		
3.	Surplus/Penyangga per Tahun (Ton)	194.540	217.529		
4.	Produksi Jagung (Ton)	1.020.149	1.294.645	1.055.063	1.347.124	127,68
5.	Luas Panen (Ha)	274.632	255.291	281.498	243.098	86,36
6.	Produktivitas (Kw/Ha)	37,15	50,71	37,48	55,41	147,85
7.	Luas Tanam (Ha)	280.237	262.079	287.243	253.234	88,16

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi jagung, surplus/penyangga per-tahun dan produktifitas terus mengalami peningkatan, namun konsumsi jagung per-kapita masih belum memenuhi target jika dibandingkan dengan target pada RPJMD.

3) Kedele

Tabel 2.39.

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi Serta Kebutuhan Kedele Untuk Memantapkan Swasembada Kedele Di Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				
		Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012*)	Pencapaian Target (%) Tahun 2012
1.	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,447	3,700	4,452
2.	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.710	59.993	60.512
3.	Impor/Surplus per Tahun (Ton)* *)	(19.379)	(48.580)	(14.374)
4.	Produksi Kedele (Ton)	40.337	11.426	46.138	5.450	11,81
5.	Luas Panen (Ha)	34.300	11.413	39.200	5.475	13,97
6.	Produktivitas (Kw/Ha)	11,76	10,01	11,77	9,90	84,11
7.	Luas Tanam (Ha)	35.000	14.915	40.000	5.419	13,55

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa konsumsi perkapita mengalami peningkatan begitu juga dengan kebutuhan pertahun dimana sebagian besar untuk industri makanan. Terjadi penambahan impor selama tahun 2011 sebesar 44.755 ton (meningkat hampir 3 kali lipat). Sedangkan produksi mengalami penurunan yang diakibatkan tidak tercapainya target penanaman dan luas panen, walaupun terjadi peningkatan produktivitas sebesar 4%. Peningkatan produksi kedele diharapkan dapat dilakukan dengan peningkatan penggunaan teknologi dan penanaman bibit unggul yang sesuai dengan potensi daerah.

4). Tanaman Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40

Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan pengusaha

No.	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Luas (Ha)
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa sawit	405.921,08	306.393,62	248.500,45	115.202,57	1.076.017,72
2.	Karet	378.423,44	93.282,58	62.271,64	41.258,37	575.236,03
3.	Kelapa	110.138,84	-	1.610,20	1.053,02	112.802,06
4.	Kakao	66.433,25	11.856,11	2.811,36	2.468,10	83.568,82
5.	Lainnya	138.850,31	12.781,25	-	893,05	152.524,61
Jumlah		1.099.766,92	424.313,56	316.086,70	159.982,06	2.000.149,24

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Tabel 2.41.
Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

No.	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Produksi (Ton)
		Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa Sawit	5.568.269,49	5.099.890,26	3.191.105,65	1.633.784,75	15.493.050,15
2.	Karet	287.653,10	67.148,88	63.24,66	50.621,83	468.648,47
3.	Kelapa	93.984,78	-	1.562,26	1.152,70	96.699,74
4.	Kakao	38.651,95	13.717,76	2.698,52	2.498,36	57.566,59
5.	Lainnya	100.152,93	41.257,00	893,05	-	142.205,66
	Jumlah	6.088.712,25	5.222.013,90	3.259.386,82	1.688.057,64	16.258.170,61

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

a. Kelapa Sawit

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara cukup berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan terus bertambahnya areal perkebunan baik milik perkebunan rakyat, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) yang di Sumatera Utara saat ini terdapat 3 BUMN Perkebunan yakni PTPN II, III dan IV.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi kelapa sawit dari tahun 2008-2012 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.42.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2012

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2008	Luas (Ha)	379.853	294.943	237.462	106.948	1.019.206
	Produksi (Ton)	5.070.760	4.422.338	3.064.211	1.527.575	14.084.884
2009	Luas (Ha)	392.721	299.604	244.283	109.105	1.045.713
	Produksi (Ton)	5.088.579	4.668.827	3.075.401	1.529.848	14.362.655
2010	Luas (Ha)	396.564	305.435	251.489	112.323	1.065.811
	Produksi (Ton)	5.221.132	4.823.524	3.107.385	1.545.758	14.697.799
2011	Luas (Ha)	405.799	306.302	248.426	115.168	1.075.695
	Produksi (Ton)	5.428.535	4.972.107	3.190.120	1.592.849	15.183.610
2012	Luas (Ha)	405.921	306.394	248.500	115.203	1.076.018
	Produksi (Ton)	5.568.269	5.099.890	3.191.106	1.633.785	15.493.050

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2009- 2013

Berdasarkan data yang disajikan diatas, diperoleh gambaran bahwa terjadi fluktuasi dari perkembangan areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara.

Dari data diatas secara umum terjadi peningkatan luas areal perkebunan. Perkembangan luas areal perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat mengalami peningkatan dari 379.853 hektar tahun 2008 menjadi 405.921,08 hektar tahun 2012 (naik sebesar 6,86 %), PTPN juga mengalami peningkatan dari 299.604 hektar pada tahun 2008 menjadi 306.393,62 hektar pada tahun 2012 (naik sebesar 3,88 %). Perkebunan Besar Swasta

Nasional dari 237.462 hektar pada tahun 2008 menjadi 248.500,45 hektar pada tahun 2012 (naik sebesar 4,65 %) dan Perkebunan Besar Swasta Asing meningkat dari 106.948 hektar pada tahun 2008 menjadi 115.202,57 hektar pada tahun 2012 (naik sebesar 7,72 %). Dari tabel 2.46 juga dapat dilihat secara umum produksi Kelapa Sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) juga mengalami peningkatan baik Perkebunan Rakyat, PTPN, Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA) dari tahun 2008 sampai 2012. Dari data tahun 2008 sampai 2012, peningkatan produksi untuk Perkebunan Rakyat sebesar 9,8 %, PTPN sebesar 15,3 %, PBSN sebesar 4,14 % dan PBSA sebesar 6,95 %.

2) Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik walaupun terjadi pengurangan areal, hal ini terjadi umumnya di areal, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) sementara untuk perkebunan karet rakyat terjadi peningkatan luas areal.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2008-2012 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.43.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2012

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2.008	Luas (Ha)	363.158	53.986	60.598	34.875	512.617
	Produksi (Ton)	244.404	53.881	70.380	43.633	412.298
2.009	Luas (Ha)	376.076	77.697	59.314	37.456	550.543
	Produksi (Ton)	254.650	59.072	70.444	43.794	427.960
2.010	Luas (Ha)	376.335	85.632	64.053	39.824	565.844
	Produksi (Ton)	261.249	61.019	75.530	46.455	444.253
2.011	Luas (Ha)	378.309,95	93.254,60	62.264,96	41.252,99	575.083
	Produksi (Ton)	280.445,65	65.466,39	63.005,42	50.542,88	459.460
2.012	Luas (Ha)	378.423,44	93.282,58	62.271,64	41.258,37	575.236
	Produksi (Ton)	287.653,10	67.148,88	63.244,66	50.621,83	468.668

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 - 2013

Dari data diatas, terlihat bahwa secara total terjadi peningkatan luas areal tanaman dari tahun 2008 sampai 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,96% per tahun dan produksi komoditi karet dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,82 %. Karet masih didominasi oleh perkebunan karet rakyat, pada tahun 2012 seluas 378.423,4 Ha dengan produksi sebesar 287.653,10ton. Jika dilihat dari produktifitasnya perkebunan rakyat 0.76 ton/ha, masih berada dibawah dari produktifitas karet hasil Perkebunan PBSN sebesar 1,02 ton/ha dan PBSA sebesar 1,23 ton/ha. Sedangkan produktifitas karet dari Perkebunan PTPN sebesar 0,71 ton/ha. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar kepada pertanaman karet rakyat untuk meningkatkan produktifitasnya, baik dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, atau peremajaan karet tua dengan klon yang lebih unggul.

3)Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara, maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2008-2012 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.44.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2012

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2008	Luas (Ha)	60.221	18.711	4.217	2.117	85.266
	Produksi (Ton)	36.042	17.790	3.934	2.486	60.252
2009	Luas (Ha)	66.091	18.501	3.739	2.151	90.482
	Produksi (Ton)	38.294	20.339	3.918	2.501	65.052
2010	Luas (Ha)	67.119	19.503	4.005	2.303	92.930
	Produksi (Ton)	39.582	20.357	3.984	2.543	66.466
2011	Luas (Ha)	66.413	11.853	2.811	2.467	83.544
	Produksi (Ton)	37.683	13.374	2.648	2.477	56.183
2012	Luas (Ha)	66.433	11.856	2.811	2.468	83.569
	Produksi (Ton)	38.652	13.718	2.699	2.498	57.567

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2012

Dari data diatas sama halnya dengan pertanaman karet, maka perkebunan kakao yang dikelola oleh rakyat masih merupakan yang terluas yakni 66.433,25 Ha atau 79,5 % dari luas seluruh pertanaman kakao seluas 83.568,52 Ha. Namun jika dilihat dari produktifitas juga masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan PTPN, PBSN dan PBSA. Untuk tiap hektar lahan hasil produksi kakao rakyat baru sekitar 0.58 ton/ha, sementara produktifitas kakao kebun PTPN sebesar 1,16 ton/ha, kebun PBSN 0,96 ton/ha dan PBSA 1,01 ton/ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan pertanaman kakao yang dikelola oleh rakyat, sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dalam budidaya maupun penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan harga penjualan kakao rakyat.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 71.284,22 Ha yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel 2.45. berikut.

Tabel 2.45.
Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2011

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)			
	TBM	TM	T.T.M.	Jumlah
Karet	53.427,25	286.668,12	43.883,18	383.978,55
Kelapa Sawit	57.677,92	343.973,68	3.679,32	405.330,92
Kopi Arabika	13.315,31	42.101,16	2.704,21	58.120,68
Kopi Robusta	1.080,14	11.649,89	7.556,45	20.286,48
Kelapa	9.746,24	90.031,84	9.808,99	109.587,07
Kakao	16.288,51	39.735,71	3.652,07	59.676,29
Jumlah	151.535,37	814.160,40	71.284,22	1.036.979,99

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

d. Peternakan

1) Ternak Besar

Kondisi ternak yang dikategorikan besar di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.46.
*Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
dari Tahun 2008-2012*

Jenis Ternak Besar	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012*
Kuda	3.218	2.817	3.098	3.175	3.069
Sapi	388.240	401.821	462.443	456.752	609.951
Kerbau	155.341	158.235	161.046	128.540	131.483
Sapi Perah	2.290	2.409	2.569	932	1.057
Total	549.089	565.282	629.156	589.399	745.560

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2009-2012)

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara , 2013

2) Ternak kecil

Kondisi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.47.
Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Jenis Ternak Kecil	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012*)
Kambing	618.394	625.815	744.535	763.147	781.774
Domba	268.291	270.420	317.777	325.722	374.286
Babi	733.864	653.150	742.670	761.235	866.207
Total	1.620.549	1.549.385	1.804.982	1.850.104	2.022.267

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2009-2012)

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2013

3) Ternak Unggas

Kondisi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.48.
*Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2008-2012*

Jenis Ternak Unggas	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012 *)
Ayam Ras Petelur	7.698.504	8.168.685	8.839.750	9.060.742	12.055.592
Ayam Ras Pedaging	42.891.621	43.878.127	39.376.258	40.360.663	42.813.178
Ayam Kampung	11.349.742	11.554.037	11.671.883	11.963.681	12.073.428
Itik Manila	1.825.663	1.953.647	2.569.664	2.633.909	2.790.326
Total	63.765.530	65.554.496	62.457.555	64.018.995	69.732.524

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2009-2012)

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Secara umum, capaian target sub sektor peternakan selama tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Target dan realisasi Daging Sapi dalam Mendukung Swasembada Daging tahun 2011-2012

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2012
		Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.426.178	13.103.596	13.592.923		
2.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,99		1,04		
3.	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	13.262		14.172		
4.	Produksi Daging (Ton)	13.838		15.174		
5.	Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	74.373		81.558		
6.	Produktifitas (Kg/Ekor)	186		186		
7.	Populasi (Ekor)	491.038	456.752	521.975	609.951	

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, 2012

f. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan, sebagai berikut :

Tabel 2.50.
Produktivitas Bahan Pangan Utama, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)					
	- Padi (GKG)	44,63	45,91	47,47	47,62	48,56
	- Jagung	45,71	47,08	51,08	50,71	55,41
	- Kedele	12,14	12,36	12,22	10,01	9,90
2.	Laju Pertumbuhan sektor pertanian (ADHK 2000)	6,05	4,85	5,70	4,82	4,72
2.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	23,83	23,78	23,60	23,22	22,89
	- Tanaman Bahan Makanan	7,91	7,85	7,76	7,42
	- Tanaman Perkebunan	9,64	9,69	9,67	9,75
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,46	2,45	2,40	2,38
	- Kehutanan	1,33	1,31	1,22	1,14
	- Perikanan	2,48	2,48	2,45	2,54

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)
- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : NA = Note Available (data tidak tersedia)

g. Kehutanan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51.
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya
Tahun 2003- 2011 (Ha)

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2003	1,788,016.00	1,481,738.00	362,333.00	47,251.00
2004	1,788,061.19	1,481,738.00	362,333.36	47,251.24
2005 *)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2006*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2007*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2008*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2009*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2010*)	1.874.684,91	1.306.330,00	470.663,74	41.162,47
2011*)	1.874.684,91	1.306.330,00	470.663,74	41.162,47

Keterangan :

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
SUDA 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

- * Keterangan :
- 1) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) Data luas merupakan hasil digitasi Peta Kawasan Hutan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah disesuaikan dengan Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK).
 - 3) Luas Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 859.609,93 ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 1.015.074,98 ha.

Dari tabel diatas menunjukkan tidak ada penambahan luas hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, selama kurun waktu 2006-2009, tetapi pada tahun 2010 ada penambahan luas hutan produksi dan hutan lindung dan sebaliknya pada hutan konservasi dan hutan dikonversi terjadi penurunan luas hutan. Dan pada tahun 2011 tidak ada penambahan jumlah luas hutan.

Hasil hutan berupa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan pemberlakuan pengetatan ekspor hasil hutan dan isu pelestarian hutan.

Tabel 2.52.
Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi
Tahun 2008-2011

Jenis Produksi	Satuan	2008	2009	2010	2011
A. Hasil Utama					
1. Log Rimba	M ³	79.144,05	86.204,62	-	100.554,57
2. Log Pinus	M ³	17.841,98	21.007,27	-	2.822,59
3. Kayu Gergajian	M ³	177.784,42	205.161,58	159.930,48	83.355,33
4. Kayu Lapis	M ³	73.932,24	52.306,15	37.372,97	11.027,17
5. PULP	M ³	164.430,24	164.430,24	44.124,72	31.550,63
6. Block Board	M ³	592	-	-	-
7. Moulding	M ³	22.020,31	33.322,86	42.314,43	24.657,42
B. Hasil Ikutan					
1. Rotan	Ton	339,79	22.820	280.000	20.415,00*)

			-	-	211,585	
2.	Arang	Ton	-	-	-	-
3.	Getah Tusam	Ton	663,35	467,43	674,34	174,18

Sumber : SUDA 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : *) Batang

a. Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kerusakan lahan kritis (tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis) di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam kawasan hutan, sampai dengan tahun 2010, seluas 6.711.629,29 Ha. Dimana seluas 3.417.104,20 Ha (50,91%) berada di dalam kawasan hutan dan seluas 3.294.525,09 Ha (49,09%) berada di luar kawasan hutan.

Dari segi klasifikasi lahan kritis, maka lahan dengan kategori sangat kritis yang paling luas berada pada kawasan hutan, untuk kategori kritis luasan paling besar berada di dalam kawasan hutan, untuk kategori agak kritis dan potensial kritis luasan terbesarnya berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian lahan kritis terbesar berada di dalam kawasan hutan. Sedangkan untuk lahan tidak kritis luasan terbesar berada pada areal penggunaan lainnya untuk luar kawasan hutan dan pada fungsi hutan produksi/hutan produksi terbatas pada lahan di dalam kawasan hutan.

Kabupaten yang mengalami kerusakan hutan terluas berada pada Kabupaten Mandailing Natal seluas 617.364,97 Ha

e. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah. Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2010 adalah 181.395,60 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 4.342 hektar dan rehabilitasi di luar kawasan hutan seluas 177.053,60 hektar. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan tahun 2010 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi seluas 4.142 hektar, penanaman hutan rakyat seluas 924,09 hektar, pembangunan kebun bibit seluas 235 hektar, pembuatan dam pengendali sebanyak 12 unit, pembuatan gully plug sebanyak 27 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 15 unit.

c. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan selama tahun 2008 -2012 terjadi penurunan kontribusi, walaupun nilai rupiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap intensitas pengusaha hutan, tanpa melupakan aspek pelestariannya. Untuk selengkapnya dapat dilihat ada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53.
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk)
Tahun 2007 - 2011 Provinsi Sumatera Utara

No	Sektor	Kontribusi									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %
1	KEHUTANAN	1.414.946,75	1,33	1.460.018,41	1,33		1,31		1,22		1,14

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

2.1.3.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Energi Listrik

Sampai dengan tahun 2012, sumber daya listrik terpasang di Sumatera Utara yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA, tersebar di 8 lokasi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.54.
Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air
Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut
Status Tahun 2012

No.				KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN		
1.	Simalungun	Tanah Jawa	Tonduhan	PLTM	2 x 200 = 400
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
		sda	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	Penyabungan	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750
		- Dolok Sanggul	Sibundong	PLTM	1 x 750 = 750
5.	Tap. Utara	- Adian Koting	Raisan I	PLTM	1 x 750 = 750
		sda	Raisan II	PLTM	1 x 750 = 750
6.	Samosir	Pangururan	Boho	PLTM	1 x 200 = 200
7.	Dairi	Sumbul	Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
8.	Tap. Tengah	Sibolga	Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			TOTAL	PLTM = 9 PLTA = 2	7.500 132.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Berbagai daerah yang dapat menjadi sumber pembangkit listrik yang potensial untuk mengatasi masalah kekurangan energi listrik di Sumatera Utara. Selain pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN juga terdapat pembangkit listrik yang dikelola swasta atau yang dibangun atas swadaya masyarakat (lampiran 31)

Kondisi ketenagalistrikan di Sumatera Utara hingga tahun 2012

- Kapasitas daya terpasang pembangkit : 2.298 MW
- Daya mampu pembangkit : ± 1.539 MW
- Beban puncak : 1.444 MW
- Pertumbuhan pemakaian daya : 8% s.d 9% per tahun
- Usia pembangkit : 15 - 30 tahun

Cadangan sebesar 95 MW, namun hal ini belum dalam kondisi aman, salah satu pembangkit listrik mengalami kerusakan atau pemeliharaan akan terjadi pemadaman

Listrik Desa (PLN) S/D Tahun 2012

- Jumlah Desa : 5.828
- Jumlah Desa Berlistrik : 4.874 (84%)
- Jumlah Desa Belum Berlistrik : 954
- Rasio Desa Berlistrik : 83,63 %
- Rasio Elektrifikasi : 86,45%

b. Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sumatera Utara relatif kecil hanya sekitar 0,6% yang terutama berasal dari galian mineral/batuan (Lampiran 33). Bahan galian yang ada di Sumatera Utara, pada umumnya berupa batuan / mineral dan galian C.

Pertumbuhan sektor Pertambangan di Sumatera Utara menurun dari tahun sebelumnya yaitu 1.38 % di tahun 2011 menjadi 1.32 % di tahun 2012.

2.1.3.2.4. Pariwisata

Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik wisata alam, kuliner maupun wisata budaya. Namun jika dilihat dari kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara yang masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya menunjukkan kurang optimalnya penanganan pariwisata di Sumatera Utara. Salah satu faktor pendukung yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas menuju ke daerah wisata yang dirasa masih sangat kurang. Selain itu dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara.

Tabel 2.55.
Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk

Tahun	Bandar Udara Polonia	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah Total
2008	130.211	7.011	15.271	152.498
2009	148.193	5.075	9.891	163.159
2010	202.296	18.260	14.962	235.518
2011	192.650	18.975	11.501	223.126
2012	205.845	22.132	13.856	241.833

Sumber BPS Prov.Sumatera Utara

Tabel 2.56.

Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2008 - 2011

No.	Kelas	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Melati	736	658	710	712
2	Bintang 1	18	21	22	24
3	Bintang 2	20	19	20	20
4	Bintang 3	10	13	13	14
5	Bintang 4	10	12	10	12
6	Bintang 5	4	4	9	6
Jumlah		798	727	784	788

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dalam lima (5) tahun terakhir (2008-2012) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 3 (tiga) pintu masuk pada tahun 2012 mencapai 241.833 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 8.38 % dari tahun sebelumnya.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Desember 2012 mencapai rata-rata 47,23 persen, atau naik 0,67 poin dibanding TPK hotel berbintang bulan November 2012 yang sebesar 46,56 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya angka TPK Desember 2012 naik 3,07 poin, yaitu dari 44,16 persen bulan Desember 2011 menjadi 47,23 persen pada bulan Desember 2012.

2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

1) Perikanan tangkap

Dengan kondisi perikanan dunia yang cenderung terus meningkatkan produksinya, Provinsi Sumatera Utara juga terus secara maksimal meningkatkan produksi perikanan tangkanya untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008-2012

Tabel 2.57.
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2008-2012

Rincian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Penangkapan di Laut	354.533	361.471	370.507	379.770	391.352
Penangkapan di Perairan Umum	18.792	20.389	24.979	28.979	32.892
JUMLAH	373.325	381.861	395.486	408.748	424.244

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

2) Perikanan Budidaya

Secara umum produksi perikanan dari hasil usaha budidaya terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Rincian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Perikanan Budidaya	56,789.23	60,480.53	118,942.80	126,386.40	143,447

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

Sementara itu menurut data produksi ekspor dan konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.58.
Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2008-2012

NO	KERAGAAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	EKSPOR					
	a. Volume (ton)	46.824,89	49,868.51	54,678.73	51,508.65	52,719.29
	b. Nilai (US)	221.805.712,84	195,173,631.82	206,058,110.53	213,663,776.33	225,434,288.08
2	Konsumsi Ikan/ Kapita (Kg)	26,09	27,79	29,59	34,66	31,92

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel 2.59.
Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2008	46.824,89	430.114,73
2009	49.868,51	442.341,33
2010	54.678,73	514.429,10
2011	51.505,65	535.134,60
2012	52.719,29	567.691,10

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

2.1.3.2.6. Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB untuk tahun 2008-2012 di Propinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.60.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2008 s/d 2012 Provinsi Sumatera Utara (Rp. Juta)

Tahun	PDRB (ADHK)	ADHK		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(Juta Rp.)	%		(Juta Rp.)	%
2008	106.172,36	19.515,52	18,38	213.931,70	41.281,12	19,30
2009	111.559,22	20.575,43	18,44	236.353,62	44.941,66	19,01
2010	118.640,90	21.914,84	18,47	275.700,21	52.384,32	19,00
2011	126.450,62	23.693,43	18,74	314.156,94	60.032,52	19,11
2012	134.463,95	25.406,77	18,89	351.118,16	67.027,28	19,09

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 s.d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2008-2012
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	Berat Bersih	Nilai FOB	Berat Bersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2008	8.520.892	9.261.977	5.880.759	3.696.065	5.565.912
2009	8.058.927	6.460.117	5.236.553	2.724.236	3.735.881
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.826
2012	8.645.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

2.1.3.2.7. Perindustrian

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan ekonomi sendiri tanpa menunggu campur tangan dari pusat. Karenanya setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi sesuai potensi yang dimilikinya. Potensi ekonomi tersebut tergambar dari kontribusi dari setiap lapangan usaha atau sektor. Subsektor industri pengolahan non migas umumnya sangat besar kontribusinya dalam memacu pertumbuhan ekonomi sehingga daerah harus mampu mempercepat pertumbuhan subsektor industri pengolahan non-migas ini agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Data dari BPS berikut menunjukkan pertumbuhan industri dari tahun 2003 sampai dengan 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun bila ditinjau dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB memperlihatkan penurunan. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2009, kontribusi sektor ini sebesar 22,39%, atau kedua setelah sektor pertanian.

Penurunan ini tentunya membuat Pemprov Sumut harus berupaya kuat untuk membantu pengusaha industri non migas terutama pengusaha industri kecil dan menengah agar terus meningkatkan kinerjanya ditengah kesulitan pendanaan dan bahan. Baku. Untuk memacu pertumbuhan bidang industri ini, maka dirasa perlu untuk lebih menitikberatkan usaha kepada penumbuhan industri baru dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dengan penguasaan teknologi.

Tabel 2.62.
Laju Pertumbuhan Industri Berdasarkan ADHK
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	ADHK			ADHB		
	PDRB	Sektor Industri (Rp. Milyar)	%	PDRB	Sektor Industri (Rp. Milyar)	%
2008	106,172.36	24,305.23	22.89	213,931.70	51,640.68	24.14
2009	111,559.22	24,977.11	22.39	236,353.62	55,050.58	23.29
2010	118,640.90	26,105.21	22.00	275,700.21	63,293.45	22.96
2011	126,450.62	26,548.66	21.00	314,156.94	70,672.27	22.50
2012	134,463.95	27,513.10	20.46	351,118.16	77,484.96	22.07

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia :

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.63.
Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2008 - 2012

NO	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT	391.726	432.389	499.694	564.565
	a. Pangan	211.733	236.917	267.180	316.343
	b. Non Pangan	179.993	195.472	232.514	248.222
2	Jumlah RT	2.980.434	3.027.500	3.037.716	3.083.199
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	0,13	0,14	0,16	0,18

Sumber : BPS Sumatera Utara

- b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konseptual nilai tukar petani adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Di sini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen. Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2008-2012 :

Tabel 2.64.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 s.d 2012
Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	114,47	121,78	129,12	138,20	141,49
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	121,78	120,79	126,14	133,64	139,12
3.	Rasio	101,79	100,82	102,36	103,42	101,71

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dari data yang disajikan di atas dapat diperoleh hasil analisa bahwa sejak tahun 2008 Nilai Tukar petani di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008-2012. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Sumatera Utara.

- a. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.65.
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
 Tahun 2008-2011 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	179,993	195,472	232.514	248.222
2.	Total Pengeluaran RT	391,767	432,389	499.694	564.565
3.	Rasio	45,944	45,207	0,465	0,440

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur no. 55 Tahun 2010, tentang pedoman, tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari, terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

b. Angka kriminalitas

Tabel 2.66.
 Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kasus Narkoba	2.461	2.802	2.718	2.728	2.078
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	138	114	127	152	160
3	Jumlah Kejahatan Seksual	911	984	1.065	1.156	1.026
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	6.098	6.526	6.869	7.362	7.053
5	Jumlah Kasus Pencurian	8.805	9.089	10.245	8.832	8.343
6	Jumlah Kasus Penipuan	1.361	1.670	2.260	2.635	2.060
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	21	22	13	31	17
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	31.895	35.336	41.806	47.156	43.234
9	Jumlah Penduduk	12.834.371	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.24 %	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

c. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.67.
Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	177	243	193	84	64
2	Ekonomi	69	82	47	55	211
3	Sosial Budaya	448	66	279	70	309
4	Kasus Pemogokan Kerja	65	82	72	60	47
5	Jumlah Unjuk Rasa	759	473	591	269	631

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2008 - 2012 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap investasi di daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan, maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.68.
Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4.147.000	4.139.648	3.461.930	4.344.275	4.381.084
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	779.200	517.226	568.777	509.599	513.793
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4.926.200	4.656.874	4.030.707	4.853.874	4.894.877
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	8.794.804	6.076.121	6.379.748	6.105.409	5.950.598
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,56	0,76	0,63	0,79	0,82

Sumber : BPS, 2012

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

Tabel 2.69.
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Provinsi Sumatera Utara**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	213,93	236,35	275,70	314,37	351,13	398,39	<
1.2.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	106,17	111,56	118,64	126,45	134,46	145,04	<
1.3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,39	5,07	6,35	6,42	6,63	6,98	<
1.4.	Laju inflasi provinsi (%)	10,72	2,78	6,96	3,79	4,30	6,00	>
1.5.	PDRB per kapita ADHB (Rp.Juta/Jiwa)	16,81	18,38	21,23	23,97	25,56	28,19	<
1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,80	100,8	102,36	103,42	101,71	104,27	<
1.7.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,7216	0,7254	0,7148	-	-	-	-
1.8.	Persentase penduduk miskin (%)	12,55	11,51	11,31	10,83	10,41	7,00	<
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	97,04%	97,15%	97,32%	97,46%	-	98,46	-
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,60	8,65	8,85	8,91	-	10,07	-
1.3.	Angka partisipasi kasar							-
1.3.1.	PAUD (%)	18,82	29,58	31,27	35,50	-	-	-
1.3.2.	SD/MI (%)	112,73	112,89	114,20	104,56	-	112,59	-
1.3.3.	SMP/MTs (%)	92,48	89,74	89,83	89,02	-	105,01	-
1.3.4.	SMA/SMK/MA (%)	69,58	73,36	72,69	79,69	-	89,99	-
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	94,26	94,46	95,33	91,46	-	92,66	-
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	74,17	74,21	74,76	67,96	-	97,52	-
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	55,16	55,30	55,72	57,83	-	74,57	-
2.	Kesehatan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi, dilihat dari Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	25,6	24,3	23,0	23,0	23	22	=
2.2.	Angka Kematian Ibu dilihat dari Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 kelahiran hidup	290	260,0	268,0	250,0	250	275	>
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,20	69,4	69,8	72,0	-	72	>
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)	21,4	22,2	21,4	20,0	-	20	=
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90,90	91,55	91,99	93,63	93,80	93,40	>
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	18,82	29,58	31,27	35,50	-	-	-
1.2.	Pendidikan dasar							
1.2.1.	APK SD + MI + Paket A	112,73	112,89	114,20	104,56	-	112,59	=
1.2.2.	APM SD + MI	94,26	94,46	95,33	91,46		92,66	=
1.2.3.	APK SMP + MTs + Paket B	92,48	89,74	89,83	89,02	-	105,01	=
1.2.4.	APM SMP + MTs	74,17	74,21	74,76	67,96	-	97,52	=
1.2.5.	APK SMA + MA + Paket C	69,58	73,36	72,69	79,69	-	89,99	=
1.2.6.	APM SMA	55,16	55,30	55,72	57,83	-	74,57	=
1.2.1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,04	97,15	97,32	97,46	-	98,46	>
1.2.2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,60	8,65	8,85	8,91	-	10,07	=
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)	30.262	29.834				-	-
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (Unit)	20.343	20.076				-	-
1.4.	Angka Putus Sekolah						-	-
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1,27	1,14	1,03	0,93		-	-
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,79	5,11	4,60	4,14		-	-
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA (%)	2,07	6,90	6,21	5,59		-	-
1.5.4.	Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%)	1,3	2,38	2,15	1,94		-	-
1.5.	Angka Kelulusan:						-	-
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	263,040	277,316	205.289	506.881		-	-
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	149,312	155,731	171.304	172.973		-	-
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	93,982	96,762	91.717	98.199		-	-
1.6.4.	Angka Kelulusan (AL) SMK	55,330	58,969	60.513	57.987		-	-
1.6.5.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (orang)	81,849	88,722	251.134	74.286		-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.6.6.	S2 (orang)	518	1,184	667	732		-	
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kematian Bayi /1000 KLH	25,6	24,3	23,0	22,0	222	22	>
2.2.	Angka Kematian Ibu/100.000/KLH	290	315	305	295	285	275	<
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,20	68,8	69,6	70,4	71,2	71,30	<
2.4.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	21,4	22,5	21,80	21,20	20,6	20	>
2.5.	Rasio posyandu per satuan balita			1:55,71	1:24.681		-	
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			1:25.332	1:24.681		-	-
2.7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			1:69.918	1:67.616		-	-
2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk			1:14.67	1:17,64		-	-
2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			1:25,61	1:29,69		-	-
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			100%	100%		-	-
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			64,20%	86,73%		-	-
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			NA	65,78%		-	-
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100%	100%		-	-
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			100%	100%		-	-
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100%	100%		-	-
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			100%	100%		-	-
2.17.	Cakupan kunjungan bayi			69,82%	76,82%		-	-
2.18.	Cakupan puskesmas			1:25.332	1:24.681		-	-
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas			1:6.918	1:7.137		-	-
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	42,40	46,93	40,86	44,11	41,74	-	
3.2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)	27,94	26,26	37,99	31,32	24,85	-	
3.3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)	8,44	7,28	9,53	13,42	17,00	-	
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)	21,25	9,53	11,64	11,15	16,41	-	
3.5.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik			45	61		-	
3.6.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			1: 381	1: 381		-	
3.7.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	2.752,04	2.752,04	2.752,04	2.752,04	3048,50	-	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
3.8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	32.115,92	32.115,92	32.115,92	33.078,18	33.078,18	-	
3.9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	29,08	29,08	29,08	38,70		-	
3.10.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)			88.773		-	
4.	Perencanaan Pembangunan							
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)	-	-	-	-		-	=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	1	-	-		-	=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	1	1	-		-	=
4.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	-	1	1	1		-	=
5.	Lingkungan Hidup	-						
5.1.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	-	80	85	-	-	-	
5.2.	Penegakan hukum lingkungan (kasus)	-	15	-	-	-	-	
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-						
6.1.	Rasio KDRT (kasus)	15	19	18			-	
6.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	55%	57%	57%	57%	57%	-	
7.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					-	
7.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1,92	2,1	2,07	4,25			
7.2.	Jumlah Akseptor KB	278,858	368,377	405,961			
7.3.	Cakupan peserta KB aktif	1.322.653	1.404.182	1.429.414			
7.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.032.237	1.049.325	1.048.191			
8.	Sosial							
8.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (UPT Layanan Sosial)		13			
8.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (jenis)		23			
8.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (program)		5			
9.	Ketenagakerjaan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
9.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,33	69,14	77,10	72,09	69,41	
9.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (org)	62.074	48.107	52.974
9.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	10,10	9,10	7,43	6,37	6,20	6,00	<
10.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
10.1.	Persentase koperasi aktif (%)	63,20		58,57	58,60		
10.2.	Jumlah UKM non BPR (Unit)	121.051	124.139
10.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)			95	95		
10.4.	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	1.925.850	1.761.648	2.151.729		
11.	Penanaman Modal							
11.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	37	34	22	54	55		
11.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	2.943.093,92	12.047.929,86	2.024.885,56	1.662.522,50	3.615.486,19		
11.3.	Daya serap tenaga kerja (%)	292	239	110	104			
11.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(1.281,13)	2.253,63	(1.690,80)			
12.	Ketahanan Pangan							
12.1.	Regulasi ketahanan pangan (Perda)	-	2	-			
12.2.	Ketersediaan pangan utama							
12.2.1	Padi (ton)	1.900.913	2.007.375	2.040.924	2.043.070	2.104.299		<
12.2.2	Jagung (ton)	1.098.969	1.166.548	1.428.813	1.294.645	1.347.124		>
12.2.3	Kedele (ton)	11.647	34.545	10.260	11.426	5.450		<
12.2.4	Daging		13.633	15.707,60	16.065	13.838		<
13.	Statistik							
23.1.	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
14.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
15.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi			4	4	4		
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk			NA	NA	NA		
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal			5/20	5/34	5/34		
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal			6/2	15/2	15/2		
25.5.	Web site milik pemerintah daerah			23	15	15		
25.6.	Pameran/expo			Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun		
16.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan			31 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota		
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	283.505	433.812	589.553	593.834	594.443		
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	193,587	201,067	326,170	652.780	679.289		
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.1.	Produktivitas Padi (kw/ha)	44,63	45,91	47,47	47,62	48,56		
1.2.	Produktivitas Jagung (kw/ha)	45,71	47,08	50,13	50,71	55,41		
1.3.	Produktivitas Kedele (kw/ha)	12,14	12,36	12,10	10,01	9,90		
1.4.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,83	23,78	23,60	23,22	22,89		
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	7,91	7,85	7,76	7,42			
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan PDRB	9,64	9,69	9,67	9,75			
1.7.	Kontribusi sektor peternakan	2,46	2,45	2,40	2,38			
1.8.	Kontribusi sektor perikanan	2,48	2,48	1,22	1,14			
1.9.	Kontribusi sektor kehutanan	1,33	1,31	2,45	2,54			
2.	Kehutanan							
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,33%	1,31%	1,22	1,14			
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,23	1,19			
4.	Pariwisata							
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,59	0,60			
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Produksi perikanan		562.448,7 2			
5.2.	Konsumsi ikan		29,59			
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	18,38	18,44	18,47	18,74	18,89		
6.2.	Volume Ekspor (Juta ton)	8,52	8,06	7,98	8,16	8,64		
6.3.	Nilai Ekspor (Milyar US\$)	9,26	6,46	9,14	11,88	10,39		
6.4.	Volume Impor (Juta ton)	5,88	5,24	6,24	6,71	6,18		
6.5.	Nilai Impor (Milyar US\$)	3,69	2,72	3,57	4,95	5,16		
6.6.	Nilai Bersih Perdagangan (Milyar US\$)	5,56	3,73	5,56	6,92	5,22		
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	22,89	22,39	22,00	21,00	20,46		
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	1,77	1,76			
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	391.726	432.389	499.694	564.565			
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp.)	179.993	195.472	232.514	248.222			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2013)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.3.	Produktivitas total daerah							
2.	Pertanian							
2.1.	Nilai tukar petani	101,8	100,8	102,36	103,13	101,71		>
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani			6.285			
1.2.	Jumlah demo			581	269	631		
1.3.	Lama proses perijinan		10 Hari				
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha		1					
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa			48,84				
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3							
1.2.	Rasio ketergantungan	0,56	0,76	0,63	0,79	0,82		

2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.70.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2011	2012		2013	2014
1	2	3	5	6	7	8	9
1	PDRB (Harga Berlaku)	Triliun Rp	314,37	351,12	36,75	398,39	454,52
2	PDRB (Harga Konstan)	Triliun Rp	126,59	134,46	7,87	143,31	153,29
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%	14,29	11,69	(2,6)	14,96	14,09
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu	%	6,63	6,22	(0,41)	6,58	6,96
5	Tingkat Inflasi	%	3,67	3,86	0,19	6,00	7,13
6	Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :						
	- Pertanian	%	22,48	21,88	(0,6)	22,10	21,95
	- Pertambangan & Penggalian	%	1,38	1,32	(0,06)	1,34	1,32
	- Industri Pengolahan	%	22,48	22,67	0,19	22,35	22,55
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0,94	0,91	(0,03)	0,91	1,05
	- Bangunan	%	6,42	6,72	0,3	6,61	6,59
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	%	19,21	19,09	(0,12)	19,14	19,32
	- Pengangkutan dan komunikasi	%	9,21	9,36	0,15	9,25	9,20
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	%	6,96	7,53	0,57	7,14	7,17
	- Jasa - jasa	%	10,92	11,12	0,2	11,16	10,85
7	Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang bersangkutan						
	- Pertanian	Juta	27,22	30,78	3,56	31,93	35,17
	- Pertambangan & Penggalian	Juta	143,98	10,49	(133,49)	157,88	171,98
	- Industri Pengolahan	Juta	145,96	259,56	113,6	165,69	175,16
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta	264,09	221,05	(43,04)	300,02	362,53
	- Bangunan	Juta	60,61	82,04	21,43	73,55	80,40
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	Juta	49,95	60,00	10,05	59,21	64,89
	- Pengangkutan dan komunikasi	Juta	117,20	285,59	168,39	139,63	153,08
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	Juta	185,11	306,47	121,36	178,91	198,04
	- Jasa - jasa	Juta	38,83	43,64	4,81	46,67	51,99
8	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)						
9	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa	1,38	1,37	(0,01)		
10	Tingkat Pengangguran (Triwulan III 2010)	%	6,37	6,20	(0,17)	5,92	5,52
11	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						

	- Pendapatan Perkapita	Rp Juta	23,99	26,40	2,41	33,35	36,91	
	- Kemampuan Investasi (Triwulan III 2010)	Rp Triliun	64,57	74,15	9,58	82,24	95,99	
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)							
	- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	-	74,65	75,00	0,35	75,57	76,09	
	- dan sebagainya							
1	Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan-perbandingan							
2		- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1	1,04	0,04	1,07	1,06
		- Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB	%	1,21	2,17	0,96	2,23	2,05
		- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	1,57	1,61	0,04	1,71	1,57

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Tahun 2009-2013.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun lalu (2009 dan 2010), didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2013 yang merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2013. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun 2012. Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2010-2011) adalah sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2012

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

Tabel 2.71
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2012
Provinsi Sumatera Utara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2012 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
I.	Wajib																
1.	Pendidikan	1.1. Indeks Pendidikan															
		1. APK PAUD	35,68	53,9			60	30,20	33,5			84,64	99,26				
		2. APK SD + MI + Paket A	110,52	111,41	111,4	112,59	112,59	98,11	99,57	111,4		88,77	89,37	100		98,94	<
		3. APM SD + MI	92,9	93,16	92,66	92,66	92,66	94,81	95,00	92,66		102,06	101,98	100		100,00	>
		4. APK SMP + MTs + Paket B	96,89	99,49	101,19	105,01	105,01	98,01	99,57	101,19		101,16	100,08	100		96,36	<
		5. APM SMP + MTs	89,01	91,56	93,29	97,52	97,52	93,50	94,18	93,29		105,04	102,86	100		95,66	<
		6. APK SMA + MA + SMK	78,07	81,21	82,46	89,99	89,99	68,99	86,40	82,46		88,37	106,39	100		91,63	<
		7. APM SMA	65,01	67,55	68,5	74,57	74,57	67,61	85,16	68,5		104,00	126,07	100		91,86	<
		8. Buta Aksara	2,05	1,92	1,79	1,67	1,54	1,78	1,67	1,54		100,13	100,13	86,03		100,00	>
		9. Rata - Rata Lama Sekolah (tahun)	9,27	9,47	9,66	10,07	10,07	9,86	9,91	9,66		106,36	104,65	100		95,93	<
2.	Kesehatan	2.1. Indeks Kesehatan															
		1. Angka Kematian Bayi (/1000 KLH)	26	25	24	23	22	24,3	23,0	22,0		106,5	108,0	91,7		100,0	>
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) (100.000 KLH)	315	305	295	285	275	260,0	268,0	250,0		121,2	113,8	118,0		90,9	<
		3. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	68,8	69,6	70,4	71,2	72	69,4	69,8	72,00		99,2	99,8	98,9		100,0	=
		4. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang (%)	22,5	21,80	21,20	20,6	20	22,2	21,4	20,9		101,4	101,9	101,4		104,5	>
3	Pekerjaan Umum																
	a. Sumber Daya Air	3.1. Irigasi (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	73.326	73.326	80.659	88.725	97.597	73.326	73.326	73.326	73.318	100,0	100,0	90,94	82,64	75,12	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	2.656	6.800	7.480	8.228	9.051	6.636	5.505	6.040	5.599	249,85	81,00	80,75	68,05	61,86	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2012 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		3.2 Rawa (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	61.732	61.732	67.905	74.696	82.166	61.732	61.732	61.732	55.232	100,0	100,0	100,0	73,94	67,22	>
		2. Perbaikan/ Peningkatan	1.970	4.200	4.620	67.905	5.590	3.656	2.527	2.604	1.135	185,6	60,2	62,0	22,33	20,30	<
		3.3 Sungai (m)															
		1. Perkuatan tebing	9.683	10.500	11.550	67.905	13.976	9.802	9.012	12.261	5.814	101,2	85,8	116,8	45,76	41,60	<
		2. Normalisasi/ pelurusan	5.607	9.500	10.450	67.905	12.645	6.500	15.168	16.345	42.070	115,9	159,7	172,1	365,99	332,70	<
		3. Pembangunan/ Perbaikan tanggul	14.020	15.250	16.775	67.905	20.298	13.600	18.605	17.615	14.430	97,0	122,0	115,5	78,20	71,09	<
		3.4 Penyediaan Air Baku/Embung (unit)	5	4	4	4	4	9	11	9	7	180,0	275,0	225,0	175	175	>
		4.1 Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik (km)															
		1. Pembangunan Jalan (Km)	139,27	110,00	121,00	133,10	146,4	132,85	101,63	208,93	100,55	95,39	100,9	172,7	75,54	68,87	<
		2. Penggantian Jembatan (m)	732,38	340,00	374,00	411,40	452,5	704,00	234,00	599,10	889,00	96,12	107,9	160,2	216,09	196,46	>
		4.2 Berkurangnya Jalan - jalan berlubang															
		1. Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)	25,12	34,45	37,90	41,68	45,85	18,50	13,00	7,45	16,80	73,65	37,74	19,7	40,31	36,64	<
		2. Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)	2.056	2.320	2.552	2.807,20	3.088	2.026,57	2.264,23	2.280,93	2.203,41	98,57	97,6	89,4	78,49	71,35	<
		3. Pemeliharaan Rutin Jembatan (m)	12.605	13.650	15.015	16.516,50	18.168	11.514,00	10.965,73	10.101,93	10.237,16	91,34	80,34	67,3	61,98	56,35	<
	c. Perhubungan	5.1 Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ															
		1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang (Provsu)		1	1		5		1	1			100,0	100,0		40,00	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2012 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Perlengkapan Jalan (Rambu, Guardrail, Delineator, APILL, Marka Jalan) (Provsu)		1	1		5		1	1			100,0	100,0		40,00	<
		5.2. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan															
		1. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang (unit)		-	2		2		-	1				50,0		50,00	<
		5.3. Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas															
		1. Pengadaan dan pemasangan Rambu lalu lintas (unit)	200	400	350	350	400	125	764	190	180	62,50	191,00	54,29	36,00	45,00	<
		2. Pengadaan dan pemasangan Guard Rail (m)	900	900	1.500	1000	1300	900	1.080	745	-	100,00	120,0	49,67	-	-	<
		3. Pengadaan dan Pemasangan Delineator (buah)	100	500	1.000	1900	1500	-	340	545	700	-	68,0	54,50	36,84	46,67	<
		4. Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan (m ²)	1000	4.000	10.000	2000	1500	5000	5000	400	1500	500,00	125,00	26,67	75,00	100,00	<
	d. Energi Listrik	4.1 Rasio Elektrifikasi Desa	-	-	-		90		80	80,85	83,63						
		4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-	-	-		80		78	78,00	86,45						
I.	Pilihan																
1.	Pertanian	1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya															
		a. Padi															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	134,13	133,46	132,79	132,12	131,46	136,85	136,85	134,00	136,60	102,03	102,54	100,91	97,22	101,93	>
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.756.070	1.769.543	1.782.837	1.795.953	1.808.895	1.784.841	1.807.509	1.755.881,86	1.805.223,76	101,64	102,15	98,49	103,39	97,07	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2012 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		3. Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi (Ton)	2.016.709	2.063.335	2.111.039	2.159.846	2.209.782	2.007.375	2.040.924	2.042.665,05	2.104.299,93	99,54	98,91	96,76	100,52	92,44	<
		4. Surplus/Penyangga per Tahun (Ton) (4-3)	260.639	293.792	328.202	363.893	400.887	222.533	233.416	286.783,00	299.076,17	85,38	79,45	87,38	97,43	71,54	<
		5. Produksi GKG	3.560.856	3.643.183	3.727.413	3.813.591	3.901.761	3.527.899	3.586.862	3.607.036,00	3.715.514	99,07	98,45	96,77	82,19	92,45	<
		6. Luas Panen (Ha)	817.277	829.536	841.980	854.609	867.428	768.407	752.019	757.428,00	765.099.	94,02	90,66	89,96	97,43	87,32	<
		7. Produktivitas (Kw/Ha)	43,57	43,92	44,72	44,62	44,98	45,91	47,70	47,62	48,56	105,37	108,61	106,48	89,53	105,87	>
		8. Luas Tanam (Ha)	833.956	846.466	859.163	872.050	885.131	768.407	752.019	757.428,00	769.174	92,14	88,84	88,16	108,83	85,57	<
		b. Jagung															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,247	61,370	61,492	61,615	61,739	6,52	6,73			10,65	10,97				
		2. Kebutuhan (Konsumsi + Industri) per Tahun (Ton)	801.891	813.728	825.609	837.534	849.504	851.536	864.515			106,19	106,24				
		3. Surplus/Penyangga per Tahun (Ton)	151.857	172.662	194.540	217.529	241.669	315.012	564.298			207,44	326,82				
		4. Produksi Jagung (Ton)	953.748	986.390	1.020.149	1.055.063	1.091.173	1.166.548	1.377.718	1.294.645	1.347.124	122,31	139,67	126,91	127,68	118,65	>
		5. Luas Panen (Ha)	261.399	267.934	274.632	281.498	288.536	247.782	274.822	255.291	243.098	94,79	102,57	92,96	86,36	88,48	<
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	36,49	36,81	37,15	37,48	37,82	47,08	50,13	50,71	55,41	129,02	136,19	136,50	147,85	134,08	>
		7. Luas Tanam (Ha)	266.734	273.402	280.237	287.243	294.424	277.424	272.776	262.079	253.234	104,01	99,77	93,52	88,16	89,01	<
		c. Kedele															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4.438	4.443	4.447	4.452	4.456	4.480	4.450			100,95	100,16				
		2. Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	58.111	58.910	59.710	60.512	61.316	78.687	79.380			135,41	134,75				
		3. Impor/Surplus per Tahun (Ton) *)	(34,51)	(24,37)	(19,379)	(14,374)	(9,37)	(64,48)	(69,12)			(186,83)	(283,69)				
		4. Produksi Kedele (Ton)	23.598	34.545	40.337	46.138	51.950	14.206	9.439	11.426	5.450	60,20	27,32	28,33	11,81	21,99	<
		5. Luas Panen (Ha)	20.139	29.400	34.300	39.200	44.100	11.494	7.803	11.413	5.475	57,07	26,54	33,27	13,97	25,88	<
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	11,72	11,75	11,76	11,77	11,78	12,36	12,10	10,01	9,90	105,46	102,98	85,12	84,11	84,97	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2012 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		7. Luas Tanam (Ha)	20.550	30.000	35.000	40.000	45.000	13.836	7.758	14.915	5.419	67,33	25,86		13,55		
		1.2. Produksi tanaman perkebunan (ton *)															
		1. Perkebunan Rakyat	5.343.755,08	5.481.089,58	5.621.953,58	5.786.437,79	5.914.635,24	5.566.087,96	5.709.136,42	5.851.971	6.088.712,25	104,16	104,16	104,09		98,94	<
		2. PTPN	4.759.159,87	4.881.470,28	5.006.924,07	5.135.602,02	5.267.586,99	4.795.006,84	4.918.238,52	5.372.409	5.222.013,90	100,75	100,75	107,30		101,99	>
		3. PBSN	3.945.514,52	4.046.914,25	4.150.919,94	4.257.598,59	4.367.018,87	3.152.346,33	3.233.361,63	3.484.123	3.259.386,82	79,90	79,90	83,94		79,78	<
		4. PBSA	1.603.350,06	1.644.556,15	1.686.821,24	1.730.172,55	1.774.637,99	1.577.345,54	1.617.883,32	1.838.419	1.688.057,64	98,38	98,38	108,99		103,59	>
		Jumlah	15.651.779,53	16.054.030,26	16.466.618,84	16.889.810,94	17.323.879,09	15.090.786,67	15.478.619,89	16.546.923	16.258.170,61	96,42	96,42	100,49		95,52	<
		1.3. Produksi perikanan															
		1. Produksi Perikanan (ton)	481.139,42	512.413,49	545.720,36	545.720,36	581.192,19	442.341,33	514.429,10	535.134,60	567.691,10	99,12	109,76	118,88		111,62	>
		2. Ekspor hasil perikanan (ton)	53.017,51	58.319,26	64.151,19	70.566,31	77.622,94	48.935,59	54.550,73	51.505,65	52.7152.719,2 99,29	92,30	93,54				
		3. Konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)	28,75	30,62	32,61	34,73	36,98	27,79	29,59	34,66	31,92	96,66	96,64				
		1.4. Produktivitas peternakan															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,89	0,94	0,99	1,04	1,10	1,34	1,34			150,56	142,55				
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	11.608	12.409	13.262	14.172	15.142	17.832	18.036			153,62	145,35				
		3. Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	11.507	12.618	13.838	15.174	16.640	14.996	15.615	16.066		130,32	123,75	116,10		96,55	<
		4. Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	61.848	67.819	74.373	81.558	89.434	95.841	96.936	86.347		154,96	142,93	116,10		96,55	<
		5. Produktivitas (Kg/Ekor)	186	186	186	186	186	186,06	186,06	186		100,03	100,03	100,03		100,03	>
		6. Pemotongan Sapi Impor (Ekor)	8.217	6.847	5.477	4.107	2.737	15.242	13.111			185,49	191,49				
		7. Pemotongan Sapi Lokal (Ekor)	53.631	60.972	68.896	77.451	86.697	80.599	84.798			150,28	139,08				
		8. Populasi (Ekor)	434.561	461.936	491.038	521.975	554.859	404.230	420.480	480.941		93,02	91,03	97,94		86,68	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2012 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
2.	Koperasi dan UMKM																
		1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10 - 15% per tahun	1.000	1.100	1.300	1.000	5.000	850	875	950		85	80	73		54	<
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10% per tahun	40.000	55.000	60.500	50.000	250.000	35.000	45.000	57.000		88	82	94		55	<
		3. Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya	30	30	40	30	150	24	28	30		80	93	75		55	<
		4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	1.300	1.200	1.300	1.200	5.000	1.100	1.000	1.100		85	83	85		64	<
		5. Pemberdayaan usaha Mikro dan Menengah	250.000	250.000	240.000	250.000	1.000.000	235.000	240.000	220.000		94	96	92		70	<
		6. Terbinanya Koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan	10	10	12	10	50	10	10	12		100	100	100		64	<
		7. Terbinanya Koperasi pada Desa TP. PKK Provinsi	5	5	6	5	25	5	5	6		100	100	100		64	<
		8. Peningkatan peran gender dalam Pengembangan KUKM	200	200	220	200	1.000	180	190	220		90	95	100		59	<
		9. Pembentukan Koperasi Primer	200	200	200	200	1.000	185	185	180		93	93	90		55	<
		10. Terbinanya UMKM dalam Sentra	300	300	300	300	1.500	275	287	270		92	96	90		55	<

2.2.1 Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Review capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2012, target yang ingin dicapai pada tahun 2013 dan proyeksi untuk tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.72.
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2009-2013

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa							
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk					Keberadaan rumah ibadah yang tidak merata di daerah	Kemudahan syarat pendirian rumah ibadah
2.	Pelayanan publik yang baik melalui Good Governance dan Clean Government					Masih adanya persepsi lambannya pelayanan aparat pemerintah dan kurangnya daya saing daerah	Penguatan Lembaga perijinan terpadu
		Implementasi LPSE di Provinsi Sumatera Utara	LPSE terbentuk di 33 Kab/Kota	Terbangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Office	Terbentuknya LPSE pada seluruh Kabupaten/Kota dan implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	Masih adanya isu KKN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah	Pembentukan LPSE diseluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung pemberlakuan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah
					Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Masih tingginya inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda tentang sistem perencanaan dan penganggaran secara terpadu - Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak lapar							
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	- Padi (Kw/Ha)	47,62	44,62	44,98	45,34	Luas tanam belum tercapai	Pencetakan sawah baru
						Produktifitas masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target produksi	Penanaman bibit unggul adaptif
						Irigasi belum optimal	Pembangunan dan perbaikan Irigasi
	- Jagung (Kw/Ha)	50,71	37,48	37,82	38,16	Konsumsi masih rendah	Diversifikasi pangan non beras dengan meningkatkan konsumsi jagung
						Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan kedele dan lahan kebun TBM
	- Kedele (Kw/Ha)	10,01	11,77	11,78	11,79	Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan jagung
						Produktifitas masih rendah	Penanaman bibit unggul dan teknologi pertanian
						Bibit unggul masih terbatas	Revitalisasi BBI untuk pengadaan benih
	- Daging (ton)	186	186	186	186	Ketergantungan impor masih tinggi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk menambah populasi
						Populasi masih kurang	Pembangunan Cluster industri pengolahan ternak
						Pengembangan ternak masih terbatas	Integrasi ternak dengan kebun dan hutan (agroforestry)
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	22,18	21,88	21,00	21,95	Anomali iklim makro	Manajemen sistem usaha tani dan maksimalisasi peran BMG
Komitmen Mewujudkan Rakyat Tidak Bodoh							
1.	APK PAUD (%)	NA	NA	NA	34	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Utara pada tahun 2010 53,50 persen masih dibawah rata-rata APK	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						PAUD Indonesia yang sebesar 53,70	
2.	APK SD + MI	111,40	111,64	112,59	110	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara sebesar 94,24 masih dibawah rata-rata APK Nasional yang sebesar 95,23	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
3.	APM SD + MI	92,66	92,36	92,66	94		
4.	APK SMP + MTs	101,19	104,00	105,01	96	APK SMP/MTs Nasional = 98,11% Hal ini berarti bahwa APK SMP/MTs Sumut lebih tinggi daripada APK SMP/MTs secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
5.	APM SMP + MTs	93,29	96,20	97,52	72		
6.	APK SMA + MA + SMK (%)	82,46	86,29	89,99	86	APK SMA/MA/SMK Nasional = 69,6%, yang berarti APK SMA/MA/SMK Sumut lebih tinggi daripada APK SMA/MA/SMK secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan revitalisasi SMK
7.	APM SMA	68,50	71,59	74,57	75		
8.	APK Perguruan Tinggi			NA	NA	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 18,19 persen masih dibawah rata-rata APK Perguruan Tinggi (PT) Nasional sebesar 18,36	Pemberian bea siswa bagi siswa berpretasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-I dan D-III
9.	Angka Melek Huruf (%)	98,21	98,33	98,46	98,51	Masih terdapat buta aksara usia produktif diatas 15 tahun	Pembelajaran di luar ruang kelas dan peningkatan kesempatan belajar
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,66	9,86	10,07	10,11	Target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah tercapai tetapi perlu ditingkatkan untuk Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun	Perluasan kesempatan belajar formal melalui kemudahan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak Sakit							
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Angka Kematian Bayi)	24	23	22	22	Target sudah tercapai namun AKB masih cukup tinggi di beberapa Kabupaten	Meningkatkan kesehatan ibu pra kehamilan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBUJAKAN YANG DIPERLUKAN
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	295	285	265	250	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada yang AKI tinggi	Meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan
3.	Usia harapan hidup	70,63	70,96	72,0	72,2	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada disparitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada kabupaten yang belum memenuhi target
4.	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	21,2	20,6	20	18	Target rata-rata sudah tercapai namun masih ada beberapa Kabupaten yang prevalensi balita gizi buruk Sangat Tinggi (diatas 30%)	Peningkatan kesehatan bagi ibu pra kehamilan dan selama masa pertumbuhan balita
6.	Rasio posyandu per satuan balita	1:76,77	-	-	-	Keberadaan Posyandu sudah kurang berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Revitalisasi posyandu melalui rehabilitasi posyandu dan pemberian insentif bagi tenaga pelayanan kesehatan
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:24.681	-	-	1 : 23.000	Kurangnya fungsi pelayanan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Revitalisasi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:67.616	-	-	-	Keterbatasan daya tampung pasien di Rumah Sakit	Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam mendirikan Rumah Sakit dan pemberian stimulan bantuan melalui Hibah dan Bansos
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:17,64	-	-	-	Kurang meratanya keberadaan tenaga pelayanan kesehatan di daerah disebabkan ketertarikan melayani di daerah perkotaan	Pemberian insentif dan beasiswa bagi tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:29,69	-	-	-		
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	-	-	100%	Kurangnya kompetensi SDM Bidan	Pembinaan bidan melalui seminar, workshop, lokakarya dan pelatihan keterampilan
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,73%	-	-	90%		
13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child	65,78%	-	-	80%	Masih terdapatnya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta	Pemberian imunisasi, makanan pengganti ASI dan makanan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	Immunization (UCI)						
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	-		100%	pemberian imunisasi yang tidak lengkap	tambahan secara gratis bagi balita melalui Puskesmas, Pustu, Pusling dan Posyandu
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	-		100%	Masyarakat kurang memahami gejala penyakit yang diderita dengan cepat sehingga penanganan selalu terlambat	Sosialisasi gejala penyakit penderita TBC BTA dan BDB dan tindak lanjut penanganan dengan pengobatan dasar
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	-		100%		
17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	-		100%	Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan rujukan belum tertangani seluruhnya melalui Jamkesmas	Pengalokasian dana Jamkesda bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri dan Jamsostek
18.	Cakupan kunjungan bayi	76,82%	-		95%	Kunjungan rutin bayi melakukan imunisasi masih kurang	Pemberian imunisasi dasar secara gratis melalui pelayanan Posyandu dan Puskesmas
19.	Cakupan puskesmas	1:24.681	-		1 : 23.000	Menurunnya fungsi Pelayanan Dasar Puskesmas, Pembantu Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
20.	Cakupan pembantu puskesmas	1:7.137	-		1 : 6.700		
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	73,53			70,64	Rendahnya kemampuan SDM angkatan kerja sehingga kurang memenuhi permintaan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai pelaksanaan berbagai pelatihan kerja dan pemagangan serta menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan
2.	Pencari kerja yang ditempatkan					Penempatan angkatan kerja masih belum memenuhi permintaan kesempatan kerja	Pelatihan dan pemagangan para pencari kerja oleh perusahaan pencari pekerja
3.	Persentase koperasi aktif (%)	58,60				Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBUJAKAN YANG DIPERLUKAN
						aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	murah antara lain dengan skim kredit bunga murah seperti dengan pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
4.	Usaha Mikro dan Kecil	95					
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	54				Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.662.522,5				Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
7.	Daya serap tenaga kerja	104				Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
8.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)					Proses perizinan yang masih birokratif, serta status lokasi usaha yang masih belum pasti (sengketa lahan)	Harus terdapat SOP untuk pengurusan izin investasi dan biaya yang jelas untuk pengurusan izin investasi serta ada payung hukum tentang ruang (RTRW Provsu) harus egera selesai diperdakan
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,42	101,71	104,27	102,50	NTP sudah memenuhi target, namun masih ada disparitas antar kabupaten	Perlu peningkatan SDM petani dengan penyuluhan pertanian dan bantuan permodalan
10	Angka Kemiskinan	10,83	10,41	10,30	10,2	Perlu kerja keras untuk menanggulangi Angka Kemiskinan sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7,5%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBUJAKAN YANG DIPERLUKAN
11	Angka Pengangguran	7,60	6,90	6,5	6,0	Masih perlu upaya serius untuk mengatasi Angka Pengangguran Terbuka sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan peluang usaha produktif
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,16	NA	75,54	76,35	Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh	Perlu peningkatan pada aspek terkait kesehatan (angka harapan hidup) pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)
Pengembangan Infrastruktur Wilayah							
1.	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	48,19	65,21	85	90	<p>Kondisi topografi yang sangat bervariasi dimana daerah dataran rendah rawan bencana banjir, sedangkan di daerah pegunungan rawan longsor</p> <p>Di kawasan pegunungan dan hutan lindung lebar standar 7 m tidak terpenuhi</p> <p>Berat kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas jalan</p> <p>Keuangan yang terbatas</p> <p>Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan</p> <p>Peralatan kerja yang tidak memadai</p> <p>SDM yang terbatas</p>	<p>Peningkatan alokasi anggaran APBD dan APBN</p> <p>Peningkatan SDM dan Kelembagaan</p> <p>Regulasi pembatasan berat kendaraan</p> <p>Peningkatan Peralatan</p>
2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40	38,70 %	41,30 %	60,00 %	75,00 %	Kemampuan keuangan yang terbatas sehingga kapasitas	Peningkatan bantuan APN untuk penanganan jalan di

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBUJAKAN YANG DIPERLUKAN
	KM/Jam) (%)					jalan dan geometri jalan tidak sesuai dengan standar teknis minimal	Kab/Kota
3.	Jaringan irigasi						
	Pemeliharaan Rutin	73.326 Ha	73.318 Ha	80.000 Ha	88,773 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kondisi irigasi teknis dan semi teknis akibat kerusakan alat ukur dan bangunan irigasi. 2. Kondisi jaringan irigasi secara keseluruhan masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air , pengendali kelebihan air dan pengamanan terhadap kerusakan. 3. Daerah irigasi di dataran tinggi yang jaringan irigasinya terletak pada lereng-lereng perbukitan rentan terhadap longsor. 4. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa. 5. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan belum lengkapnya dan/telah rusaknya bangunan pengatur sehingga pengalokasian air tidak optimal menaikkan intensitas tanam, saat ini intensitas tanam 115 %. 6. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Irigasi menjadi 	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBUJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>non pertanian.</p> <p>7. Sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah untuk kebutuhan infrastruktur SDA.</p> <p>8. Kelembagaan/orgasnisasi pemakai air irigasi yang masih lemah dan belum berkembang untuk menunjang sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>9. Masih lemahnya pemahaman tentang berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.</p> <p>10. Belum terlaksananya pengelolaan aset irigasi dengan baik yang sangat penting untuk Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</p> <p>11. Belum aktifnya Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara serta belum terbentuknya Komisi Irigasi kabupaten pada sebagian besar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara</p>	
	Perbaikan/Peningkatan	6.040 Ha	5.559 Ha	4.975 Ha	4.975 Ha		
	Jaringan Rawa						
	Pemeliharaan Rutin	61.732 Ha	55.232 Ha	55.232 Ha	55.232 Ha	1. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Rawa.	Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2012	TARGET 2013	PROYEKSI TAHUN 2014	PERMASALAHAN	KEBUJAKAN YANG DIPERLUKAN
	Perbaikan/Peningkatan	2.604 Ha	1.135 Ha	1.320 Ha	1.320 Ha	2. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Rawa menjadi non pertanian setelah dibangun jaringan pengairan 3. Tidak adanya lembaga masyarakat Pengelolaan Jaringan Rawa	normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa
	Penanganan Tebing Sungai /Pantai	12.261 m	5.814 m	4.060 m	4.060 m	Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Sungai.	Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
	Normalisasi /Pelurusan Sungai	16.345 m	45.070 m	15.000 m	15.000 m		
	Perbaikan dan pembangunan tanggul banjir	17.615 m	14.430 m	14.800 m	14.800 m		
	Penyediaan Air baku/Embung	9	9	7	7	Terbatasnya dan penyediaan air baku	Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
5.	Rasio elektrifikasi desa	80,85	83	84	88	Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belum mampu terlayani Potensi energi di Sumut yang belum sepenuhnya tereksplorasi	Pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro dan PLTS (energi terbarukan)
6.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	78	79	87	90		
7.	Cakupan pelayanan air minum (%)						
8.	Status Mutu Sumber Air Minum		Layak Minum	Layak Minum	Layak Minum		

2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.73.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN*)	RKPDProvinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	Revitalisasi UPT dan BBI untuk meningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan
2.	Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;	Pengelolaan terpadu perikanan darat dan perikanan laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (kapal, pelabuhan perikanan dan pasar lelang)
3.	Pengembangan gugus (<i>cluster</i>) industri unggulan;	Pengembangan cluster industri hilir CPO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, cluster industri aluminium, industri karet dan kakao	
4.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra industri migas dan lumbung energi nasional;	Pembangunan PLTA Asahan III, dan PLTA Asahan IV	Pembangunan PLTP Sarulla Pengembangan Bio Mass
5.	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;	Pengembangan tujuan wisata Danau Toba, dan Kepulauan Nias,	Pengembangan wisata MICE di Kota Medan Pengembangan Geo Park di Danau Toba
6.	Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;	Pembangunan PLTS terpusat	
7.	Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Toll se-Sumatera • Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api se-Sumatera • Interkoneksi listrik se-Sumatera • Global hub Kuala Tanjung • Bandara Kuala Namu sebagai hub penerbangan nasional/internasional 	
8.	Pengembangan Sumatera sebagai <i>pool</i> angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;	Pemberdayaan BLK Dukungan terhadap penciptaan 1 juta pengusaha pemula (12.000)	
9.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni • Beasiswa siswa miskin • Jamkesda • Bantuan Sosial 	
10.	Reformasi birokrasi dan tata kelola;	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Government melalui system e-Planning, e-Budgeting, e-Office, e-Procurement dan e- 	

		<ul style="list-style-type: none"> Performance Pencapaian WTP pada Laporan Keuangan Provinsi 	
11.	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Pengembangan daerah terdepan, terluar, perbatasan (pulau Berhala)	
12.	Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.	Pengembangan Taman Nasional Gn. Leuser dan TN Batang Gadis Penataan kawasan industri berbasis lingkungan	
13.	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Sumatera, diarahkan untuk : - Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya;	- Pengembangan Kawasan Mebidang-ro - Pembentukan kelembagaan Mebidang-ro	
	- Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Agropolitan Dan Agromarinepolitan Pengembangan Cluster Industri CPO Pengembangan Cluster Peternakan Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) 	
14.	Penanggulangan Pasca Bencana Kepulauan Nias	Pengembangan Regional Management dan Pengembangan micro finance di Kepulauan Nias	

Keterangan :

*) Kebijakan Nasional terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJMN-2010-2014

2.2.4. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD tahun 2012. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2014 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74.
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Sumatera Utara*)
(9 Prioritas Provinsi)

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pelayanan Publik					
2.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan					

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan					
	1 Pelayanan kesehatan gratis			Medan, Sumatera Utara	Dinas Kesehatan RS Pemprov	Perlu dukungan kab/kota (universal coverage)
4.	Revitalisasi Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri /agribisnis					
	1 Pelaksanaan Rapat khusus/Sidang terbatas untuk membahas soal ketahanan pangan			Medan	SKPD Lingkup Pertanian	
	2 Koordinasi terkait Dana Bagi hasil Pertanian				Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Perkebunan	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3 Perbaikan dan Optimalisasi tempat pelelangan ikan (TPI)			Kelurahan Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan, Kab. Batubara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	
	4 Asuransi Nelayan			Kec. Medan Marelan Link. 6, 7, 8, 9 dan Pekan Labuhan, Desa Bagan Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	
	5 Bantuan alat-alat pertanian.			Kec. Medan Marelan, Kab. Simalungun, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kec. Hamparan Perak, Wonosari desa tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Parsibarungan, Desa Lumban Sinaga Simatupang Kec. Pangaribuan, Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara, Kec. Pakkat, Kec. Dolok Sanggul, Kec.	Dinas Pertanian Provsu	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Paranginan, Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan		
	6 Pengadaan pupuk bersubsidi			Kec. Medan Marelan, Desa Bekerah Kabupaten Karo, Desa Dolok Marlawan, Kelurahan Tong Marimbun , Kab. Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Kec. Hamparan Perak, Wonosari desa tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa, Warga Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Desa Sukasari, Desa Payabagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Kec. Binjai Timur, Kec. Binjai Utara, Kota. Binjai Kec. Secanggang, Kec. Selesai, Kab. Langkat,	Dinas Pertanian Provsu	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan, Kec. Siborong borong Kab. Tapanuli Utara, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintong Nihuta, Kec. Onan Ganjang, Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Angkola Timur, Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Kec. Padang bolak Kab. Padang Lawas Utara		
	7	Bantuan bibit tanaman jeruk		Dusun VIII Sukarasmii, Kec. Sipispis, Serdang Bedagai, Kecamatan Barusjahe, Tiga Panah Kabupaten Karo, Sumbul Kabupaten Dairi	Dinas Pertanian Provsu	
	8	Pengadaan hewan ternak (sapi/lembu, kambing, bebek, babi), kepada masyarakat dan petani dan kelompok tani dan Pemerataan distribusi pengadaan ternak		Desa Pondok Tengah, Serdang Bedagai, Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang, desa Rahuning, Bayur, Batu Anam, Mekar Sari Kisaran Timur Kab. Asahan, Kec. Lotu Kab.	Dinas Peternakan dan Keswan Provsu	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Nias Utara, Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Kec. Moro'o, Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat, Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai, Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Lingkungan III, Kel. Jati Utomo, Kec. Binjai Utara, Kota. Binjai, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, Kel. Gunting Saga, Kec. Kuala Selatan, Desa Kelurahan Kampung Dusun IV Aek Godang, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhan Batu Utara, Kec. Bilah Hilir, Desa Aek Paing, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Parsibarungan, Desa Lumban Sinaga Simatupang Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Pakkat, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintong Nihuta, Kec. Onan		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Pangururan Kab. Samosir, Kec. Angkola Timur, Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, Kec. Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara		
	9 Penanganan aksi perambahan hutan mangruf dan Pengawasan terhadap nelayan luar tanpa izin			Desa Firdaus, Kab. Serdang Bedagai, Kec. Tuhemberua Kab. Nias Utara, Desa Jia Biang Kepulauan Tello Kec. Pulau Puluau Batu Utara Kab. Nias Selatan	Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	
	10 Pengawasan/Pelarangan terhadap pukat tarik gandeng dua (trawel/tank Thailand)			Kab. Serdang Bedagai, Kab Asahan , Kota Tanjungbalai, Kab. Batubara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	
	11 Bantuan sampan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan			Kab. Serdang Bedagai	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	
	12 Pengadaan kapal motor 23 PK / 5 GT			Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai. Kec. Afulu, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Samo dan Tuhemberua Kab. Nias	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Utara		
	13	Pengadaan kapal motor untuk Pokmaswas		Kec. Samo dan Kec. Lahewa Kab. Nias Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	
	14	Pemberian bantuan modal kepada kelompok tani guna mendorong kegiatan masyarakat melalui peningkatan UKM		Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, buntu pane Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, Kab. Karo, Kecamatan Tanjung Tiram, Kab Batubara, Kec. Sicanggung, Kab. Langkat		
	15	Pengadaan bibit sawit		Desa ilir Kota gunung sitoli, Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara		
	16	Pengadaan bibit cokelat/kakao		Desa ilir Kota gunung sitoli, Kec. Tuhemberua Kab. Nias Utara, Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas		
	17	Pembangunan SPBBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)		Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	Hibah

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	18 Bantuan kendaraan untuk mengangkat kotoran lembu untuk dbuat pupuk kandang.			Kelompok Peternak Lembu Dusun IV Desa Sengon Sari Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan		
	19 Pengawasan Pupuk Bersubsidi palsu			Desa Simodong, Kec. Sei Suka Kab. Asahan, Kabupaten Karo, Simalungun, Kec. Siborong borong Kab. Tapanuli Utara, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara	Dinas Pertanian Provsu	
	20 Penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat			Kec. Mendoge Kab. Asahan	Dinas Perkebunan Provsu	
	21 Pengawasan terhadap beroperasinya pukat trawl Thailand, trawl kerang dan trawl gerandong tapak sepatu yang merusak karang			Desa Bagan Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	Bansos
	22 Optimalisasi Percetakan Sawah		± 340 Ha	Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, Kec. Borbor, Kec. Silaen Kab. Toba Samosir	Dinas Pertanian	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	23 Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan penempatan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)			Kecamatan Padang Tualang, Kab. Langkat, Kabupaten Karo, Desa Turunan Kec Huta Bayu Raja Kab. Simalungun, Kelurahan Pondok Sayur Kota Pematangsiantar, Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kec. Moro'o, Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat, Dusun Siria-ria, Desa Pematang, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhan Batu Utara, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat, Desa Silantom Julu, Desa Lumban Sinaga Simatupang Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Paranginan, Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Harian Kab. Samosir, Kec. Sipirok Kab. Tapanuli	Dinas Pertanian	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Selatan		
	24	Pengadaan kapal bermesin 15 PK dengan muatan 1,5 ton		Kec. Pulau pulau Batu Barat, Desa Jia Biang Kepulauan Tello Kec. Pulau Puluau Batu Utara Kab. Nias Selatan		
	25	Penggantian Alat tangkap pukat sorong dengan alat tangkap tradisional		Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat	Dinas Perikanan dan Kelautan	
	26	Reboisasi		Kec. Moro'o, Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat		
	27	Pembuatan Rumpon		Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten langkat	Dinas Perikanan dan Kelautan	
	28	Pengadaan alat tangkap ikan yang moderen bagi masyarakat dan kelompok tani perikanan		Desa Paluh Nipah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten langkat, Kec. Hamparan Perak, Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, Kec. Afulu, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Samo dan Tuhemberua Kab. Nias Utara, Kec. Pulau Puluau Batu Utara Kab. Nias Selatan, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Gebang, Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Langkat, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten langkat		
	29	Bantuan mesin penyedot air		Kec. Secanggang, Kab. Langkat	Dinas Pertanian	
	30	Penegakan undang-undang tentang larangan beroperasinya pukat trawl di perairan Indonesia		Kec. Gebang, Kab. Langkat	Dinas Perikanan dan Kelautan	
	31	Pembinaan dan bantuan pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini		Desa Sei Tualang, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat	Dinas Perkebunan	
	32	Pembangunan tangkahan nelayan Tradisional sebagai tempat pendataran ikan, dan pendistribusian BBM Nelayan		Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang, Kec. Tuhemberua Kab. Nias Utara		
	33	Pengadaan hand traktor		Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang, Kec. Tuhemberua Kab. Nias Utara, Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan, Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Utara, Kec. Pakkat, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintong Nihuta, Kec. Onan Ganjang Kab.Humbang Hasundutan, Kec. Harian, Kec. Pangururan, Kec. Sianjur Mula mula Kab. Samosir, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan		
	34	Pengadaan jetor bagi masyarakat petani		Warga Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang		
	35	Pengadaan bibit ternak ikan gurame dan ikan tawar lainnya		Buntu pane Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, Kec Tuhemberua Kab. Nias Utara, Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Silantom Julu Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan		
	36	Pembukaan lahan tidur menjadi lahan persawahan		Kabupaten Karo, Kec. Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan		
	37	Pengadaan bibit unggul set jagung,		Kelurahan Tong Marimbun , Kecamatan Dolok Silau Kab. Simalungun, Wonosari desa tanjung Morawa		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kec. Tanjung Morawa, Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang		
	38 Pengadaan bibit unggul set padi			Kelurahan Tong Marimbun , Kecamatan Dolok Silau, Desa Dolok Marlawan Kab. Simalungun, Wonosari desa tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa, Warga Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis , Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, Kec Tuhemberua Kab. Nias Utara, Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Desa Batu Manumpak, Desa Silantom Julu, Desa Purbatua Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan		
	39 Pengadaan bibit unggul set sayur dan hortikultura lainnya.			Kelurahan Tong Marimbun , Kecamatan Dolok Silau Kab. Simalungun, Wonosari desa tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa,		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, Kec. Tuhemberua, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Lumban Sinaga Simatupang Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Pakkat, Kec. Paranginan, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan		
	40	Pembangunan pergudangan untuk menampung hasil pertanian hortikultura		Kecamatan Dolok Silau Kab. Simalungun, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Desa Aek Paing, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara		
	41	Perbaikan jalan alternatif produksi pertanian		Desa Bekerah Kabupaten Karo	Dinas Pertanian	
	42	Pembangunan dan perbaikan irigasi pertanian untuk menunjang peningkatan hasil panen		Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, Desa Dolok Marlawan Kab. Simalungun, Kab. Deli Serdang, Desa Ombolata		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kec. Alasa, kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kec. Mandrehe Nias Barat, Desa Timbang Jaya, Kec. Bahorok, Kec. Secanggang, Kec. Stabat, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Desa Batu Manumpak, Desa Purbatua, Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintong Nihuta, Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Tampahan, Kec. Bonatua Lunasi, Kec. Habinsaran, Kec. Laguboti, Kec. Balige, Kec. Sigumpar, Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, Kec. Nainggolan, Kec. Harian, Kec. Ronggur Ni Huta, Kec. Pangururan, Kec. Sianjur Mula mula Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kec. Angkola Timur, Kec. Angkola Barat, Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, Kec.		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Kec. Padang Bolak, Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, Desa Siunggam, Kec. Batang Lobu Sutam, Kec. Huristak, Kec. AekNabara Barumon, Kec. Ulu BarumonKec. Simangambat Kab. Padang Lawas		
	43	Pengadaan bibit kopi unggul		Kecamatan Barusjahe, Tiga Panah Kabupaten Karo, Desa Batu Manumpak, Desa Silantom Julu Kec. Pangaribuan, Kec. Sipahutar, Kec. Siborong borong Kab. Tapanuli Utara		
	44	Pengadaan pupuk NPK dari PT.PUSRI untuk meingkatkan produksi hasil pertanian		Kabupaten Karo		
	45	Pembukaan jalan Desa menuju perladangan dan persawahan		Kabupaten Karo, dusun 05 Desa Banuagea Kec. Tuhemberua Kab. Nias Utara		
	46	Pembangunan/perbaikan/pelebaran Jalan Usaha Tani		Desa Lingga Julu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo,	Dinas Pertanian	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kabupaten Simalungun, Kec. Tuheberua, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kec. Paranginan, Kec. Dolok Sanggul, Kec. Pakkat, Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Sigumpar, Kec. Porsea, Kec. Silaen, Kec. Nassau, Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Kec. Pangururan Kab. Samosir, Kec. Batang Angkola, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Simangambat Kab. Mandailing Natal		
	47	Pengadaan mesin pemotong kayu		Kec. Pulau pulau Batu Barat Kab. Nias Selatan		
	48	Bantuan bibit kentang granola yang unggul, kepada petani dan Gapoktan		Kabupaten Karo, Kecamatan Dolok Silau Kab. Simalungun	Dinas Pertanian	
	49	Pengadaan Bibit karet Okulasi kepada masyarakat dan petani karet		Kec. Lahewa Timur, Kec Tuheberua Kab. Nias Utara, Kec. Pulau pulau Batu Barat Kab. Nias Selatan, Kec. Mandrehe, Kec. Moro'o, Kec.		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Mandrehe Barat Kab. Nias Barat, Desa Silantom Julu Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara, Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas		
	50	Pengadaan bibit pohon mahoni		Kec. Lahewa Timur Kab. Nias Utara, Kec. Mandrehe Nias Barat		
	51	Pengadaan bibit palawija		Kec. Pangururan Kab. Samosir, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara		
	52	Pengadaan mesin perontok padi		Kec. Tuhemberua Kab. Nias Utara, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan		
	53	Pembangunan Demplot untuk budidaya air payau		Desa Banua Gea Kec. Tuhemberua, Desa Lasara Sawo dan Sisarahili Teluk Siabang Kab. Nias Utara		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	54	Pengadaan perahu motorisasi 5,5 PK / 0,5 GT		Kec. Afulu, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Samo dan Tuhemberua Kab. Nias Utara		
	55	Pembangunan sapras Unit Pembenihan Rakyat (UPR)		Desa Ombalata Sawo Kec. Sawo Kab. Nias Utara		
	56	Penyediaan induk benih bibit unggul dan pakan pada UPR		Desa Ombalata Sawo Kec. Sawo Kab. Nias Utara		
	57	Pengadaan bibit pisang		Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan		
	58	Pengadaan bibit udang		Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan		
	59	Stabilisasi harga pertanian		Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan		
	60	Peremajaan dan pengembangan kopi		Kec. Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan		
	61	Pengadaan alat pengupas dan penggilingan kopi		Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Harian Kab. Samosir		
	62	Pengadaan alat pemotong ubi kayu		Kec. Harian Kab. Samosir		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan					
	1 Bantuan dana bagi pedagang kecil, pengusaha rumah tangga, kelompok usaha, pengerajin dan kelompok kelompok tani			Kec. Medan Area, Kec. Medan Deli, Kec. Medan Marelان, Kec. Medan Petisah Medan, Kab. Batubara, Desa Harapan Jaya Kec. Sei Lapan, Dusun VI Pantai Gemi. Kec. Stabat, Kec. Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Bharat, Kecamatan Pematang Bandar kabupaten Simalungun, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Kec Percut Sei Tuan, Kec. Lubuk Pakam, Warga Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, Kec. Pangururan Kab. Samosir, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal		
	2 Pengembangan Pariwisata Laut untuk menambah penghasilan			Kelurahan Bagan Deli, Kec. Medan Belawan,	Disbudpar provsu	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	bagi warga			Medan		
	3 Bantuan KUR dengan bunga yang minim			Kec. Medan Belawan, Kec. Medan Johor, Kec. Medan Sunggal dan Medan Tuntungan Medan, Kec. Binjai Utara, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai		
	4 Fasilitas bantuan Bank Sumut untuk UKM			Jl. Pelajar Timur Kec. Medan Denai		
	5 Bantuan mesin jahit, alat-alat salon & kosmetik, alat-alat kesenian			Kec. Medan Marelan Medan, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat		
	6 Pengadaan alat-alat untuk pengembangan home industri			Dusun IX A Desa Bingkat, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal		
	7 Peningkatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).			Kota Tebing Tinggi, Kisaran Timur Kab. Asahan, Kec. Moro'o, Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat		
	8 Peningkatan keterampilan bagi wanita, generasi muda dll			Kec. Secanggang, Kec. Tanjung Pura, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	Dinas Koperasi dan UMKM	
	9 Penciptaan lapangan kerja baru untuk putra/putri daerah	Kegiatan pemuda berbasis kewirausahaan / pembukaan lapangan		Kec. Stabat Kab. Langkat, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang	Dinas Koperasi dan UMKM	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kerja				
	10	Produksi Usaha Ekonomi Seperti Tahu, Tempe, Jamu, dll dibantu untuk Penampungannya		Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat	Dinas Pertanian	
	11	Pengadaan Mesin Pompa Air		Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe, Desa Lingga Julu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo		
	12	Pengadaan alat alat untuk Mengolah sampah organic dan non organik		Kab. Karo		
	13	Pengembangan industry hilir atau pembuatan pabrik mini untuk mengolah cabai menjadi saos dan lain-lain		Kab. Simalungun, Kec. Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan		
	14	Stabilisasi harga sembilan bahan pokok		Kec. Hamparan Perak, Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Kec. Indrapura Kab. Batu bara, Kec. Lahewa Timur Kab. Nias Utara		
	15	Pembangunan/perbaikan Pasar tradisional		Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Kec. Padang Bolak, Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, Desa Siunggam, Kec. Batang lobu, Kec. Sosopan Kab.		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Padang Lawas, Desa Harapan Jaya Kabupaten Langkat		
	16 Pembuatan Dermaga ditepi sungai, untuk mendukung objek wisata Bahari menuju Siba Island			Kec. Hampan Perak (siba island) Kab. Deli Serdang		
	17 Pembangunan dan perbaikan jalan menuju lokasi pariwisata			Kawasan wisata Fofola Indah, Pantai Walo Kab. Nias Utara, Outer Ringroad Samosir – Pangururan – Silalahi, tanjung bunga, Sitio tio, Sialagan Kec. Pangururan Kab. Samosir		
	18 Pelestarian/pemugaran daerah wisata dan budaya			Hilisoroni Kec. Alasa Kab. Nias Utara, Kec. Moro'o Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat		
	19 Pembentukan koperasi masyarakat / UMKM			Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kec. Moro'o, Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat, Desa ilir Kota gunung sitoli, Kec. Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Peningkatan Infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi					
	1					
	2 Pemasangan tiang sambungan listrik					
	3 Pemasangan jaringan listrik tiang PLN di desa Bagan Asahan					
	4 Pengadaan Tiang listrik					
	5 pembuatan sumur bor untuk Musholla					
	6 pembuatan sumur bor untuk Serikat Suka Duka Islam					
	7 Pembuatan sumur Bor					
	8 Tiang Listrik untuk 1 Km					
	8. Pembuatan sumur bor			Kec. Medan Marelan Medan, Dusun IA Desa Banjar,Kec. Sungai kepayang Kab. Asahan, Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batubara,	Distamben Provsu	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Desa Jaring Halus, Kec. Secanggang Kab. Langkat, Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, Kec. Harian Kab. Samosir, Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, Kec. Hutaraja Tinggi, Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu		
	9. Pemasangan tiang sambungan listrik			Dusun 7 Gg. Dadap, Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu, Desa Suka Jadi Kec. Meranti Kab. Asahan, Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, Desa Marihat Maria, Desa Sileu – Ieu, Kecamatan Sumbul, Kab Dairi		Kewenangan PLN
	10. Peningkatan sarana listrik dan pemasangan jaringan listrik			Desa Sialang Taji Dusun Kampung Selamat, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Desa Lae Mbalano Kabupaten Pakpak Bharat, Kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi	

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pematang Bandar kabupaten Simalungun, Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, Kec. Lahewa Timur, Kec. Alasa, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, Kec. Ulu Noyo, Kec. Gomo, Kec. Ulu Susua, Kec. Pulau pulau Batu, Desa Hayo Kec. Pulau pulau Batu Barat, Desa Jia Biang Kepulauan Tello Kec. Pulau Pulau Batu Utara Kab. Nias Selatan, Kec. Moro'o , Kec. Mandrehe, Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat, Desa ilir Kota gunung sitoli, Kec. Siborong borong Kab. Tapanuli Utara, Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, Kec. Rongur Ni Huta Kab. Samosir, Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kab. Labuhan Batu, Dusun Bangun Mulia Tj. Morawa A, Desa Belinteng, Kec. Sei		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Bingei, Desa Pematang Jaya, Kec. Stabat, Kab. Langkat		
	11. Penerangan lampu lampu dijalan	Mengurangi tingkat kriminalitas		Desa Londut Abdeling III, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, Desa Aek Paing, Kec. Rantau Utara, Desa Sei Sanggul, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu, Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, Desa Singabur Kecamatan Sitellu Tali Urung Julu Kab Pakpak Bharat, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar kabupaten Simalungun, Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei tuan, Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, desa Sifalaete Kota Gunung Sitoli, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	Dinas Pertambangan dan Energi	
	12. Penyaluran air bersih			Desa Pegagan Julu , kecamatan sumbul , Kab Dairi		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	13. Penyediaan sapras air bersih			Desa Sibande Kecamatan Sitellu Tali Urung Julu, Desa Lae Mbalano , Desa Singabur Kabupaten Pakpak Bharat, Kecamatan Pematang Bandar kabupaten Simalungun, Kec. Namohulu Kab. Nias Utara, Desa Orahili Kec. Gomo, Kec. Somambawa, Kec. Siduaeri, Kec. Lahusa, Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan, Kec. Mandrehe, Kec. Moro'o , Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat		
7.	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin					
	1. Distribusi raskin yang lebih merata	Medan	Biro Perekonomian, Dinsos,	Tanggung jawab Kota Medan

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan

*) Rangkuman Berdasarkan Hasil Reses sampai dengan bulan April 2013)

2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.75.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	>	1. Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih terbatas. 3. Kapasitas lembaga pendidikan kejuruan/pelatihan keterampilan yang relatif rendah	1. Penguatan dan pengawasan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis lokal 2. Penerapan pendidikan berbasis karakter bagi pendidik dan peserta didik 3. Keberadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai serta terjangkau sesuai kebutuhan di tiap jenjang pendidikan 4. Alokasi dana pendidikan yang terus meningkat untuk membiayai program dan kegiatan prioritas bidang pendidikan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	>		
1.3.	Pendidikan dasar 9 tahun	>		
1.4.	Angka partisipasi sekolah	>		
1.5.	Angka partisipasi kasar	>		
1.6.	Angka partisipasi murni	>		
1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	=		
1.8.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	=		
1.9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	>		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.11.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.12.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.13.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<		
1.14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.15.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.18.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		
1.20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	1. Derajat Kesehatan masih rendah yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Angka Kematian Ibu melahirkan. 2. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh bidang pelayanan 2. Universal coverage pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dan Jampersal 3. Kesejahteraan tenaga pelayan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar
2.2.	Angka usia harapan hidup	<		
2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk	<		
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	1. Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan, 2. saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai 3. Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru 4. Pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota). 5. Realisasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan alokasi anggaran - Peningkatan SDM dan kelembagaan - Peningkatan peralatan - Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi - Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa - Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai - Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
3.3.	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		jalan lingkar luar (<i>Outer Ring Road</i>) Danau Toba. 6. Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudok-Tongging (Rawasaring). 7. Realisasi pembangunan kawasan Mebidang-Ro	terjadinya krisis air		
3.4.	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<				
3.5.	Panjang jalan dilalui Roda 4	<				
3.6.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	<				
3.7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	<				
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	<				
4.	Perumahan/Permukiman					
4.1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	=				
5.	Perencanaan Pembangunan					
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=				
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	=				
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	=				
5.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=				

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perhubungan			
6.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	<	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi pengembangan pelabuhan Belawan dan pelabuhan lainnya 2. Pemantapan dan efektifitas transportasi darat (jalan dan jembatan, dan perkeretaapian) 3. Sarana dan prasarana pendukung Bandara Kuala Namu 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pemerintah pusat - Pembebasan lahan
7.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak			
7.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	<	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peran aktif perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta 2. Minimnya Perlindungan hak perempuan dan anak di seluruh sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalanya fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di lembaga pemerintahan dan swasta 2. Kerjasama yang terintegrasi aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak
7.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	<		
7.3.	Rasio KDRT	<		
7.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=		
7.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan			
7.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	=		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	=	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali 2. Minimnya minat pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta aktif KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slogan “Dua Anak Lebih Baik” menjadi keinginan setiap pasangan rumah tangga 2. Dasar pemahaman yang kuat akan pentingnya ber-KB
12.2.	Rasio akseptor KB	=		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	=		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	=		
13	Sosial			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	=	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prasarana dan sarana panti pemerintah dan swasta yang memperhatikan 2. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang minim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi rutin dan berkala panti pemerintah dan swasta 2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	=		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Ketenagakerjaan			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	=	1. Rendahnya serapan angkatan kerja 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	1. Berjalannya fungsi BLK dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai berkualitas 2. Kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja
14.2.	rasio ketergantungan	=		
14.3.	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)	<		
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	>		
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit berbunga murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	<		
15.3.	Jumlah BPR/LKM	<		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	<		
16	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	- Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah - Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	- Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi - Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	>		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
16.5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<		
16.6.	Angka kriminalitas			
16.7.	Jumlah demo	<		
16.8.	Lama proses perijinan	<		
16.9.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	<		
17.	Kebudayaan			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Pagelaran/pertunjukan seni budaya	Fasilitas pendukung gedung pertunjukan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<	masih terbatas	belum memadai
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<		
18.	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	<	1. Minimnya Data dan informasi organisasi pemuda dan olahraga 2. Minimnya prestasi olahraga disebabkan prasarana dan sarana olahraga yang tidak mendukung	1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan keberadaan organisasi pemuda dan olahraga serta prasarana dan sarana olahraga 2. Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai guna memacu prestasi olahraga
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	<		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	<		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<		
18.6.	Lapangan olahraga	<		
19	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	1. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	<		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	2. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	<		
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<		
22	Ketahanan Pangan			
22.1.	Regulasi ketahanan pangan	=	1. Masih berlanjutnya alih fungsi lahan sawah	1. Optimalisasi pemanfaatan irigasi yang ada serta perbaikan dan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</p> <p>3. Terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis</p> <p>4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat</p> <p>5. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berdampak kepada terbatasnya penerapan teknologi</p> <p>6. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup besar</p>	<p>pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum</p> <p>2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi</p> <p>3. Peningkatan dan penanganan teknologi pasca panen untuk memperoleh efisiensi dan kualitas produksi pertanian</p> <p>4. Penyediaan sarana produksi dan permodalan secara tepat sehingga bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil</p> <p>5. Penguatan kelembagaan dan system penyuluhan bagi para petani sehingga terjadi penerapan paket teknologi untuk meningkatkan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya keterampilan, akses permodalan dan lapangan kerja	produktivitas hasil 6. Mengurangi rasio ketergantungan terhadap impor dan pemasukan bahan pangan dari provinsi lain guna kebutuhan masyarakat 7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi masalah pangan
22.1.	Ketersediaan pangan utama	=		
24	Statistik			
24.1.	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=		
24.2.	Buku "PDRB kabupaten"	<		
25	Kearsipan			
25.1.	Pengelolaan arsip secara baku	=	1. Minimnya keberadaan arsip daerah	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya arsip daerah
25.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	=	2. Minimnya kemampuan SDM arsiparis	2. Tata kelola arsip yang tertib dan teratur
26	Komunikasi dan Informatika			
26.1.	Jumlah jaringan komunikasi	=	1. Prasarana dan sarana media informasi baik cetak maupun elektronik belum menjangkau seluruh lokasi di daerah	1. Informasi tersampaikan ke seluruh daerah melalui media cetak dan media elektronik
26.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=		
26.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	=		
26.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	=		
26.5.	Web site milik pemerintah daerah	=		
26.6.	Pameran/expo	=		
27.	Perpustakaan			
27.1.	Jumlah perpustakaan	<	1. Jumlah perpustakaan dan koleksi buku yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai dengan kerjasama TP PKK melalui desa binaan
27.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
27.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
B.	URUSAN PILIHAN			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		1. Peningkatan produktivitas tidak dibarengi dengan peningkatan luas panen (untuk padi dan kedele) 2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif 3. Anomali iklim yang mempengaruhi pola tanam 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat	1. Revitalisasi pertanian mendukung peningkatan produksi dalam menjaga stabilitas pangan dan mensukseskan swasembada pangan 2. Peningkatan mekanisasi pertanian 3. Pengadaan bibit/benih unggul 4. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi, irigasi)
	1.1.1. Padi (Ton)	>		
	1.1.2. Jagung (Ton)	>		
	1.1.3. Kedele (Ton)	<		
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	>		
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	>		
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	>		
1.5.	Nilai tukar petani	>		
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Penerapan prinsip eco environmental telah menjadi rujukan untuk perijinan tambang	Pembuatan Perda Larangan bagi para PETI untuk beroperasi serta adanya zonasi bagi operasional Legal yang diperbolehkan dan dimasukkan dalam RTRWP/RTRWK
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<		
4.	Pariwisata			
4.1.	Kunjungan wisata	<	1. Infrastruktur belum memadai menuju destinasi 2. Destinasi wisata masih monoton	Pembangunan/perbaikan jalan menuju objek wisata ditingkatkan
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>		
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan (ton)	<	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum sepenuhnya	1. Pengembangan produksi perikanan budidaya untuk konsumsi dalam
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/thn	<		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada data		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada data	<p>dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.</p> <p>3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>4. Terjadinya pencemaran perairan umum dan perairan pantai akibat limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>5. dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia</p> <p>6. Jumlah induk unggul untuk kegiatan pembenihan masih sangat terbatas</p> <p>7. Mutu hasil perikanan pada tahap pra panen belum sepenuhnya dapat dikendalikan sesuai dengan standar negara tujuan ekspor</p>	<p>negeri dan ekspor di kawasan budidaya air tawar,air payau/tambak dan air laut</p> <p>2. Pengadaan kapal dan alat penangkap ikan</p> <p>3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet</p> <p>4. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara</p> <p>5. Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	>		
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	>		
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<	1. Krisis energi listrik yang menghambat produksi industri rumah tangga 2. Bahan baku masih diimpor dari luar	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang energi listrik
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	<		
7.3.	Pertumbuhan Industri.	<		